



LAPORAN KINERJA

Pemerintah Provinsi Jambi

TAHUN 2025

JAMBI
MANTAP
BERSAMA MEMBANGUN JAMBI
Berdaya Saing Berkelanjutan





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2025 dalam rangka perwujudan visi Provinsi Jambi yaitu 'Jambi MANTAP, Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT. LKjIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan *progress* pembangunan Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029.

LKjIP Tahun 2025 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2021-2026 sebesar 103,43%. Dari 12 IKU, sebanyak 8 Indikator berhasil melampaui target kinerja. Selanjutnya, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2025-2029 sebesar 98,47% dengan 8 indikator berhasil melampaui capaian $\geq 100\%$. Keberhasilan ini didorong oleh tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi antar instansi. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja pembangunan Provinsi Jambi di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Wassamulaikum wr. wb.

Jambi, Maret 2026

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Diagram	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	1
I Latar Belakang	1
II Maksud dan Tujuan	2
III Gambaran Umum Organisasi	3
3.1. Kondisi Geografis Daerah	3
3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi	3
3.1.2. Potensi Wilayah	3
3.2. Luas dan Batas Wilayah	5
3.2.1. Aspek Demografi	5
3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi	6
3.4. Data Kepegawaian	7
IV Permasalahan dan Isu Strategis	8
4.1. Permasalahan Pembangunan	8
BAB II Perencanaan Kinerja	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja	30
BAB IV Penutup	174
Lampiran	viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi	3
Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak	4
Gambar 1.3. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	6
Gambar 2.1. Logika Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi	23
Gambar 3.1. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026	33
Gambar 3.2. Capaian RB General dan RB Tematik	34
Gambar 3.3. Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Pemerintah Provinsi Jambi	36
Gambar 3.4. Penerimaan Penghargaan atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia kepada Gubernur Jambi	48
Gambar 3.5. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)	56
Gambar 3.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	56
Gambar 3.7. Gubernur Jambi menjadi Pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA	95
Gambar 3.8. IPM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2025	126
Gambar 3.9. Capaian 12 Pilar Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi	141
Gambar 3.10. Penerimaan Penghargaan IDSD Provinsi Jambi Tahun 2025 (2026) Oleh Kepala BRIN kepada Gubernur Jambi	143
Gambar 3.11. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan	164

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2022-2025	40
Grafik 3.2. Trend Perkembangan Indesk Kearsipan Tahun 2000-2025	44
Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025	55
Grafik 3.4. Perkembangan Capaian Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi Tahun 2025	74
Grafik 3.5. Trend Peningkatan Internet Desa	77
Grafik 3.6. Trend Kemampuan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	91
Grafik 3.7. Peningkatan Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA	92
Grafik 3.8. Luas Izin Perhutanan Sosial	92
Grafik 3.9. Persentase Luas Tanam Lahan Kritis	93
Grafik 3.10. Ketersediaan Protein	109
Grafik 3.11. Umur Harapan Hidup	124
Grafik 3.12. Harapan Lama Sekolah (HLS)	125
Grafik 3.13. Pengeluaran Riil PerKapita yang Disesuaikan	126
Grafik 3.14. Perkembangan IPG	131
Grafik 3.15. Perkembangan Indikator Dimensi Indeks Kesehatan Reproduksi Provinsi Jambi, 2020–2024	107
Grafik 3.16. Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Jambi , 2020–2024	133
Grafik 3.17. Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas di Provinsi Jambi, 2020–2024	134
Grafik 3.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024	134
Grafik 3.19. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional 2018-2024	136
Grafik 3.20. Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah di Wilayah Sumatera	151
Grafik 3.21. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2020–September 2025	155
Grafik 3.22. Skenario Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2018-2030	159
Grafik 3.23. Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025	161
Grafik 3.24. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025	163

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1. Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah	35
Diagram 3.2. Capaian Nilai SAKIP per Komponen	40
Diagram 3.3. Nilai Rata-Rata IKM	47
Diagram 3.4. Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha	53
Diagram 3.5. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	54
Diagram 3.6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	62
Diagram 3.7. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	99
Diagram 3.8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	100
Diagram 3.9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan	100
Diagram 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja	101
Diagram 3.11. Trend Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin	101
Diagram 3.12. Trend Tingkat Pekerja Paruh Waktu 2025	102
Diagram 3.13. Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi	103
Diagram 3.14. Skor PPH Tahun 2025	109
Diagram 3.15. Ketersediaan Energi 2025 KKal/Kap/Hr	109
Diagram 3.16. IPM 2021-2025	123
Diagram 3.17. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023–2024	135
Diagram 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi	172

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025	27
Tabel 2.2. Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024	29
Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja	31
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026)	34
Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi	34
Tabel 3.4. Capaian Indeks Domain SPBE Tahun 2025	37
Tabel 3.5. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2025	47
Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Hijau Tahun 2025	52
Tabel 3.7. PDRB Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan	57
Tabel 3.8. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB	57
Tabel 3.9. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi d Sumatera ...	58
Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2025	61
Tabel 3.11. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera	63
Tabel 3.12. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah	63
Tabel 3.13. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan	64
Tabel 3.14. Garis Kemiskinan PerKapita Rumah Tangga Miskin Maret-September 2024	65
Tabel 3.15. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Pelarahan Kemiskinan (P2)	65
Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas	68
Tabel 3.17. Pengukuran Indikator Kinerja Akses Terhadap Air Minum Layak Tahun 2025	73
Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	74
Tabel 3.19. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama	75
Tabel 3.20. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Desa Kelurahan Mendapat Akses Internet	77
Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79
Tabel 3.22. IKLH	79
Tabel 3.24. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Pangabuan	83
Tabel 3.25. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2016-2025	84
Tabel 3.26. Perbandingan Target IKAL	86
Tabel 3.27. Capaian Kinerja 2021-2025 (IKEG)	87

Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penurunan Emisi GRK	91
Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja TPT 2025	97
Tabel 3.30. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Agustus 2025	98
Tabel 3.32. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia, Februari 2024–November 2025	104
Tabel 3.33. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025	108
Tabel 3.34. Ketersediaan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025	109
Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja IPM 2025	123
Tabel 3.36. IPM Menurut Dimensi	124
Tabel 3.37. IPM Per Kabupaten/Kota 2025	127
Tabel 3.38. IPM dan Komponen IPM per Kabupaten/Kota	127
Tabel 3.39. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Ketimpangan Gender	130
Tabel 3.40. Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	132
Tabel 3.41. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran	135
Tabel 3.42. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Provinsi, 2018–2024	137
Tabel 3.43. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)	139
Tabel 3.44. Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025	142
Tabel 3.46. Capaian Sasaran Kinerja “Antara”	147
Tabel 3.47. Incremental Capital Output Ratio Provinsi Jambi, 2020–2024	148
Tabel 3.48. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	151
Tabel 3.49. Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru Tahun 2025	153
Tabel 3.50. Capaian Sasaran Kinerja “Antara”	154
Tabel 3.51. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Sept 2024–Sept 2025 ..	156
Tabel 3.52. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) Tahun 2025	160
Tabel 3.53. Indeks Modal Manusia Tahun 2025	160
Tabel 3.54. Capaian Indikator Kinerja “Antara”	160
Tabel 3.55. Tahapan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026	167
Tabel 3.56. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran	171

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi Pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai gambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Provinsi Jambi kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2025, menggambarkan upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H

Gubernur Jambi

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I

Wakil Gubernur Jambi

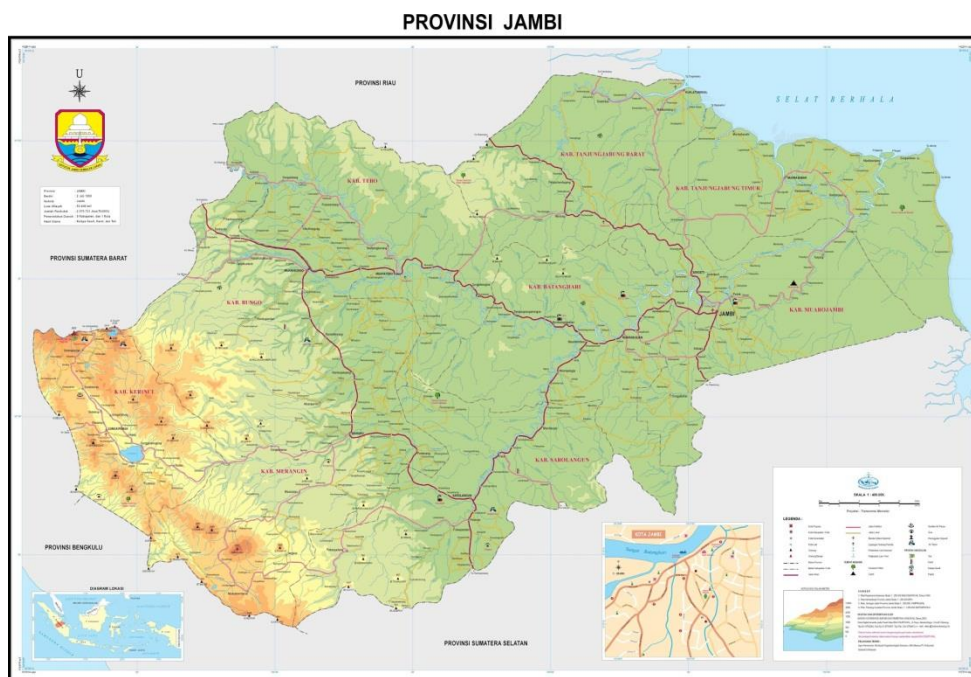
III. GAMBARAN UMUM DAERAH

3.1. Kondisi Geografis Daerah

3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi

Peta orientasi Provinsi Jambi memperlihatkan posisi geografis provinsi ini di Pulau Sumatera serta batas-batas administratif dengan provinsi-provinsi tetangga, yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Peta ini juga menampilkan variasi topografi wilayah, dengan ketinggian yang ditandai melalui gradasi warna, yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Informasi spasial yang ditampilkan menjadi penting dalam mendukung evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geografis, keterkaitan antarwilayah, serta potensi dan kendala fisik yang ada di Provinsi Jambi.

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi



Secara geografis Provinsi Jambi terletak di antara 0°45' sampai 2°45' Lintang Selatan dan 101°10' sampai 104°55' Bujur Timur (BPS Provinsi Jambi, 2025). Provinsi ini berada di bagian tengah Pulau Sumatera serta memiliki wilayah perairan yang menghadap ke Selat Berhala, yang terhubung dengan jalur pelayaran internasional melalui Selat Karimata. Posisi tersebut menjadikan Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang strategis bagi lalu lintas perdagangan internasional. Dengan letak ini, Provinsi Jambi juga masuk dalam rencana pembangunan tol laut nasional dan memiliki potensi pengembangan ekonomi yang terhubung dengan kawasan pertumbuhan ekonomi sub-regional Indonesia–Malaysia–Singapura atau Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle (IMSGT).

3.1.2. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak



Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung

berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan pemetaan potensi wilayah secara komprehensif sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengembangan wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, serta keunggulan masing-masing yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jambi sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Sumatera memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah. Adapun potensi-potensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

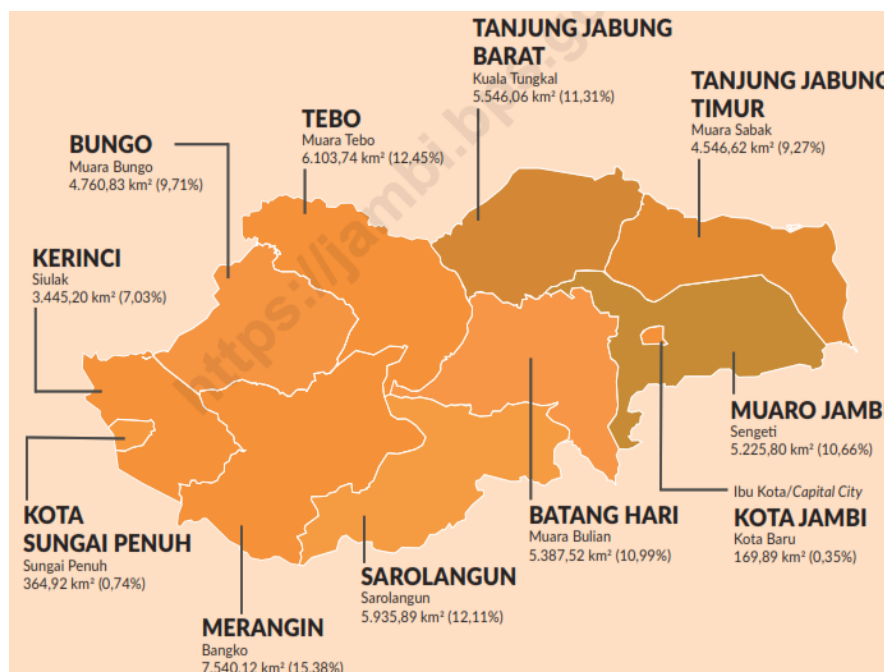
1. Merupakan salah satu provinsi secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Sultan Thaha, Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi Jambi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMTGT, dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.
2. Mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi asset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
3. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri yang merupakan potensipotensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

3.2. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi 49.026,58 km². Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.540,12 km² atau sebesar 15,38 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.103,74 Km² dan 5.936,89 km². Luas wilayah terkecil berada di Kota Jambi,

yaitu sebesar 169,89 km² atau sebesar 0,35 persen dari total area, sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi



Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka 2025, 2026

Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Di Provinsi Jambi saat ini terdapat 144 kecamatan, tidak terdapat penambahan dari tahun sebelumnya. Jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.585 yang terdiri dari 1.414 desa dan 171 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota.

3.2.1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Tahun 2025 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.768,48 (ribu jiwa) dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 76 jiwa/km dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3.781 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 279 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2022-2024 adalah sebesar 1,30 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sarolangun Jambi sebesar 1,46 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,66 persen.

3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan merupakan struktur yang telah dikondisikan sesuai amanat Presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Secara total, jumlah perangkat daerah terdiri dari 22 Dinas Daerah, 8 Badan Teknis, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Provinsi.

Nomenklatur Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas :
 1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi
 2. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
 4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
 7. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
 8. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
 9. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
- b. Sekretariat DPRD Provinsi
- c. Inspektorat Daerah Provinsi
- d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 4. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jambi
 5. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi
 6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jambi
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi
 9. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 10. Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
 11. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
 12. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
 13. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi
 15. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
 16. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi
 17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
 20. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 21. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 22. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
 4. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 6. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
 7. Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

3.4. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi per Desember 2025 ASN Pemerintah Provinsi Jambi berjumlah 12.667 orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh generasi X dengan rentang usia 41-55 tahun yaitu sebanyak 63,04% sementara generasi Z merupakan komposisi paling minor yaitu sebanyak 0,85%. Kondisi ini bermakna bahwa Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan perubahan mindset dan cultural set organisasi untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif. Terutama mengingat mayoritas penerima layanan yang merupakan generasi milenial dan generasi Z yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Provinsi Jambi yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU TRATEGIS RPJMD 2021-2026

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

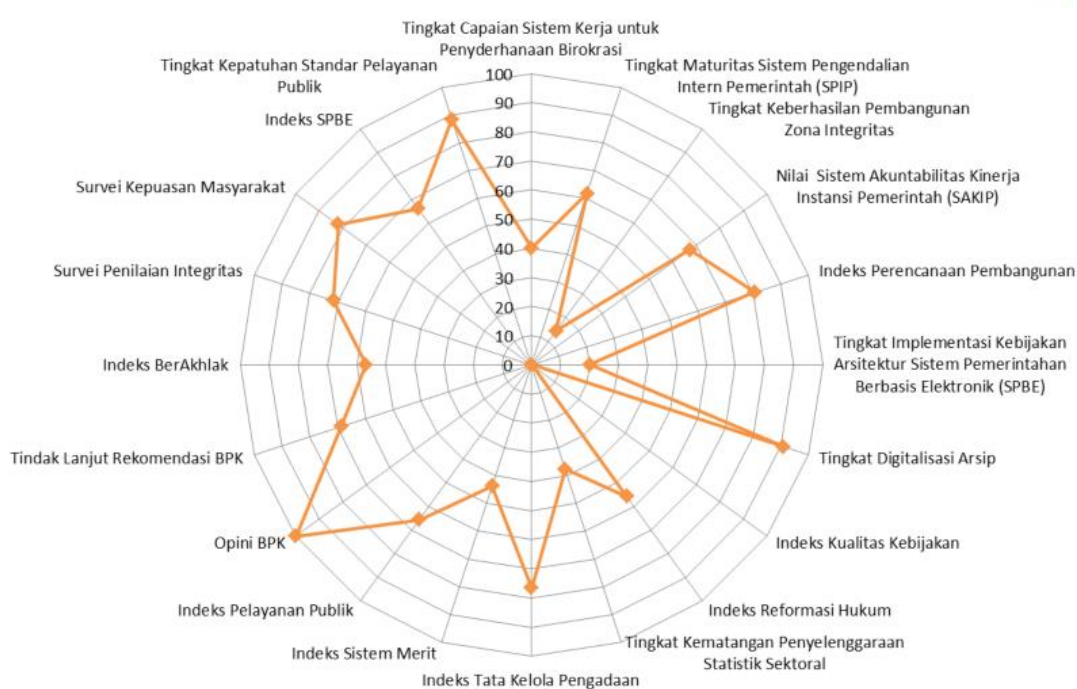
Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Gambar dibawah ini memperlihatkan beberapa indikator

permasalahan Capaian terakhir (2024) terhadap indikator-indikator yang menggambarkan penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari 20 indikator yang dihitung capaiannya dalam implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana pada gambar 4-1, separuhnya masih membutuhkan upaya yang keras untuk mengoptimalkan capaian. Adapun indikator yang masih dibawah 60 persen adalah tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), Indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, indeks sistem merit, dan indeks tata kelola pengadaan.

4.1.2. Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada



tahun 2020 telah menunjukkan pemulihan. Namun pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian.

Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

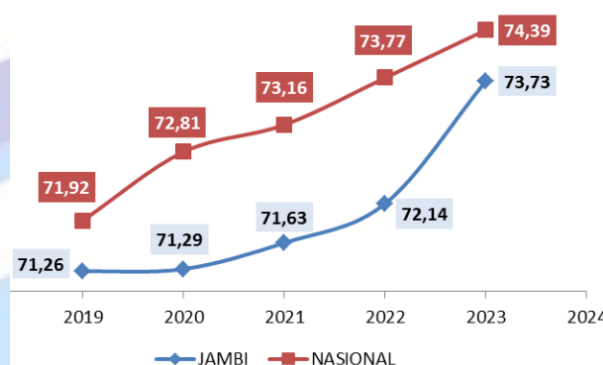
Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong bergeraknya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih

menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah. Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

4.1.3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

IPM Nasional dibanding IPM Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 dengan metode baru

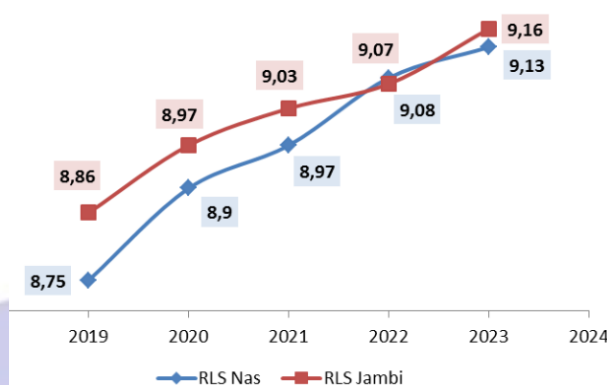


Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih dibawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se- Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2023 di Provinsi Jambi adalah 9,16 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau kelas 3 SMP. Capaian indikator ini lebih baik dari nasional hingga tahun 2021, di bawah nasional pada tahun 2022 dan kembali lebih baik dari nasional pada tahun 2023. Hal ini berarti perbaikan pada indikator ini kurang stabil.

Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan lapangan usaha informal. Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (false unemployment) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (unpaid labor) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil.

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2019-2023

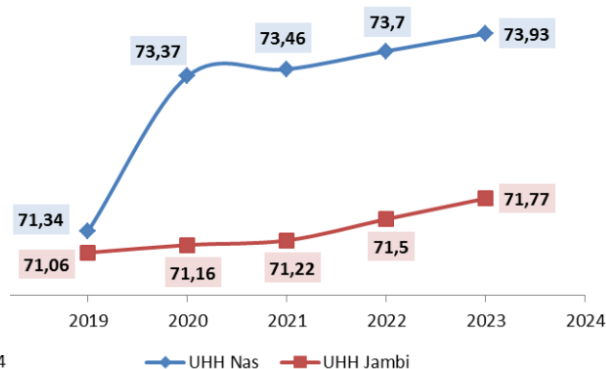


Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2019-2023 terus menunjukkan peningkatan dari 71,06 tahun pada 2019 meningkat menjadi 71,77 tahun pada 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 71-72 tahun.

Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2019-2023



Hingga kini, Provinsi Jambi masih menghadapi masalah kesehatan bagi masyarakatnya. Masih belum tercapainya target angka kematian ibu, bayi dan balita yang disebabkan rendahnya akses ke pelayanan kesehatan serta masih tingginya persentase merokok pada masyarakat umur lebih dari 15 tahun merupakan masalah-masalah kesehatan yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

4.1.4. Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/ kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%.

Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbulan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan. Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan

tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, serta memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan permukiman tangguh bencana,
- d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
- e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
- f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
- g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
- i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
- j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Daya Saing Ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 diharapkan bahwa pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026, yang merupakan tahap keempat atau terakhir dari RPJPD Provinsi Jambi periode ini telah dicapai kondisi sebagai berikut :

- a. Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah;
- b. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah
- c. Penguatan sektor industri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengarahkan rencana pengembangan struktur ruang agar terjadi konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, mulai dari bagian barat, tengah hingga bagian timur dan berporos pada ibukota provinsi (Kota Jambi).

Selain itu diarahkan pembangunan sarana-prasarananya sesuai dengan skala kegiatannya. Dalam peraturan tersebut juga dilakukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, diarahkan berbagai program yang bertujuan memantapkan fungsi kawasan, diantaranya : rehabilitasi dan konservasi lahan, pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung, pemeliharaan fungsi hidrologis pada kawasan yang memberikan fungsi perlindungan pada kawasan bawahannya hingga perwujudan kawasan konservasi baru dan kawasan rawan bencana. Pada kawasan budidaya, diarahkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perekonomian Provinsi Jambi hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan ada kecenderungan mulai bergeser pada sektor non pertanian, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian semakin tidak mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat, di sisi lain akses kepada pekerjaan formal di sektor-sektor non-pertanian juga terbatas terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan SDM sebagian besar masyarakat. Untuk itu, daya saing ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu strategis pembangunan Provinsi Jambi dengan fokus pada :

- a. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan.
- b. Penguatan sistem ekonomi kerakyatan juga perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya.
- c. Pembangunan infrastruktur pengangkutan komoditas hasil produksi rakyat maupun sektor lainnya (pertambangan).
- d. Pembangunan dan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung.
- e. Pembangunan kawasan strategis ekonomi industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian.
- f. Penguatan infrastruktur ekonomi digital.
- g. Penataan ruang dan tata guna tanah.
- h. Kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik

3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum baik dan merata

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan

pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi - institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada program-program yang dapat menekan angka kematian ibu, *stunting*, kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RPJMD 2025-2029

5.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Mengacu capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi selama periode sebelumnya, beberapa permasalahan pembangunan yang masih

dihadapi oleh Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

5.1.1 Volatilitas Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Akibat Fluktuasi Harga serta Produksi Komoditas Unggulan

Periode 2019–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berfluktuasi dan konsisten di bawah angka nasional, kecuali pada masa pandemi 2020 (–0,51% versus nasional –2,07%). Setelah kontraksi terdalam pada 2020, ekonomi Jambi pulih ke 3,71% (2021) dan mencapai puncak 5,12% (2022), kemudian melambat menjadi 4,67% (2023) dan 4,51% (2024), sedangkan LPE nasional stabil di kisaran 5%. Sementara itu, inflasi Jambi juga cenderung tidak stabil (1,4% pada tahun 2019, melonjak ke 6,35% pada tahun 2022, lalu turun ke 1,43% pada tahun 2024) dibandingkan nasional yang berkisar antara 1,57–5,51%

Perbedaan tren ini menandakan kerentanan Jambi terhadap guncangan eksternal dan dinamika domestik. Secara eksternal, ekonomi Jambi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas primer (sawit, karet, batu bara) di pasar internasional, serta perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Disrupsi rantai pasok global dan tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi turut mendorong volatilitas. Selain itu, tren digitalisasi dan adaptasi teknologi di sektor riil masih berlangsung lambat, sehingga potensi pertumbuhan nilai tambah belum optimal.

5.1.2 Belum Meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian IPM Provinsi Jambi masih di bawah beberapa provinsi lain seperti Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu serta masih di bawah capaian nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-

Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS Provinsi Jambi hingga tahun 2024 mencapai 9,26 tahun dan hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau kelas 3 SMP. Meskipun capaian RLS Provinsi Jambi lebih baik dari capaian RLS nasional, namun jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu, capaian RLS Provinsi Jambi masih berada di bawahnya. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan dalam bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam hal keterbatasan akses masyarakat Provinsi Jambi terhadap lapangan kerja formal yang umumnya menawarkan tingkat pendapatan lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Hingga tahun 2024, sebagian besar penduduk Provinsi Jambi masih bekerja di sektor informal, terutama di bidang pertanian dan jasa. Meskipun terjadi penurunan persentase pekerja informal dibandingkan tahun 2019, dominasi sektor ini masih cukup signifikan. Selain itu, masih terdapat fenomena pengangguran terselubung, yang ditunjukkan oleh tingginya proporsi tenaga kerja tidak dibayar pada usaha berskala mikro dan kecil milik keluarga atau kerabat, khususnya di sektor pertanian dan jasa.

Belum optimalnya kualitas SDM juga berkaitan dengan revitalisasi SMK. Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif, peralatan praktik, dan tenaga pengajar yang mampu mengoperasikan peralatan tersebut. Selain itu, jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja (kurangnya link and match) serta dominasi pembelajaran teori membuat lulusan kurang siap bersaing dan sulit terserap di dunia kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan di Provinsi Jambi berdampak langsung pada keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan usaha formal yang menawarkan penghasilan relatif tinggi, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh aspek pendukung kesejahteraan lain (termasuk layanan kesehatan). Beberapa indikator pembangunan daerah terkait kesehatan juga menunjukkan beberapa tantangan, dengan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jambi meningkat dari 71,16 tahun pada 2020 menjadi 72,04 tahun pada 2024, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 74,15 tahun dan capaian Provinsi Riau yang mencapai 74,41 tahun pada periode yang sama. Selain itu, angka kematian ibu (AKI) di Jambi tercatat 177 kematian per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) 17 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian anak usia 1–4 tahun sebesar 2,99 per 1.000 anak, yang menunjukkan masih tingginya risiko kesehatan ibu dan anak akibat rendahnya akses ke fasilitas kesehatan berkualitas.

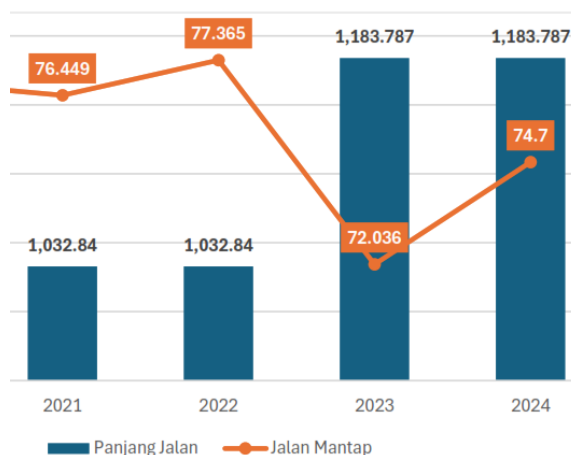
Di samping itu, prevalensi perilaku merokok masyarakat Provinsi Jambi yang cukup tinggi juga memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Data Riskesdas dan BPS 2023 menunjukkan bahwa 28,67% penduduk usia 15 tahun ke atas di Jambi merokok setiap hari, bahkan rata-rata perokok menghabiskan 128,17 batang rokok per minggu. Kebiasaan ini meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular dan kanker, sehingga menambah beban sistem kesehatan dan memperpanjang kesenjangan kualitas SDM.

5.1.3 Kesenjangan Layanan Dasar dan Infrastruktur

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah menunjukan pemulihan. Namun pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial

yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian.

Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu.



Keterbatasan akses jalan dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur fisik dan sosial tetap menjadi elemen vital yang menentukan kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya di daerah yang berbasis sumber daya alam namun kurang didukung fasilitas penunjang. Kurangnya pendanaan dan lemahnya tata kelola berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, yang pada gilirannya menahan potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi jalan di Provinsi Jambi hingga saat ini masih menunjukkan kualitas yang belum optimal, terutama pada ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten yang menghubungkan wilayah produksi dengan pusat distribusi. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat seperti berlubang, permukaan bergelombang, hingga kerusakan struktur akibat genangan air. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di koridor-koridor logistik utama, mencerminkan permasalahan struktural dalam pemeliharaan infrastruktur transportasi.

Ketidakmampuan jalan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam kelancaran arus barang dan jasa, sekaligus menciptakan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat. Salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah tingginya intensitas curah hujan di wilayah Jambi yang tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Genangan air yang kerap terjadi mempercepat degradasi lapisan aspal dan pondasi jalan. Selain itu, beban kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas jalan turut memperparah kondisi fisik infrastruktur. Dalam beberapa kasus, keterlambatan perbaikan juga disebabkan oleh keterbatasan material konstruksi di lokasi proyek serta ketergantungan pada proses pengadaan yang lama, sehingga kerusakan terus memburuk sebelum ada penanganan.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan rendahnya kapasitas pelaksanaan teknis turut menjadi faktor penghambat perbaikan jalan secara menyeluruh. Anggaran infrastruktur yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan riil perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkala. Selain itu, distribusi alokasi dana cenderung terfokus pada proyek-proyek besar atau simbolik, sementara jalan-jalan penghubung desa dan sentra produksi perkebunan dibiarkan dalam kondisi rusak dalam jangka waktu yang lama. Kurangnya koordinasi antarpihak dalam pemeliharaan jalan juga menjadi faktor yang memperlambat respon terhadap kerusakan yang ada.

Dampak dari buruknya kondisi jalan sangat luas, mulai dari peningkatan biaya logistik dan keterlambatan distribusi hasil pertanian dan

perkebunan, hingga menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Bagi pelaku usaha, kerusakan jalan memperbesar biaya operasional dan mengurangi daya saing produk lokal di pasar nasional. Sementara bagi masyarakat umum, kondisi ini menurunkan kualitas hidup karena perjalanan menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan berisiko tinggi, terutama saat musim hujan. Akumulasi dari permasalahan ini dapat memperdalam ketimpangan pembangunan antarwilayah serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemic COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah.

Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. Akses air minum layak di Provinsi Jambi memang menunjukkan tren peningkatan, tetapi capaian 79,19% pada tahun 2022 masih jauh dari ideal dan memperlihatkan disparitas antarkabupaten/kota: Kota Jambi mencapai 95,30%, sedangkan Merangin hanya 51,26%. Demikian pula akses sanitasi layak, meski meningkat dari 77,82% (2020) menjadi 79,54% (2022), beberapa wilayah seperti Tanjung Jabung Timur hanya mencapai 69,75%. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga di daerah terpencil atau perdesaan belum menikmati layanan dasar yang memadai.

Permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan jaringan distribusi

air bersih karena terdapat banyak desa belum terkoneksi dengan sistem perpipaan PAM dan mengandalkan sumber air permukaan atau sumur dangkal yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, kapasitas instalasi pengolahan air minum di PDAM regional belum mencukupi kebutuhan, sementara dana perbaikan dan penggantian pipa tua sering tertunda akibat prosedur pengadaan yang kompleks. Pada sektor sanitasi, rendahnya budaya penggunaan jamban sehat dan kurangnya fasilitas pengelolaan limbah domestik (terutama sistem septik tank terpadu) memperburuk kualitas lingkungan permukiman.

Dampak keterbatasan ini amat serius bagi kesehatan Masyarakat karena dapat menyebabkan tingginya insiden penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut di daerah berakses rendah berkorelasi dengan kurangnya air bersih dan sanitasi. Anak-anak di wilayah dengan akses sanitasi di bawah rata-rata provinsi juga menunjukkan angka stunting yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa sanitasi yang buruk turut memperburuk status gizi. Selain itu, beban biaya untuk membeli air kemasan ataupun pengobatan penyakit menular menambah tekanan ekonomi rumah tangga miskin.

Kelemahan pada tata kelola dan partisipasi Masyarakat dapat menjadi penghambat dalam pemeliharaan berkelanjutan. Meskipun program seperti PAMSIMAS telah diimplementasikan di beberapa desa, evaluasi menunjukkan masih banyak kendala dalam perencanaan lokasi, pelibatan warga, serta pemeliharaan sarana setelah pembangunan. Akibatnya, beberapa instalasi air dan sanitasi baru tidak berfungsi optimal setelah masa garansi habis, sehingga perlahan kembali ke kondisi semula. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tanpa penataan kelembagaan dan sistem pengelolaan yang kuat, peningkatan indikator akses air minum dan sanitasi layak sulit dipertahankan.

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa rata-rata cakupan Puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional baru mencapai

50,24% pada tahun 2024. Sebaran tenaga kesehatan ini sangat timpang antarkabupaten/kota: di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, cakupannya masing-masing 100% dan 63,16%, sementara di kabupaten perbatasan seperti Merangin (29,63%), Tanjung Jabung Timur (29,41%), dan Sungai Penuh (27,27%) masih jauh di bawah standar. Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil, rendahnya insentif dan tunjangan, serta fasilitas penunjang yang belum memadai.

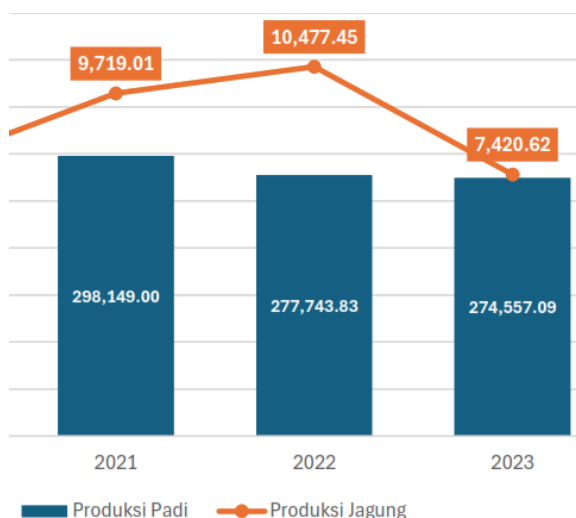
Ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, perawat, bidan, serta tenaga gizi dan sanitasi, sangat penting untuk kelancaran layanan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. WHO merekomendasikan rasio minimal 1 dokter per 1.000 penduduk dan 2,5 tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) per 1.000 penduduk untuk menjamin cakupan layanan yang optimal. Di Provinsi Jambi, kekurangan sebagian besar jenis tenaga kesehatan ini memaksa Puskesmas bekerja dengan staf yang multitugas, sehingga kualitas skrining, konseling gizi, imunisasi, dan penanganan gangguan kesehatan ibu-anak tertekan.

Kondisi ini jika terus berlanjut akan memberikan dampak yang nyata seperti angka kematian ibu dan bayi di kabupaten dengan cakupan Puskesmas rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah yang memenuhi standar staf. Penelitian juga menunjukkan bahwa kekurangan bidan dan perawat berkontribusi pada rendahnya cakupan kunjungan antenatal lengkap dan pemeriksaan pertumbuhan balita, sehingga risiko stunting dan malnutrisi anak dapat meningkat. Di samping itu, keterbatasan tenaga laboratorium dan sanitasi juga mempengaruhi deteksi dini penyakit seperti tuberculosis dan diare. Ketidakseimbangan distribusi SDM kesehatan ini semakin diperparah oleh beban kerja yang tinggi di Puskesmas wilayah terpencil, memicu kelelahan dan turnover pada tenaga kesehatan. Tanpa intervensi strategis—seperti skema insentif khusus, fasilitas hunian yang layak, dan program

pemagangan tenaga kesehatan—kabupaten/kota dengan cakupan sangat rendah akan terus mengalami kesulitan menjaga mutu layanan. Akibatnya, kesenjangan akses dan hasil kesehatan antardaerah di Provinsi Jambi berpotensi melebar, menghambat capaian target pembangunan kesehatan daerah.

5.1.4 Penurunan Produktivitas Sektor Unggulan

Produksi tanaman padi di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan selama tahun 2018 – 2022, yang dimulai di tahun 2019 akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen, serta terjadi penurunan luas panen akibat alih fungsi lahan. Penurunan produksi juga terjadi pada tanaman jagung dan kedelai. Perlu kebijakan yang mendukung terwujudnya ke daulatan pangan melalui perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani, sehingga kerugian akibat bencana pertanian dapat diminimalisir.



Sektor perkebunan masih belum memperlihatkan kinerja yang baik pada tahun 2019 – 2023. Hal ini terlihat pada produksi komoditi unggulan perkebunan yang berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan dan hanya kinerja komoditas sawit yang cukup baik dibanding komoditi lainnya. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun

lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.

Pada sisi usaha yang dilihat dari aspek aset, omzet usaha, maupun penyerapan tenaga kerja, menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023. Puncak kinerja terjadi pada tahun 2021 yaitu pada nilai aset yang melonjak dari Rp2.542,066 miliar di 2020 menjadi Rp58.032,529 miliar diikuti oleh lonjakan omzet usaha dari Rp 4.354,751 miliar menjadi Rp 309.081,090 miliar. Peningkatan ini juga berdampak pada peningkatan tenaga kerja dari 101.972 orang di 2020 menjadi 289.569 orang pada 2021. Namun, setelah tahun 2021, nilai aset dan omzet usaha mengalami normalisasi. Pada tahun 2022 dan 2023, aset tercatat stabil di kisaran Rp 3.394 – 3.560 miliar, sementara omzet usaha berada di angka Rp 39.311 – 39.405 miliar.

Sementara itu, jumlah tenaga kerja terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan konsisten hingga mencapai 373.659 orang di tahun 2023. Masih belum optimalnya kesinambungan pertumbuhan aset dan omzet usaha setelah tahun 2021 serta perlunya penguatan ketahanan ketenagakerjaan, menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah yang harus diatasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja di Provinsi Jambi.

Perkembangan produksi perikanan tahun 2019–2022 menunjukkan kecenderungan menurun. Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 53.029 ton dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 52.686 ton. Kemudian produksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 sebesar 55.892 ton, namun kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 54.859 ton. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam, terutama cuaca ekstrem yang melanda perairan laut, sehingga menyebabkan ketersediaan ikan yang ada di perairan laut semakin berkurang.

Demikian juga dengan produksi perikanan tangkap, perkembangan produksi perikanan budidaya pada periode 2019-2022 mengalami

penurunan, di mana pada tahun 2020 sebanyak 52.067 ton menjadi 49.430 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sehingga menyebabkan kematian ikan menjadi tinggi akibat aktivitas tersebut. Kualitas air Sungai Batanghari yang turut tercemar mengakibatkan tingginya tingkat kematian ikan hingga 40 persen.

5.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah dan Pendapatan

Salah satu permasalahan strategis yang dihadapi Provinsi Jambi saat ini adalah ketimpangan antarwilayah dan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini tercermin dari data Gini Ratio Provinsi Jambi yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif dan belum stabil. Pada tahun 2020, nilai Gini Ratio Provinsi Jambi berada pada angka 0,316, kemudian sedikit menurun ke 0,315 di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, ketimpangan meningkat tajam hingga 0,335 dan kembali naik menjadi 0,343 di tahun 2023. Pada 2024, nilai tersebut menurun ke 0,315. Meskipun posisi terakhir menunjukkan penurunan, tren fluktuatif ini mencerminkan kondisi ketimpangan yang masih belum stabil dan berpotensi menjadi hambatan dalam pencapaian kesejahteraan yang merata di wilayah Provinsi Jambi.

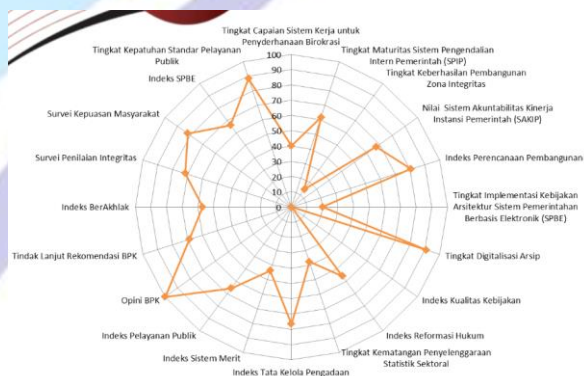
Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga di Sumatera, angka Gini Ratio Provinsi Jambi relatif lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Selatan (0,331 di 2024) namun lebih tinggi dari Provinsi Riau (0,306 di 2024). Sementara Provinsi Bengkulu justru menunjukkan tren peningkatan ketimpangan dari 0,315 pada tahun 2022 menjadi 0,343 di tahun 2024. Secara nasional, Gini Ratio berada pada kisaran 0,381 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Jambi masih berada di bawah angka nasional, kondisi ketimpangan yang berfluktuasi ini perlu menjadi perhatian, terutama karena menunjukkan adanya potensi ketimpangan antarwilayah maupun antar kelompok pendapatan di dalam daerah.

Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam aspek pendapatan antarpenduduk, tetapi juga antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Provinsi Jambi. Berdasarkan daerah tinggal, Gini Ratio tahun 2024 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,353 dan 0,279. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan infrastruktur ekonomi yang lebih baik cenderung menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang minim akses dan fasilitas dasar. Hal ini diperkuat dengan ketimpangan kontribusi ekonomi antarwilayah di Provinsi Jambi yang masih didominasi oleh sektor-sektor primer seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di wilayah tertentu.

Permasalahan ketimpangan ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Tanpa intervensi yang efektif, ketimpangan pendapatan dan antarwilayah berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan di wilayah tertinggal, kesenjangan akses layanan dasar, serta ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu merumuskan kebijakan yang bersifat afirmatif dan berbasis wilayah, mendorong pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik di seluruh wilayah provinsi.

5.1.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari 20 indikator yang dihitung capaiannya dalam implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2024 separuhnya masih membutuhkan upaya yang keras untuk mengoptimalkan capaian.



Adapun indikator yang masih dibawah 60 persen adalah tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), Indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, indeks sistem merit, dan indeks berakhlak. Untuk itu kedepan pencapaian indikator-indikator ini harus menjadi perhatian, disamping terus meningkatkan capaian indikator lainnya.

Berdasarkan hasil capaian penerapan sistem merit, diperoleh skor total sebesar 253 dari target ideal 350, dengan deviasi sebesar -97. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus untuk ditingkatkan, agar sistem merit dapat berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Aspek dengan deviasi tertinggi terdapat pada Pengembangan Karir, dengan skor capaian 37,5 dari target 105, sehingga deviasinya mencapai -67,6. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya efektivitas program pengembangan karir pegawai, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kegiatan pengembangan kompetensi. Selain itu, aspek Promosi dan Mutasi juga menunjukkan deviasi sebesar -15, yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan mekanisme seleksi, mutasi, dan promosi berbasis kompetensi dan kinerja.

Aspek Manajemen Kinerja tercatat memiliki deviasi -10, meskipun skornya telah mencapai 60 dari target 70. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan telah mencapai target sepenuhnya dengan deviasi 0, menandakan pengelolaan di kedua aspek ini sudah sesuai standar yang ditetapkan. Adapun aspek Sistem Informasi masih mencatat deviasi -6, yang perlu ditingkatkan khususnya dalam hal penguatan sistem informasi kepegawaian yang mendukung proses manajemen ASN secara digital, akurat, dan terintegrasi.

5.1.7 Degradasi Lingkungan

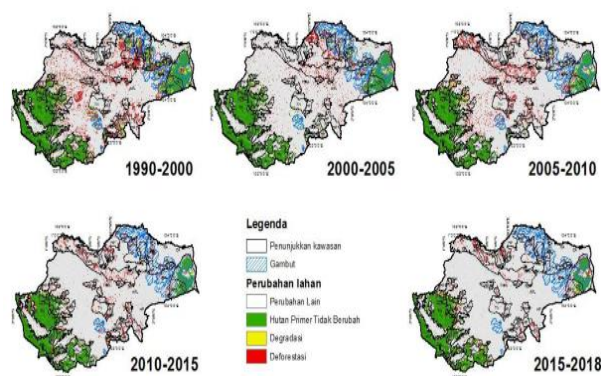
Provinsi Jambi sudah mengalami kehilangan air baik di bagian Jambi sebelah barat (dataran lebih tinggi) dan di bagian Jambi sebelah timur (dataran lebih rendah). Gambaran kehilangan air ini menunjukkan bahwa daerah Timur Jambi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan sebagian Kabupaten Batanghari mengalami kehilangan air terbesar (secara kumulatif berkisar antara 2.356-2.687 Km³). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kehilangan air di daerah ini tidak berhubungan dengan pola curah hujan yang terjadi pada wilayah tersebut. Maka disimpulkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi (dugaan : antropogenik) – wilayah tersebut didominasi oleh lahan gambut dengan aktivitas perkebunan yang terbentuk pada wilayah tersebut seperti drainase berlebih mendorong perubahan total perubahan simpanan air yang tidak terkait dengan curah hujan. Hal ini didukung dengan pola tahunan defisit simpanan air yang tidak menunjukkan pola khas, tetapi defisit terbesar terjadi pada tahun 2014 diikuti tahun 2019, yang mana pada tahun tersebut adalah tahun-tahun yang berkaitan dengan ElNino.

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan kualitas air. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di Provinsi Jambi terhadap sungai lintas kabupaten/kota maupun sungai lintas provinsi menunjukkan adanya bahan pencemar dari berbagai aktivitas yang mengalir kedalam aliran 7 (tujuh) sungai di

wilayah Provinsi Jambi yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan jenisnya, diketahui bahwa aktivitas pertanian, pertambangan dan industri pengolahan (salah satunya adalah pabrik CPO) dan domestik (rumah tangga) menjadi sumber pencemaran kualitas air sungai-sungai tersebut. Kondisi ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (water catchment area) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Provinsi Jambi juga relatif masih rendah.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kepadatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.



Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, di mana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagai intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan merupakan tahun akhir periode Jambi MANTAP yang bermakna perkembangan pembangunan berada ditengah visi misi RPJMD menuju pencapaian target di akhir tahun RPJMD 2026. Berbagai macam strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran terutama pada pelaksanaan program/kegiatan benar-benar selektif dilakukan.

Mengusung visi Provinsi Jambi yang tetap konsisten dalam mewujudkan 'Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT'. Inovasi dan kolaborasi menjadi metode yang esensial dalam penyelenggaraan pembangunan di tengah keterbatasan yang dihadapi selama tahun 2025.

Secara konsep, Jambi MANTAP memiliki makna :

- | | |
|--------------------------|---|
| Jambi Maju | : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman. |
| Jambi Aman | : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. |
| Jambi Nyaman | : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja. |
| Jambi Tertib | : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat. |
| Jambi Amanah | : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural. |
| Jambi Profesional | : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab. |

Secara umum, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki tiga misi. Lebih rinci berdasarkan urusan sebagai berikut :

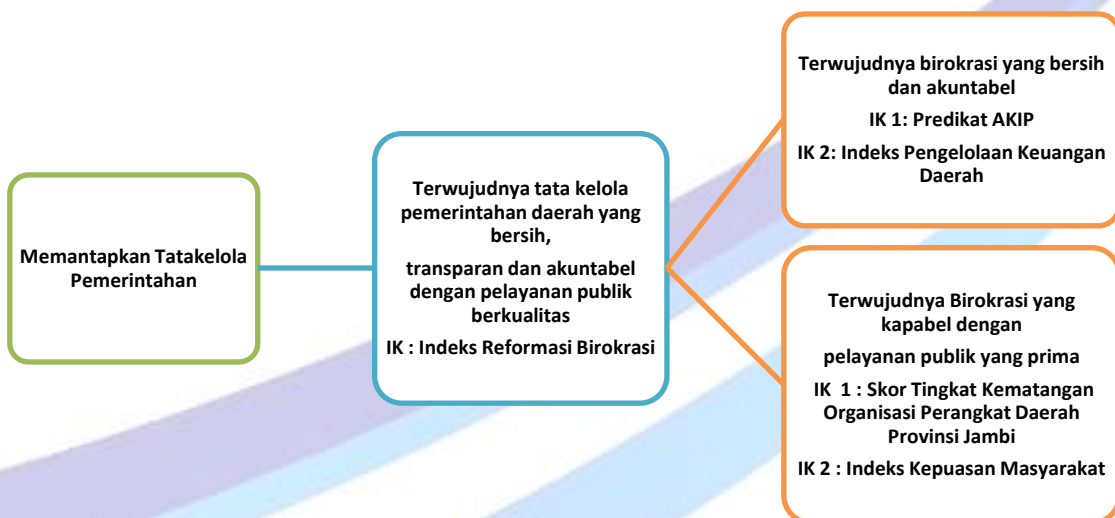
Misi 1 memuat kondisi : **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

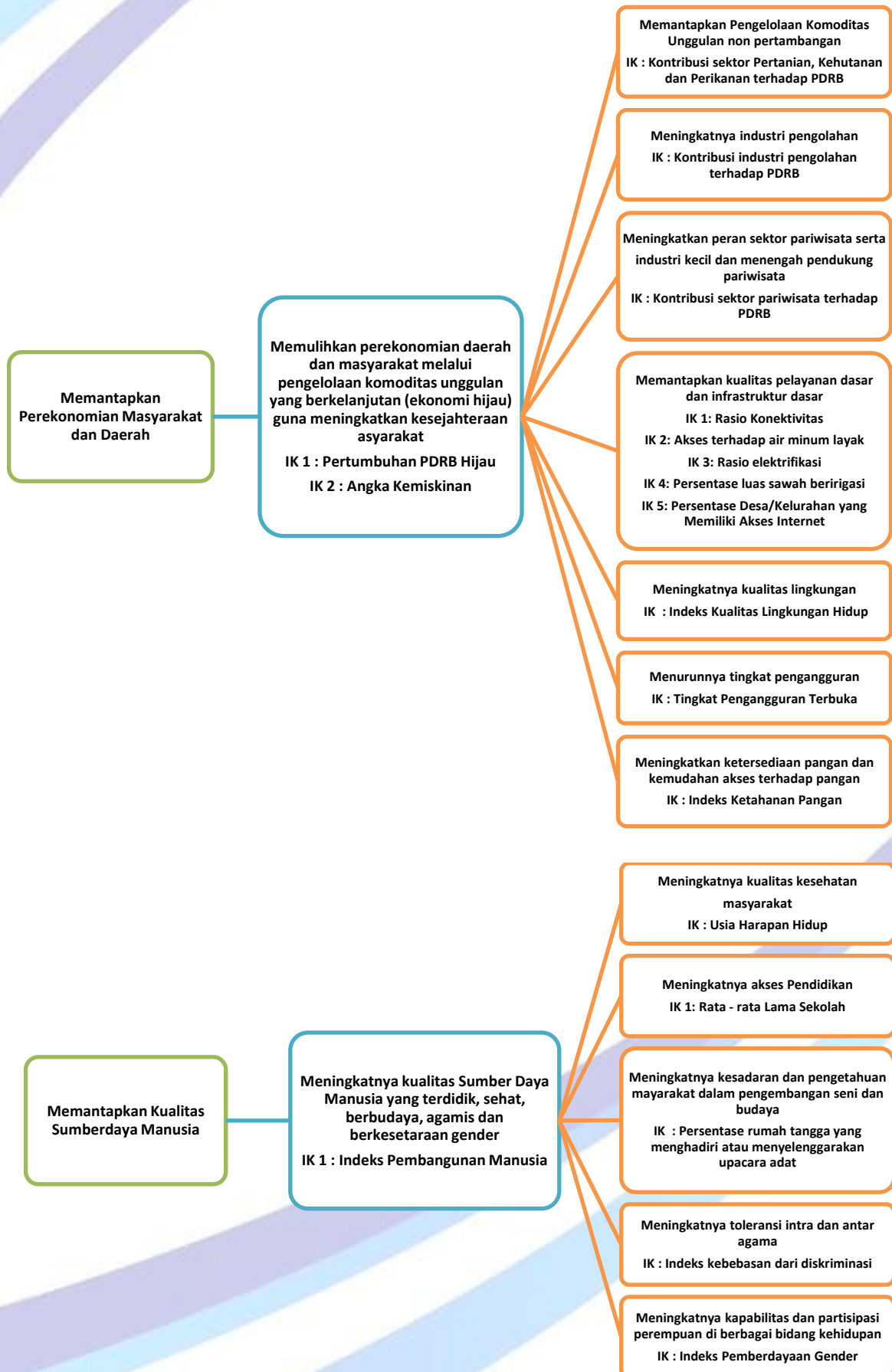
Misi 2 memuat kondisi **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Misi 3 berkaitan dengan kondisi **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender. Selanjutnya, ketiga misi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) indikator, 12 (dua belas) sasaran strategis, dan 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan digambarkan pada logic kinerja utama sebagai kinerja berikut :

Gambar 2.1. Logika Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi 2021-2026





Dari beberapa indikator tujuan maupun sasaran maka telah ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sekaligus ditetapkan menjadi perjanjian kinerja Tahun 2025 sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

II. Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029

Dalam menjembatani pelaksanaan kinerja RPJMD tahun 2025, terdapat penetapan RPJMD baru yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi MANTAP : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Berdaya Saing : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Guna menjabarkan visi tersebut, maka telah ditetapkan misi, tujuan, dan sasaran serta target jangka menengah RPJMD 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif.	Indeks Reformasi Birokrasi			BB (78,88)	BB (79,00)	BB (79,5)	A (80,01)	A (81,0)	A (82,0)	A (83,0)
		Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital	Nilai AKIP	B (68,42)	B (69,2)	BB (70,5)	BB (71,5)	BB (73,01)	BB (74,6)	BB (76,5)
			Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas SPI)	65,36	73,97	73,99	74,55	75,7	77	77,75
			Indeks SPBE	3,05	3,85	4	4,20	4,41	4,81	4,85
			Indeks Pelayanan Publik	3,67*	3,33	3,35	3,39	3,42	3,45	3,50
			Indeks Keterbukaan Informasi	79,3 (sedang)	79,5	80,01	80,08	81,3	82,9	82,25
				3,38	3,42	3,47	3,58	3,76	3,85	3,99
Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	0,5874	0,588	0,588	0,588	0,588	0,588	0,588
			Indeks Daya Saing Infrastruktur	2,38	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
		Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	42,3**	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			Tingkat inklusi keuangan provinsi	85*	85*	85*	85*	85*	85*	85*
			Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35	91,35
		Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi	Inflasi	1,43	3,1-3,7	3,0-3,7	2,9-3,7	2,5-3,7	1,6-3,7	1,5-3,5
			Rasio kapasitas fiskal daerah	1,542	1,550	1,625	1,657	1,691	1,725	1,795
			Pertumbuhan Ekonomi	(rendah)	4,8-5,2	4,80 -5,40	4,95 - 5,50	5,10 - 5,6	6,25-7,0	5,25-5,50
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,51	4,274,38	4,20-4,35	3,894,31	3,554,20	2,784,07	2,65 -
			Indeks Ketahanan Pangan	4,48		76,94				4,00
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	74,94	75,10	5,05	77,5	78,5	79,50	80,50
			PDRB Perkapita (juta rupiah perkapita per tahun)	5,55	5,50	96,53	4,83	4,75	4,50	4,32
		Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	1,10	1,21	1,22	1,23	1,24	1,26	1,27
			Distribusi PDRB sektor tersier	35,28	35,29	35,30	35,34	35,40	35,45	35,5
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	9,77	9,7810,1	9,8 -10,1	9,85 10,1	9,9 -10,1	9,9910,1	9,9910,1
			Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan	4,25	5,5	5,60	6,00	7,01	8,10	8,10
		Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi	Indeks Inovasi Daerah	58,59	58,75	58,89	59	59,25	60,1	61
Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Indeks Ekonomi Hijau			57,92**	61,39	63,65	65,54	66,46	68,55	68,60
		Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,1	6,3-6,8	6,25 -6,76	5,9 - 6,5	4,98-5,75	3,66-4,66	3,65-4,63
		Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Rasio Gini	0,321	0,337-0,341	0,330-0,337	0,318-0,325	0,314-0,318	0,311-0,315	0,311-0,315
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,15*	73,71	73,92	74,13	74,34	74,56	74,77

			Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	77,27*	78,5	80,76	83,58	86,14	86,55	88,70
	Indeks Ekonomi Biru			14,03*	15,26	15,35	16,26	17,27	18,29	19,01
		Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Distribusi sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%)	2,16	2,16	2,17	2,175	2,18	2,19	2,2
			Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari	55,63	56,0	57,52	59,48	60,45	62,37	64,25
			Persentase Penduduk miskin ektrimdi wilayah Pesisir (%)	4,19	4,05	3,84	3,50	3,16	2,81	2,46
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.	Indeks Modal Manusia			0,54*	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,06	74,14	74,25	74,50	74,94	75,18	75,45
			Prevalensi Stunting	13,5	11,9	11,5	11	10,25	9,3	9,1
		Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,9	9,389,4	9,5	9,60	9,76	9,86-9,89	9,93
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,92*	60,1560,23	60,73-60,85	61,29-61,44	61,83-62,02	62,38-62,6	62,7-63,0
			Indeks Ketimpangan Gender	0,528	0,514	0,504	0,489	0,469	0,467	0,465

III. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Kinerja Utama yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jambi. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdiri atas 2 (dua) penetapan yakni berdasarkan RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	5,2%
		Tingkat Kemiskinan	6,8%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54,2
		Akses terhadap Air Minum Layak	87%

		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,15
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	5,1jt ton CO ₂ eq
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	74,5
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	73,56
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	0,58

III. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	79
2.	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,42
3.	Terwujudnya Transformasi digital di Provinsi	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	50,80
4.	Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38%
		Indeks Ketahanan Pangan	75,10
5.	Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi	Indeks Inovasi Daerah	58,75
6.	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,8%
7.	Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial	Indeks Ekonomi Hijau	61,39
		Indeks Ekonomi Biru	15,26
8.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,71

	dan Berwawasan Lingkungan	Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	78,5
9.	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas,	Indeks Modal Manusia	0,56

III. Rencana Anggaran Tahun 2025

Sesuai perubahan yang terjadi dalam RKPD Provinsi Jambi, perubahan dilakukan pula terhadap rencana pendapatan dan anggaran belanja daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. Dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Jambi menunjukkan belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama sebesar Rp. 1.976.950.866.356,86,- bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 2.2. Rencana Belanja Program/Kegiatan Utama
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025

Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.976.950.866.356,86	1.500.686.451.013,93	75,91%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2025, 2026

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Povinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereviu kinerja organisasi pemerintah.

3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 Periode RPJMD 2021-2026

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja	Kode Warna
1.	91 ≥100	Sangat tinggi	
2.	76 s.d. 90,99	Tinggi	
3.	66 s.d. 75,99	Sedang	
4.	51 s.d. 65,99	Rendah	
5.	s.d. 50,99	Sangat rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2025.

Dalam analisis kinerja pada Bab ini akan dijelaskan mengenai 2 (dua) capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan di awal tahun sebagai bagian dari RPJMD 2021-2026 (masa transisi) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bagian dari RPJMD 2025-2029. Selain itu terdapat beberapa Indikator Kinerja pada PK 2025 (RPJMD 2021-2026) yang masih digunakan pada PK 2025 (RPJMD 2025-2029) dan capaian kinerjanya akan dijelaskan dalam analisis capaian PK 2025 (2021-2026).

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2025 merujuk pada RPJMD 2021-2026 tercermin dari capaian 8 Tujuan/Sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan capaian RPJMD 2025-2029 dicerminkan pada 9 (sembilan) Tujuan/Sasaran dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

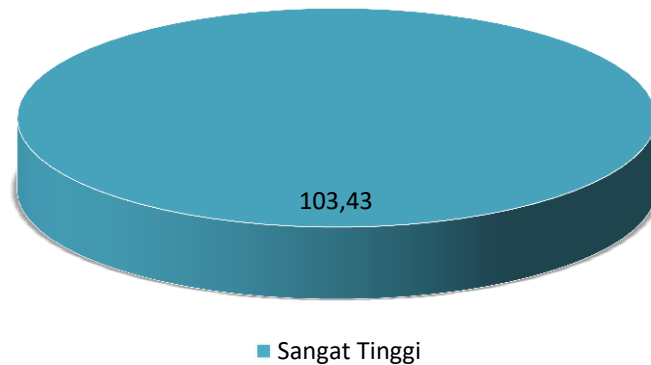
Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2025 dan secara keseluruhan capaian RPJMD di Tahun 2025 memperoleh persentase capaian “sangat tinggi” diatas 100%. Artinya, seluruh indikator kinerja memperoleh capaian kinerja diatas 91% dengan kategori sangat tinggi. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
(Berdasarkan RPJMD 2021-2026)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100%
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	5,2%	4,94%	95%
		Tingkat Kemiskinan	6,8%	6,89%	98,69%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54,2	63,85	117,8
		Akses terhadap Air Minum Layak	87%	82,46%	94,78
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,15	75,05	102,60
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	5,1jt ton CO ₂ eq	5,1 ton CO ₂ eq (2024)	100
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38%	4,08	107,35
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	74,5	76,16	102,23
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	73,56	75,13	102,13
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	0,58	0,528	91,03

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2025 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Periode RPJMD 2021-2026



Dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 8 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel di atas, maka seluruh indikator capaian sebesar >91% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi dengan rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar **103,43**. Dengan demikian kinerja tahun 2025 sebagai masa transisi sebagai penutup RPJMD masuk dalam kategori berhasil mencapai kinerja maksimal.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas

IK ; INDEKS REFORMASI BIROKRASI



Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025

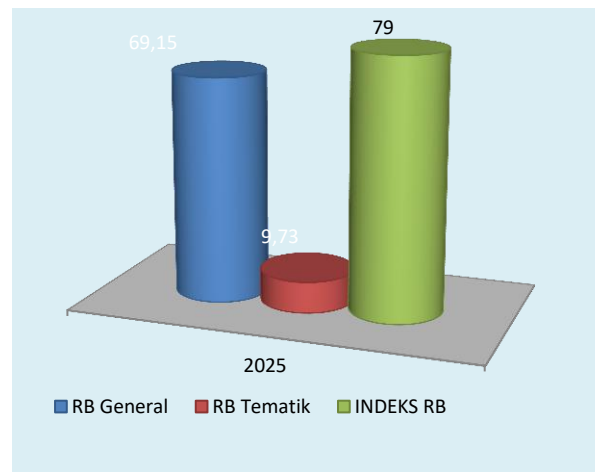
Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2021)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	BB	100	BB	B
* Diperoleh melalui Capaian Indikator RB General dan RB Tematik								

Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai komponen pendukung yang turut memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian secara umum. Sebagaimana hasil evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2025 terdapat berbagai variabel pendukung diantaranya dilihat dari capaian RB General dan RB Tematik.



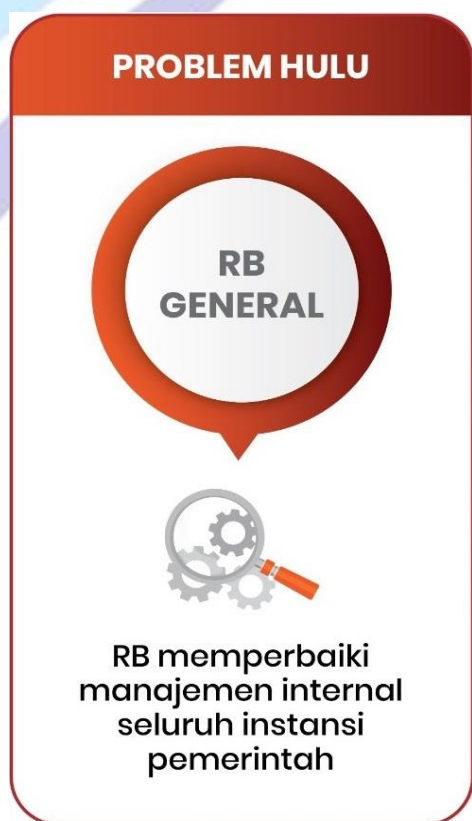
Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029.

Gambar 3.2. Capaian RB General dan RB Tematik



Sumber: Kemenpan RB Data hasil Indeks RB 2026

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebesar **79,00** dengan kategori **BB** (Portal RB Maret 2026). Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima



Pelaksanaan evaluasi atas implementasi RB secara nasional mengalami perubahan kebijakan dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 9 tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi. Evaluasi RB tahun 2025 menitikberatkan pada kinerja berdampak sebagaimana tertera pada indikator RB General dan RB Tematik yang diukur berdasarkan capaian Komponen dan Sub Komponen pada setiap Indikator penilaian. Capaian indikator RB General dan RB Tematik Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

RB General

- Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

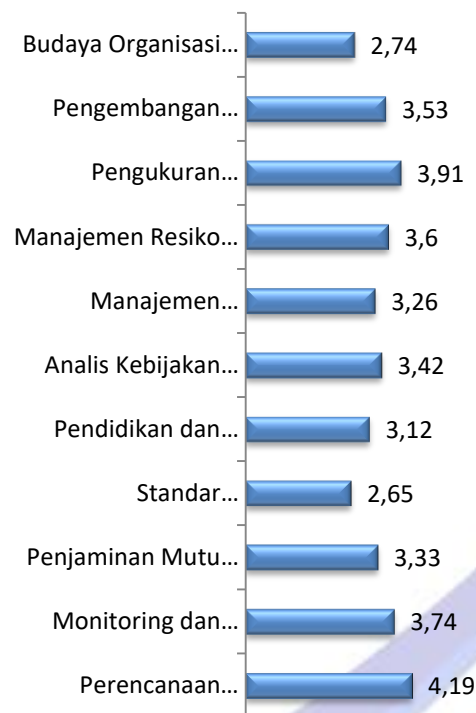
Guna mendorong peningkatan capaian sistem kerja, maka sejak tahun 2024 telah disusun tim kerja sebagai implementasi dari peraturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan struktur organisasi turut disupport oleh tingkat kematangan perangkat daerah. Dalam rangka

peningkatan penataan organisasi / kelembagaan dilakukan penataan struktur organisasi dan tata laksana yang terus disempurnakan setiap tahun guna mencapai struktur ideal yang diinginkan, pada tahun 2025 tingkat kematangan perangkat daerah mencapai indeks 39,40 dan masuk dalam kategori **Tinggi**.

Rata-rata nilai variabel pendukung pencapaian indeks kematangan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Diagram 3.1. Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah



Sumber : Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2025, 2026

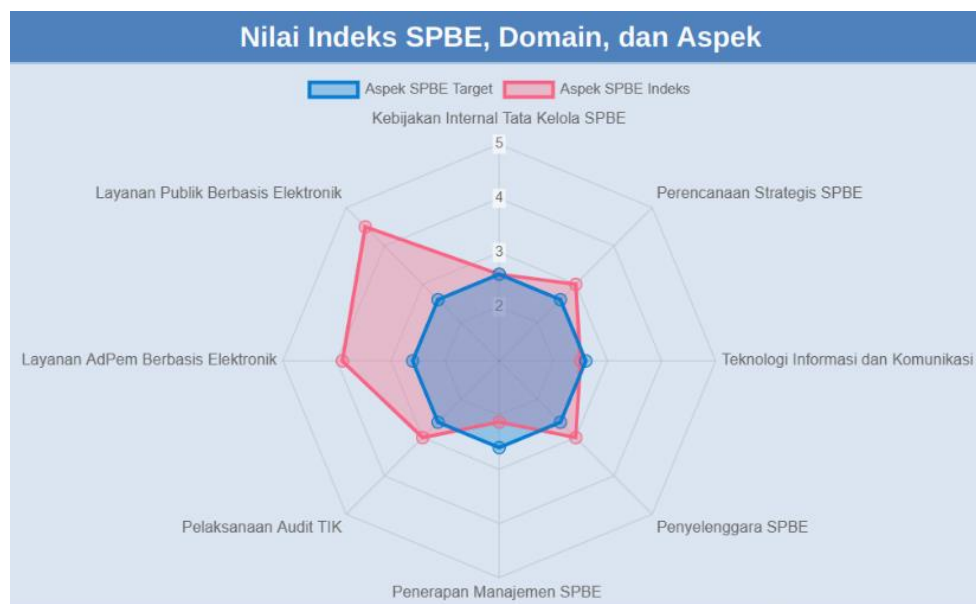
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa skor tertinggi berada pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusul pada variabel Pengukuran Kinerja. Capaian pada variabel ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari seluruh pihak terutama dengan penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja serta didukung oleh Pengukuran Kinerja secara berkala disusul oleh monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah.

b. Indeks SPBE

Indeks SPBE : Nilai Indeks 3,31

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024.

Gambar 3.3. Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Pemerintah Provinsi Jambi



Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Tabel 3.4. Capaian Indeks Domain SPBE Tahun 2025

Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	3,31
Domain Kebijakan SPBE	2,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,60
Domain Tata Kelola SPBE	2,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,13
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,14
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,90
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,50

- c. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada capaian tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE mendapat predikat “baik”, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA, dan pada tahun 2025 telah disiapkan Arsitektur SPBE to-be dalam SIA.

- d. Indeks Perencanaan Pembangunan (Indeks 76,55)

Upaya peningkatan indeks perencanaan pembangunan cukup baik, Catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya :

1. Perlu menambahkan isu strategis untuk mencapai konsistensi
2. Perlu menambahkan program prioritas daerah melengkapi kedalaman
3. Perlu dilakukan perbaikan dalam aspek:
 1. Penjelasan terhadap Masukan Pokok Pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan inklusif
 2. Menyusun Prioritas Daerah secara lebih spesifik dan tajam tidak disusun secara umum. Penjelasan yang umum dapat

mengaburkan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran prioritas dimaksud. 3. Optimalisasi sehingga seluruh indikator sasaran Prioritas Daerah dapat mendukung Prioritas Nasional

4. Tidak semua hasil evaluasi dan permasalahan diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan
5. Perlu dilakukan optimalisasi terhadap cascading perencanaan, mulai dari level outcome sampai level output. Pada level Prioritas Daerah, indikator Sasaran PD dengan indikator sasaran Program belum seluruhnya berkaitan.
6. Perlu dilakukan perbaikan terhadap penentuan indikator dalam mencapai prioritas daerah.
7. Indikator Sasaran Prioritas Nasional diharapkan dapat turun menjadi Indikator Sasaran Prioritas Daerah.
8. Perlu menambahkan aspek spasial atau penetapan lokus untuk program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilakukan
9. Perlu melakukan proses integrasi perencanaan lintas sektor untuk pencapaian prioritas daerah
10. Perlu menerjemahkan seluruh arah kebijakan dalam masing-masing Prioritas

Nasional (PN) menjadi Program yang akan dilakukan di daerah Program Unggulan : “• Perlu dilakukan perbaikan atas : 1. Penjelasan yang lebih mendalam atas setiap komponen dan sub-bab dalam dokumen penjelasan program unggulan 2. Penetapan program unggulan yang akan disasar dalam mendukung pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Secara prinsip programnya berkaitan terhadap pertumbuhan tinggi berkelanjutan, namun dari segi besaran dampak yang diberikan tidak begitu besar berdampak terhadap pertumbuhan tinggi berkelanjutan. 3. Perlu mencari dukungan sumber pendanaan Non-APBN dan Non-APBD untuk mendukung keberlanjutan program unggulan. Agar bisa mencari opsi dukungan dari CSR atau program untuk dilakukan oleh swasta.

e. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian Pemerintah Provinsi Jambi cukup baik dengan peningkatan nilai SAKIP 69,49 poin. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting dalam rangka perbaikan SAKIP kedepan diantaranya :

Perencanaan Kinerja

- Dokumen rancangan terakhir Renstra tahun 2025-2029 pada beberapa PD belum disampaikan melalui esr.menpan.go.id. Contohnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Perhubungan;
- Terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur (measurable), relevan, dan cukup. Contohnya pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sasaran strategis “Meningkatnya nilai penyelenggaraan penataan ruang” dengan

indikator “Meningkatnya hasil TURBINLAK serta kinerja fungsi dan manfaat pada penyelenggaraan penataan ruang”;

- Terdapat perbedaan target pada indikator yang digunakan pada RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan, yaitu pada indikator kinerja “Usia Harapan Hidup”;
- Penjenjangan kinerja PD belum mempertimbangkan logical framework dan critical success factor atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat. Contohnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Penjenjangan kinerja PD belum mengidentifikasi adanya crosscutting antar PD, instansi di luar Pemerintah Provinsi Jambi, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pencapaian kinerja organisasi. Contohnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penetapan rencana aksi pada sebagian PD belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.

Pengukuran Kinerja

- Pemerintah Provinsi Jambi dan PD belum menyusun IKU yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah terbaru;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah dilakukan menggunakan aplikasi PAKET dan E-SAKIP, namun pengisian data berkala pada beberapa PD belum dilakukan secara tepat waktu seperti pada pengisian realisasi rencana aksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Perkebunan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada rencana aksi belum merefleksikan pencapaian kinerja;
- Hasil pengukuran kinerja PD belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar

pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi, mutasi, dan rotasi.

Pelaporan Kinerja

Pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat Pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024 dan laporan kinerja pada tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Laporan kinerja tersebut juga telah diunggah pada laman Pemda dan masing-masing PD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Penyajian laporan kinerja PD tidak selaras menjawab PK Kepala Dinas dan belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang lengkap untuk setiap sasarannya. Contohnya pada laporan kinerja Dinas Sosial yang tidak menyajikan analisis atas pencapaian kinerja, analisis faktor penghambat pencapaian kinerja serta solusi untuk meningkatkan capaian kinerja untuk tahun selanjutnya;
- b. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup di indikator kinerja “Indeks kualitas lingkungan hidup” dengan target tahun 2025 adalah 73,71 sedangkan realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2024 adalah 73,97.

Evaluasi Kinerja

Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan evaluasi atas implementasi

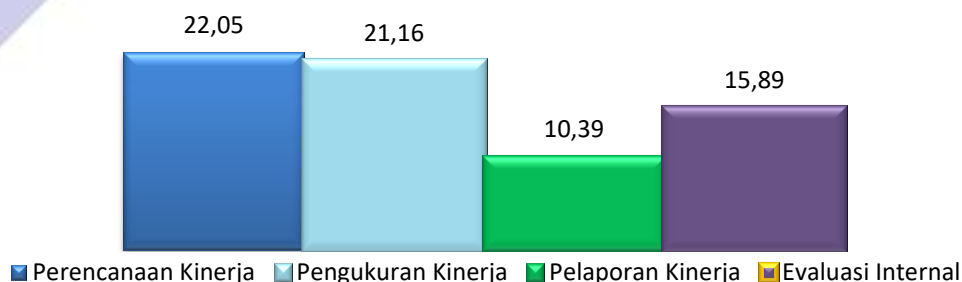
SAKIP di seluruh PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD. Contohnya pada LHE AKIP Internal Dinas Sosial yang belum bisa menangkap ketidakselarasan dokumen PK, IKU, dan Laporan Kinerja;
- b. Inspektorat belum diberikan akses kepada aplikasi PAKET sehingga Inspektorat belum bisa menangkap kepatuhan PD dalam menyampaikan pencapaian kinerja dalam aplikasi PAKET;
- c. Tindak lanjut PD atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat belum sepenuhnya menjawab atas seluruh catatan yang diberikan dalam laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- d. Belum ada kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Dari sisi perbaikan komponen akuntabilitas kinerja memberikan sumbangsih terhadap capaian kinerja yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2021 mendapatkan nilai 64,08, tahun 2022 mendapatkan nilai 66,38, tahun 2023 mendapat nilai 67,21, tahun 2024 mendapatkan nilai 68,42, dan pada tahun 2025 mendapatkan nilai 69,49. Bila dibandingkan dengan target periode RPJMD 2025-2029 tepatnya pada tahun 2025 adalah predikat B dengan target 69,2, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini mencapai **100,4%** atau masuk dalam kategori **tinggi**.

Peningkatan nilai terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian sebagaimana grafik berikut :

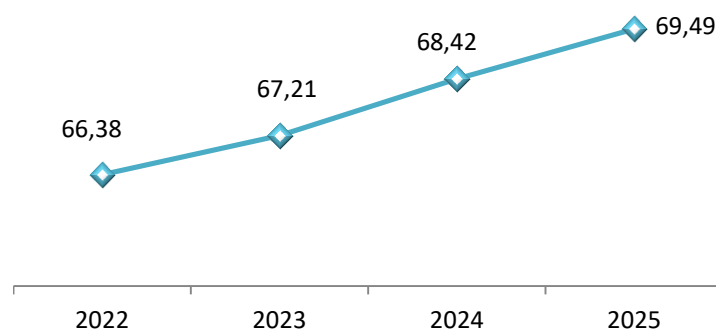
Diagram 3.2. Capaian Nilai SAKIP per komponen



Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP 2025, 2026

Perkembangan capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2022-2025



c. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengajukan 1 unit pembangunan zona integritas yakni Rumah Sakit Jiwa Daerah Kol. Inf. H. M. Syukur, namun belum lolos ke tahap wawancara.

Berdasarkan hasil evaluasi terkait zona integritas bahwa Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 0,43% dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM : 0 unit kerja Tahun 2024 Jumlah unit yang diusulkan: 0 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja.

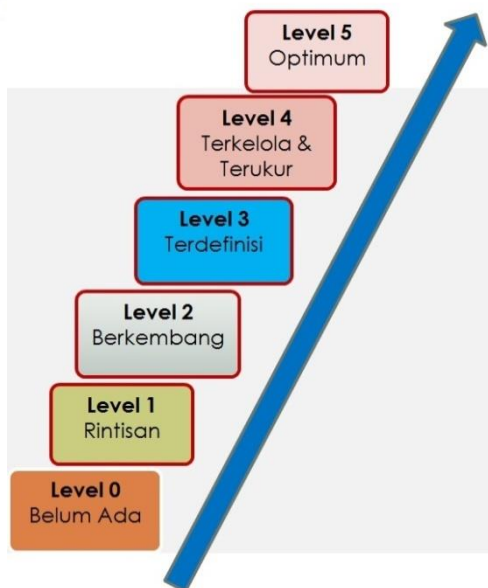
Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi telah mempersiapkan pengusulan hasil pembangunan unit kerja Zona Integritas kepada TPN.

d. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Tingkat maturitas SPIP berada pada angka 3,02. Dalam upaya peningkatan sistem pengendalian intern, Pemerintah Provinsi Jambi senantiasa mengupayakan berbagai langkah-langkah strategis. Namun dalam implementasinya terdapat catatan yang perlu segera ditindaklanjuti diantaranya :

1. Masih terdapat indikator kinerja baik pada tingkat Pemda/OPD, maupun program/ kegiatan/sub kegiatan yang belum cukup (belum menggambarkan hasil).

2. Struktur MR belum berjalan Optimal.
3. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi MR dan MRI belum ditetapkan sebagai indikator kinerja.



Oleh sebab itu pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat pilar utama pada OPD guna memastikan proses perencanaan, pengukuran, serta monitoring dan evaluasi kinerja berjalan dengan baik. Kedepan, akan dilakukan :

- a. Perbaikan pada indikator kinerja.
- b. Perbaikan pada target kinerja.
- c. Mencantumkan Manajemen Resiko sebagai indikator kinerja dan menganggarkan SDM maupun dana untuk pengelolaan risiko di tingkat Pemda dan OPD.
- d. Melakukan pembenahan terhadap struktur MR dan menjalankan fungsinya sesuai dengan pedoman MR.
- e. Melakukan monitoring, reviu dan evaluasi terhadap implementasi MR.
- f. Menyusun kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.

Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat upaya peningkatan jumlah unit yang siap

diajukan oleh Provinsi Jambi tahun 2026 serta tingkat Maturitas SPIP berada pada level 3.

- e. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan

Adanya aplikasi LAPOR! menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 25/2020 tentang Pelayanan Publik, masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada implementasi SPAN LAPOR Provinsi Jambi tahun 2025 cukup optimal, Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, yaitu: • Jumlah pengaduan yang diterima melalui aplikasi SP4N–LAPOR! relatif sedikit selama periode evaluasi. • Persentase tindak lanjut pengaduan masih di bawah 90% dari total laporan yang diterima. • Rata-rata waktu respon awal terhadap pengaduan masih melebihi 3 (tiga) hari kerja.

Sehubungan dengan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat, maka kedepan dilakukan upaya sebagai berikut: • Meningkatkan sosialisasi dan kampanye kanal SP4N–LAPOR! kepada pengguna layanan instansi serta mendorong digitalisasi pengaduan ke dalam aplikasi SP4N–LAPOR!. • Melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan pengaduan guna mendorong seluruh unit penerima aduan untuk menindaklanjuti seluruh pengaduan yang diterima. • Mempercepat proses respon awal dan tindak lanjut pengaduan agar sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

Atas catatan tersebut, pada tahun 2026 dilakukan menyelesaikan aduan memperbaiki kualitas tindak lanjut serta penyusunan rencana aksi dan sosialisasi guna percepatan tindak lanjut SPAN LAPOR.

- f. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)

Upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam

memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih membuahkan hasil nyata. Berdasarkan rilis terbaru Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK, skor total SPI Pemprov Jambi mengalami kenaikan dari 65,36 pada tahun 2024, dan menjadi 68,58 (portal RB) di tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat jajaran pemerintah daerah dalam memitigasi risiko korupsi dan meningkatkan transparansi layanan publik.

Salah satu poin paling impresif dalam laporan kali ini adalah lonjakan pada Indeks Internal. Angka persepsi integritas dari pegawai internal Pemerintah Provinsi Jambi melesat dari 69,65 (2024) menjadi 77,06 pada tahun 2025.

Capaian ini menempatkan Pemerintah Provinsi Jambi berada di atas Rata-Rata Nasional untuk Indeks Internal yang berada di angka 75,86. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja antikorupsi dan sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi semakin solid dan dipercaya oleh para pegawainya sendiri.

Kenaikan juga terjadi pada sisi penilaian masyarakat dan pemangku kepentingan (Indeks Eksternal). Tercatat, angka Indeks Eksternal meningkat dari 82,34 di tahun 2024 menjadi 87,61 pada tahun 2025. Dengan angka tersebut, kualitas integritas pelayanan publik Pemprov Jambi kini telah sejajar dengan Indeks Rata-Rata Nasional.

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan kejelasan informasi layanan dengan mengemas prosedur layanan secara jelas dan interaktif. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi yang memanfaatkan teknologi digital, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain itu, evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survey kepuasan layanan juga sangat penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat terwujud.

Selanjutnya, dalam upaya memudahkan masyarakat memahami prosedur layanan, Pemerintah Provinsi Jambi disarankan untuk melakukan pengemasan informasi yang lebih jelas dan interaktif. Hal ini dapat mencakup penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi terkait prosedur layanan. Evaluasi berkala terhadap prosedur pelaksanaan layanan juga perlu dilakukan melalui survei kepuasan, agar setiap masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan perbaikan yang konstruktif.

Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengakses layanan yang tersedia. Dalam aspek pencegahan gratifikasi, Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan sosialisasi mengenai aturan terkait gratifikasi dan larangan suap-menyuap. Sosialisasi ini perlu diikuti dengan mekanisme ujian untuk memastikan bahwa semua pegawai memahami dengan baik peraturan yang ada. Penegakan aturan harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam penegakan aturan tersebut.

Dengan meluncurkan ISO-37301, Pemerintah Provinsi Jambi dapat menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan sistem manajemen kepatuhan yang efektif. Lebih lanjut, untuk mencegah praktik gratifikasi dari pihak eksternal, penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengkomunikasikan aturan yang ada kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi dan melakukan survei untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang hal tersebut. Pemimpin juga harus menjadi role model dalam penegakan pengelolaan gratifikasi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat akan lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dalam hal pengadaan barang dan jasa,

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif. SOP ini mencakup seluruh proses dari tender hingga evaluasi dan pengelolaan kontrak. Pelatihan bagi staf mengenai SOP baru dan standar harga juga sangat penting untuk memastikan keseragaman dalam implementasi. Selain itu, mencari vendor yang berkualitas dan menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan membantu meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan edukasi terkait pengadaan barang dan jasa, serta melakukan due diligence terhadap vendor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa vendor yang terlibat dalam pengadaan tidak memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dengan membuka ruang pengadaan yang lebih luas dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dapat ditingkatkan. Dalam menghadapi potensi penyimpangan dalam pengadaan, Pemerintah Provinsi Jambi perlu menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Hal ini termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi vendor yang melanggar aturan. Pengembangan sistem aplikasi e-catalog atau e-procurement juga dapat memfasilitasi input data kebutuhan dari setiap divisi, sehingga pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hasil pengadaan dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Provinsi Jambi telah memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi adanya intervensi dalam proses pengadaan. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi harus dilakukan secara konsisten, dan kebijakan larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan perlu ditegakkan. Dengan meningkatkan integritas calon pimpinan dan melakukan deklarasi konflik kepentingan,

diharapkan pengambilan keputusan dalam pengadaan dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Dalam hal peneraan sanksi atau denda kepada pengguna layanan, sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur operasional yang jelas sangat diperlukan. Pengembangan aplikasi teknologi untuk menjalankan mekanisme denda secara elektronik juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan sanksi.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengguna layanan dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akhirnya, dalam aspek rekrutmen dan promosi pegawai, Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan sosialisasi mengenai peraturan yang ada terkait gratifikasi dan benturan kepentingan. Program kepemimpinan yang berfokus pada kepatuhan juga harus dijalankan, serta penerapan kaidah SNI-ISO 37001 dan SNI-ISO 37301 untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, diharapkan lingkungan kerja yang bersih dan profesional dapat tercipta.

g. Indeks Kualitas Kebijakan

Implementasi kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2025 memperoleh nilai 59,96 dengan kategori “cukup” dalam partisipasi pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan.

Oleh sebab itu, tahun 2026 dilakukan inisiasi langsung dengan LAN RI dalam pengukuran nasional IKK yang diselenggarakan oleh LAN.

h. Indeks Reformasi Hukum

Dari sisi pelaksanaan reformasi hukum mendapat apresiasi kategori baik dengan predikat B (cukup baik) dengan nilai 66,64, kendati demikian perlu adanya upaya yang lebih serius dalam konteks penerapannya pada tahun 2025.

i. Indeks Digitalisasi Arsip

Tingkat Digitalisasi Arsip : Nilai Indeks 93.58

Implementasi Digitalisasi Arsip telah terimplementasi dengan baik, namun perlu

upaya teknis sebagaimana catatan hasil evaluasi yang diberikan yakni :

1. Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan sesuai kriteria
2. Alih media arsip telah dilaksanakan sesuai kriteria
3. Belum seluruh arsip yang tercipta diberkaskan dalam aplikasi SRIKANDI
4. Belum terdapat sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pelatihan/sertifikasi.
5. Belum melaksanakan pameran virtual dalam JIKN

Untuk itu, pada tahun 2025 dan dilanjutkan pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi terus konsisten dalam melakukan berbagai hal guna peningkatan digitalisasi arsip diantaranya :

1. Pemberkasan seluruh arsip yang tercipta melalui SRIKANDI di seluruh unit pengolah.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pelatihan/sertifikasi.
3. Melaksanakan pameran virtual dalam JIKN.

Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi akan :

- a. Menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan kearsipan
- b. Melaksanakan alih media arsip sesuai yang telah ditetapkan.
- c. Menerapkan aplikasi SRIKANDI pada seluruh perangkat daerah dan melaksanakan seluruh proses bisnis aplikasi SRIKANDI termasuk pemberkasan arsip

- d. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau sertifikasi kompetensi.



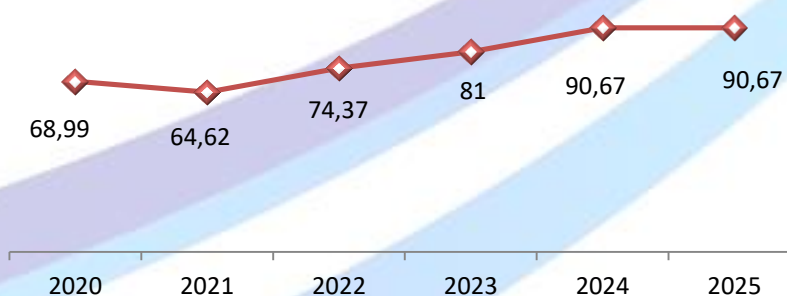
Penyerahan Hasil Evaluasi Kearsipan Bagi OPD
Oleh Wakil Gubernur Jambi

Dalam tata kelola kearsipan terdapat peningkatan hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 90,67.

Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pun memberikan nilai A (memuaskan) di peringkat ke-9 bagi pemerintah provinsi Jambi. Kepastian itu disampaikan ANRI pada penyerahan Sertifikat Akreditasi Kearsipan dan pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025.

Pengawasan kearsipan telah dilakukan terhadap 86 Kementerian/Lembaga, sepuluh Perguruan Tinggi Negeri, 38 Pemerintah Daerah Provinsi, dan verifikasi terhadap 508 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peringkat terbaik diraih D.I Yogyakarta. Berturut kedua dan ketiga diraih Jawa tengah dan Jawa Barat.

Grafik 3.2. Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, 2025, 2026

j. Indeks Pembangunan Statistik

Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi Jambi berada pada predikat Baik dengan Indeks 2,68. Namun demikian, Penerapan proses bisnis statistik pada aspek perencanaan data belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh Produsen Data. Oleh sebab itu kedepan perlu peningkatan kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang terdiri dari Pembina Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah, Walidata dan Produsen Data telah tertuang dalam Peraturan SDI Pemerintah Provinsi Jambi.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Walidata pada tahun 2026 akan dilakukan identifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari setiap dinas/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, Produsen Data di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi juga perlu memastikan akurasi data dan konsistensi statistik yang dihasilkan dengan melaksanakan tahapan pemeriksaan akurasi data dan konsistensi statistik sesuai dengan dokumen kebijakan/regulasi yang berlaku. Selanjutnya Perlu peningkatan aspek perencanaan data khususnya dalam pendefinisian kebutuhan statistik dengan melakukan penyusunan daftar data.

k. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Dalam kategori Tata Kelola Pengadaan memperoleh nilai baik dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 75,10 (baik) dan pada implementasi tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jambi terdapat catatan yang perlu dilakukan optimalisasi yakni :

- Paket selesai katalog elektronik kurang dari 50%
- Realisasi non e- Tendering/non e- Purchasing di bawah 50%
- Pencatatan e-Kontrak di bawah 50%
- Keterisian JF PPBJ masih jauh dari memenuhi 100% bahkan belum lebih dari 60%

Atas kelemahan tersebut, pada tahun 2025 dilakukan :

- Meningkatkan kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan paket katalog elektronik yang sudah direalisasikan
- Meningkatkan kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan paket nontender/non e-purchasing sesuai RUP
- Peningkatan kinerja pencatatan e-kontrak
- Memenuhi keterisian JF PPBJ melalui pengangkatan pertama, PPPK, dan/atau Perpindahan dari Jabatan Lain

l. Opini BPK

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kedua belas kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas

pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi.

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.

m. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

n. Indeks Sistem Merit

Dalam implementasi Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh nilai Indeks Sistem Merit sebesar 253. Namun demikian, perlu dilakukan upaya penyempurnaan, oleh sebab itu kedepan Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan langkah-langkah antara lain :

1. Menyusun SKJ secara lengkap (manajerial, sosiokultural, teknis) untuk seluruh jabatan;
2. Melakukan pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
3. Melakukan pemetaan talenta berdasarkan Permenpan 3/2020;
4. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun);
5. Melakukan pengisian Administrator dan Pengawas dengan menggunakan metode assessment;
6. Menyusun analisis permasalahan kinerja secara terstruktur dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

o. Indeks Ber-Akhlak memperoleh nilai 68,1 dengan katogori cukup sehat.

Capaian Indeks BerAkhlak Provinsi tahun 2025 berhasil memperoleh nilai 68,1. Capaian ini masuk kategori cukup sehat dan memperoleh capaian sama dengan rata-rata nasional sebesar 68,1. Pelaksanaan Survey ASN BerAkhlak pada tahun 2025 masih menggunakan capaian kinerja tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2024 Kedeputan Pelayanan Publik Kementerian PANRB RI tidak melakukan survey ASN BerAkhlak. Namun demikian, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan akan melakukan survey secara mandiri dengan menciptakan aplikasi survey berbasis digital yang dirumuskan bersama dengan para pakar untuk selanjutnya aplikasi ini yang bisa diakses oleh seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Capaian Indeks BerAkhlak mencakup unsur nilai dasar dan nilai sebagai berikut : Berorientasi Pelayanan : 69,0, Akuntabel : 75,0, Kompeten : 73,2, Harmonis 75,3, Loyal : 78,7, Adaptif : 70,7, dan Kolaboratif : 71,8.

p. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk

meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsur yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Diagram 3.3. IKM OPD Provinsi Jambi Tahun 2025



Pada tahun 2025, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah

guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel bawah. Berdasarkan tabel di bawah, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Baik” atau “B” dengan nilai rata-rata **88,324**.

Tabel 3.5. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2025

Unsur Pelayanan	2024	2025
U1: Persyaratan pelayanan	87,162	88,908
U2: Prosedur pelayanan	85,719	88,089
U3: Waktu pelayanan	83,995	86,375
U4: Biaya/tarif pelayanan	92,705	91,137
U5: Produk/hasil pelayanan	85,718	87,752
U6: Kemampuan petugas pelayanan	86,246	88,055
U7: Perilaku petugas pelayanan	86,884	88,759
U8: Kualitas Sarana dan Prasarana	83,638	84,639
U9: Mekanisme pengaduan pelayanan	90,581	91,204
Indeks Kepuasan Masyarakat	86,961	88,324
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2025, 2026		

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori baik namun cenderung menurun secara akumulasi. Unsur dengan nilai tertinggi adalah mekanisme pengaduan pelayanan dengan perolehan nilai 91,204 dan nilai terendah adalah pada unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dengan perolehan 84,639. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas kualitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga akan berdampak pada komitmen dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perlu juga upaya percepatan waktu pelayanan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya.

q. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 memperoleh Predikat A- (nilai : 4,03)

r. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna

peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan mendapatkan nilai dengan tingkat kepatuhan **tertinggi Zona Hijau** dengan raihan nilai 90,68 sebagaimana yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Gambar 3.4. Penerimaan Penghargaan atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia kepada Gubernur Jambi



Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia di tahun ini. Dari 38 provinsi yang dinilai Pelayanan Publiknya di tahun 2025, Pemprov Jambi berada pada peringkat Pertama dan mendapat opini terbaik. Atas prestasi tersebut, Gubernur Jambi diundang sebagai Penerima Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Adapun nilai yang diraih Pemerintah Provinsi Jambi mencapai 90,68. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Standar Kepatuhan Pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi mengalami peningkatan nilai dari tahun lalu yang mendapatkan nilai 85,41.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemprov Jambi berhasil meraih Opini Ombudsman RI dengan Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi sekaligus menempati peringkat 1 nasional kategori pemerintah provinsi.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap aparatur sipil negara (ASN) agar kualitas pelayanan publik

semakin meningkat. KEdepan, akan terus melakukan reviu dan evaluasi berkala dalam menata ASN agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, mentaati aturan, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan agenda penting yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi telah menjalankan RB Tematik dalam Pengentasan Kemiskinan, pada penerapannya terdapat beberapa catatan kiranya perlu mendapat perhatian, yakni :

1. Masih terdapat sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada.
2. Sebagian rencana aksi tematik yang disusun belum berfokus pada prioritas permasalahan utama/kritis.
3. Masih terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup.
4. Masih terdapat sasaran keberhasilan RB Tematik yang belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan intervensi aspek perbaikan tata kelola, antara lain perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
5. Belum seluruh rencana aksi memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.

Terkait catatan tersebut, maka pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan upaya fokus dalam :

- a. Penetapan sasaran yang menjawab permasalahan utama pada tema terkait.
- b. Menyusun Rencana aksi tematik yang juga berfokus pada prioritas permasalahan utama/kritis.
- c. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup mengukur sasaran keberhasilan RB Tematik.
- d. Memastikan Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari intervensi aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
- e. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan beberapa hal antara lain :

1. Secara berkala melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai dan melakukan survei kepada seluruh pegawai terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Selain itu, melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja;
3. Mendorong agen perubahan untuk meningkatkan kualitas rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, core values ASN BerAKHLAK, area perubahan dalam reformasi birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana RB Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan strategi perbaikan dalam internalisasi RB;

5. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan;
6. Membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga memudahkan dalam menganalisis peraturan/kebijakan yang mungkin saja tidak harmonis/sinkron dengan kebijakan lainnya;
7. Merevisi proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya mendukung proses kerja di Provinsi Jambi menjadi lebih efektif dan efisien;
8. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada;
9. Melakukan reviu dan menyempurnakan identifikasi resiko khususnya pada hal yang bersifat strategis sampai ke tingkat Perangkat Daerah;
10. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh Perangkat Daerah dan memastikan tindak lanjut dari SKM kepada seluruh layanan melakukan strategi teknis guna memberikan layanan sesuai harapan masyarakat;
11. Mengintegrasikan seluruh website Perangkat Daerah dalam website Pemerintah Provinsi Jambi guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait layanan;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan memastikan pemanfaatan aplikasi PAKET SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah guna mewujudkan manajemen kinerja yang baik dan konsisten;

Faktor Penghambat :

- a. Permasalahan utama dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Jambi meliputi lambatnya transformasi digital, kurangnya komitmen pimpinan, pola pikir birokrat yang belum berorientasi layanan, serta tumpang tindih aturan pusat-daerah.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi dan Langkah Strategis :

- a. Akselerasi Digitalisasi (SPBE) dengan mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- b. Peningkatan Integritas & Pengawasan dengan membangun lebih banyak Zona Integritas (WBK/WBBM) dan memaksimalkan Whistle Blowing System.
- c. Penyederhanaan Birokrasi dengan evaluasi tupoksi SKPD secara berkala dan penyederhanaan prosedur untuk memangkas birokrasi yang berbelit.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan berbasis kinerja bagi aparatur untuk mengubah pola pikir menjadi lebih melayani.
- e. Penguatan Komitmen Pimpinan guna memastikan pimpinan instansi memimpin langsung perubahan budaya kerja
- f. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal

berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.

- g. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- h. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Penataan Desa
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Pengelolaan Arsip
6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Program Penyelenggaraan Pengawasan
12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
13. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
14. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
15. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Danjasa
16. Program Kesejahteraan Rakyat
17. Program Perekonomian Dan pembangunan
18. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
19. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
20. Program Penataan Organisasi
21. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
22. Program Pencatatan Sipil
23. Program Pendaftaran Penduduk
24. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25. Program pengelolaan Profil Kependudukan
26. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat
27. Program Peningkatan kerjasama Desa
28. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
29. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
30. Program Kepegawaian Daerah
31. Program Pengembaan Sumberdaya Manusia
32. Program Pelayanan Penanaman Modal
33. Program Pelayanan Penghubung
34. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
35. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

SASARAN STRATEGIS 2 :

Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

IK : 1. PDRB HIJAU,
2. TINGKAT KEMISKINAN

Indikator makro terkait dengan keadaan sosial dan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, indikator ini merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Pertumbuhan PDRB Hijau Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Pertumbuhan PDRB Hijau	NA	5,04	4,6	5,2	4,94	95	5,3	NA (Tidak dapat dibandingkan)
* Didukung melalui Angka PDRB Konvensional dan Angka Depleksi Sumber Daya Alam								

Perekonomian Provinsi Jambi 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp349,66 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp185,58 triliun.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 8,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,75 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,03 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,35 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen (q-to-q). Dari

sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,27 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,05 persen.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2025 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedangkan dari sisi pengeluaran andil terbesar diberikan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa.

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2025 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,88 persen. Kemudian diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,77 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor sebesar 7,76 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,06 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,49 persen, Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,98 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 5,10 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontraksi adalah Konstruksi sebesar 4,14 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Sosial Wajib sebesar 2,62 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun

2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,49 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 13,79 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,57 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen.

Diagram 3.4. Pertumbuhan PDRB



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2025 TERHADAP TRIWULAN IV-2024 (Y-ON-Y)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 dibanding triwulan IV-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali pada lapangan usaha Konstruksi dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Sosial Wajib yang berkontraksi masing-masing sebesar 6,89 persen dan 5,71 persen. Empat lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dan tumbuh positif yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,17 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 9,39 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor sebesar 8,13 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 6,77 persen.



PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2025 TERHADAP TRIWULAN III-2025 (Q-TO-Q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 dibanding triwulan III-2025 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor terbesar dalam perekonomian Provinsi Jambi mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen. Hal ini dipicu oleh telah berakhirnya puncak panen dan telah memasuki periode tanam. Sementara itu, lapangan usaha yang juga berkontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Jambi dan tumbuh positif adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 4,29 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,37 persen, serta lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,93 persen.

PDRB MENURUT PENGELUARAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2025 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,75 persen; diikuti Pengeluaran

Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,68 persen; Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,89 persen; dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,63 persen. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu 8,67 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor

pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 1,26 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 69,40 persen. Komponen lainnya yang memiliki andil besar terhadap PDRB adalah komponen PK-RT yaitu sebesar 40,88 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 20,46 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 5,64 persen. Sedangkan andil komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,58 persen dan 0,77 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki andil sebesar 37,73 persen.

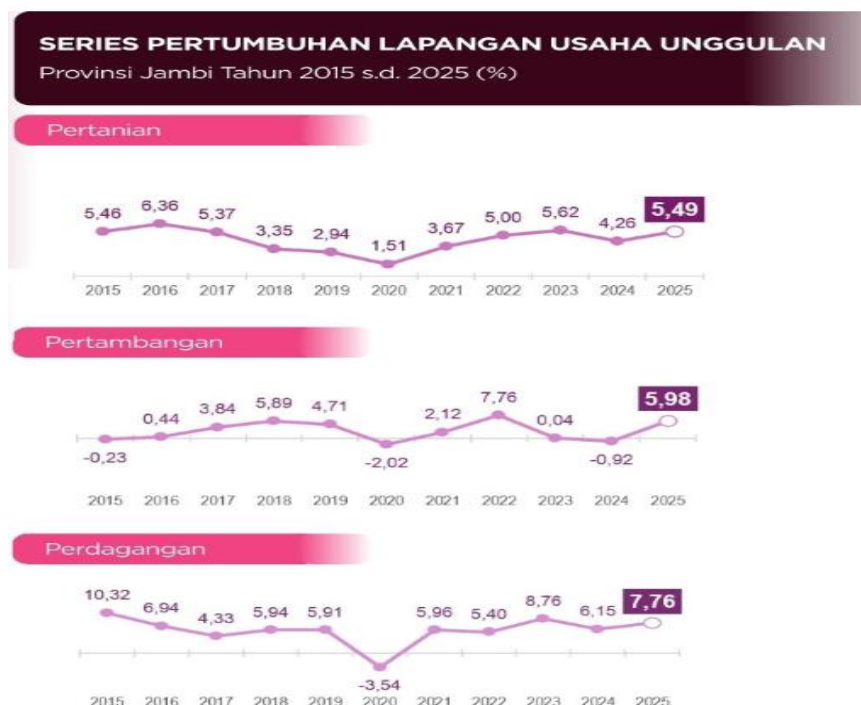
Diagram 3.5. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2025 TERHADAP TRIWULAN IV-2024 (Y-ON-Y)

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024



Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,35 persen; diikuti komponen PK-RT sebesar 4,55 persen; dan komponen PK-LNPRT sebesar 3,82 persen. Sementara itu, komponen yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu komponen PK-P sebesar 15,49 persen dan komponen PMTB sebesar 0,74 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang PDRB mengalami pertumbuhan sebesar 1,07 persen.

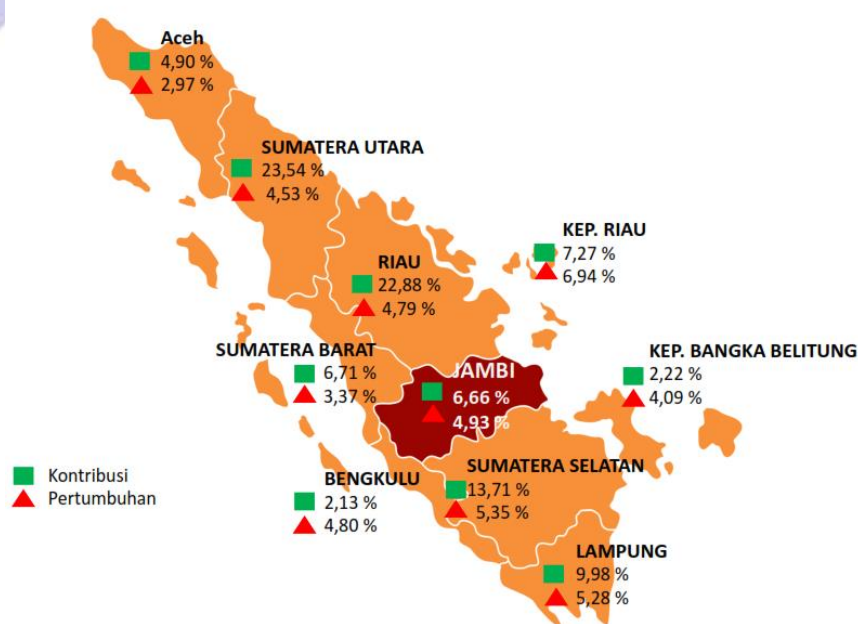
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025 Terhadap Triwulan III-2025 (q-to-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 dibanding triwulan III-2025 tumbuh sebesar 1,30 persen (q-to-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen PK-LNPRT sebesar 8,05 persen; komponen PK-P sebesar 7,14 persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,88 persen; PMTB sebesar 3,40 persen; dan komponen PK-RT sebesar 2,24 persen. Sedangkan komponen Impor Barang dan Jasa merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan 11,01 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian provinsi-provinsi di Sumatra menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di semua provinsi tercatat kondusif, dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara kumulatif pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,94 persen, diikuti Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,35 persen dan Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5 persen. Provinsi Jambi berada pada peringkat empat dengan pertumbuhan sebesar 4,93 persen.

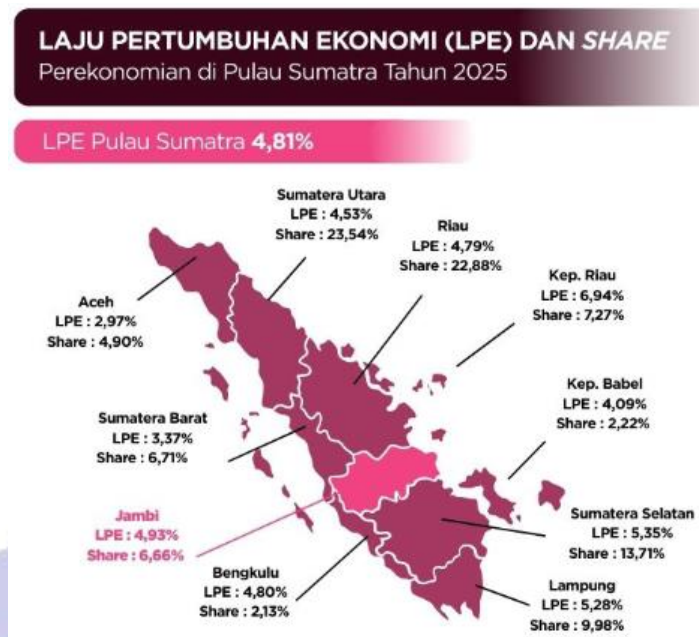
Gambar 3.5. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Secara spasial, struktur perekonomian Sumatra pada tahun 2025 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,54 persen, Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 22,88 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,71 persen. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Sumatra, Provinsi Jambi berada pada peringkat tujuh dengan kontribusi sebesar 6,66 persen.

Gambar 3.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Perhitungan PDRB menggunakan pendekatan nilai tambah dengan membagi sektor perekonomian Provinsi Jambi menjadi 17 sektor.

Tabel 3.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	93.495,78	109.588,60	120.595,81	45.698,37	47.643,00	50.259,68
B. Pertambangan dan Penggalian	45.088,98	43.504,57	48.201,09	38.517,96	38.163,88	40.445,93
C. Industri Pengolahan	29.346,79	31.524,81	34.168,84	16.892,88	17.691,80	18.594,58
D. Pengadaan Listrik dan Gas	220,70	243,34	257,91	108,81	117,13	125,40
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	381,64	401,06	426,26	220,25	224,57	228,55
F. Konstruksi	21.652,24	23.950,37	23.175,35	12.870,48	14.135,03	13.549,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39.046,31	43.006,34	47.457,14	17.253,08	18.314,65	19.736,46
H. Transportasi dan Pergudangan	9.412,83	10.402,40	11.536,02	5.620,46	6.080,64	6.620,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.189,68	3.552,76	3.784,36	2.007,34	2.200,93	2.267,89
J. Informasi dan Komunikasi	10.913,12	11.503,13	12.533,91	7.303,95	7.686,67	8.339,27
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.669,96	6.964,76	7.735,98	3.692,37	3.778,18	4.109,70
L. Real Estat	4.367,76	4.672,80	4.786,02	2.456,56	2.586,73	2.692,35
M,N. Jasa Perusahaan	4.365,85	4.944,18	5.400,40	2.071,95	2.269,33	2.427,93
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.340,91	11.913,03	11.953,81	5.045,81	5.621,90	5.474,40
P. Jasa Pendidikan	9.036,78	9.892,99	10.273,42	5.457,12	5.918,60	6.110,37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.553,51	4.019,81	4.078,61	2.261,37	2.509,21	2.612,12
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.784,73	3.089,36	3.297,66	1.780,29	1.926,19	1.986,86
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	293.867,57	323.174,33	349.662,60	169.259,04	176.868,44	185.582,21

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Tabel 3.8. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III- 2025 Terhadap Triw II- 2025 (q-to-q)	Triw IV- 2025 Terhadap Triw III- 2025 (q-to-q)	Triw III- 2025 Terhadap Triw III- 2024 (y-on-y)	Triw IV- 2025 Terhadap Triw IV- 2024 (y-on-y)	Laju pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,64	-1,26	7,01	3,17	5,49	1,48
B. Pertambangan dan Penggalian	2,88	4,29	5,20	9,39	5,98	1,29
C. Industri Pengolahan	2,47	0,93	3,62	6,77	5,10	0,51
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,63	10,00	4,42	16,09	7,06	-0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,50	0,84	-0,49	1,81	1,77	-0
F. Konstruksi	1,35	2,14	-6,31	-6,89	-4,14	-0,33
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,15	0,37	6,95	8,13	7,76	0,80
H. Transportasi dan Pergudangan	2,48	4,30	6,16	8,09	8,88	0,31
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,87	0,52	5,03	4,82	3,04	0,04
J. Informasi dan Komunikasi	-1,08	0,43	8,63	10,95	8,49	0,37
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,67	7,05	5,24	19,03	8,77	0,19
L. Real Estat	0,58	1,52	3,18	4,18	4,08	0,06
M,N. Jasa Perusahaan	1,82	1,28	6,62	8,06	6,99	0,09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,06	1,66	1,74	-5,71	-2,62	-0,08
P. Jasa Pendidikan	4,91	-2,25	5,23	4,23	3,24	0,11
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,64	-4,51	6,45	1,65	4,10	0,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-4,39	15,27	2,31	8,27	3,15	0,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,21	1,30	4,82	5,24	4,93	4,93

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya
-0: Data sangat kecil/mendekati 0

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Tabel 3.9. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)

Provinsi	Triw III-2025 Terhadap Triw II-2025 (q-to-q)	Triw IV-2025 Terhadap Triw III-2025 (q-to-q)	Triw III-2025 Terhadap Triw III-2024 (y-on-y)	Triw IV-2025 Terhadap Triw IV-2024 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2025	Sumber Pertumbuhan 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	1,71	-0,05	4,46	-1,61	2,97	0,17
2. Sumatera Utara	2,11	0,13	4,55	4,23	4,53	1,05
3. Sumatera Barat	-0,11	0,39	3,36	1,69	3,37	0,25
4. Riau	3,54	0,12	4,98	4,94	4,79	1,01
5. Jambi	2,21	1,30	4,82	5,24	4,93	0,32
6. Sumatera Selatan	2,25	-1,53	5,20	5,54	5,35	0,74
7. Bengkulu	-2,98	3,34	4,56	4,79	4,80	0,10
8. Lampung	0,69	-3,05	5,04	5,54	5,28	0,55
9. Kep. Bangka Belitung	-1,75	4,87	3,16	4,54	4,09	0,09
10. Kepulauan Riau	0,85	7,35	7,48	7,89	6,94	0,53

Catatan: q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator keberhasilan ekonomi suatu Provinsi/Kabupaten. Perhitungan PDRB Konvensional tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut hanya mengukur hasil kegiatan ekonomi tidak memasukkan dimensi lingkungan di dalamnya. Sehingga PDRB Konvensional tersebut memiliki beberapa kelemahan. Sektor kehutanan yang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan dengan jasa lingkungannya yang tak ternilai mengharuskan perhitungan PDRB yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga diperoleh nilai ekonomi sumber daya hutan secara menyeluruh, disebut PDRB Hijau. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan akurat sesuai kinerja perekonomian yang sebenarnya.

Pada laporan kinerja ini menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau sektor kehutanan Provinsi Jambi dengan pendekatan jasa lingkungan dengan menggunakan data regional Provinsi Jambi. Data yang dikumpulkan pada laporan ini yaitu berupa data sekunder yang meliputi data Statistik Kehutanan dan tutupan lahan hutan Provinsi Jambi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan data PDRB Provinsi Jambi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Analisis data yang dipergunakan adalah estimasi nilai PDRB Hijau kehutanan dengan mengurangi nilai deplesi dan degradasi sumberdaya hutan dan menambahkan nilai jasa lingkungan dengan pendekatan benefit transfer. Perhitungan PDRB Hijau sektor kehutanan dengan pendekatan jasa lingkungan diperoleh nilai PDRB Hijau kehutanan jadi lebih tinggi dengan mengintegrasikan nilai jasa lingkungan ke dalam perhitungan.

Dalam konsep penghitungan PDRB Hijau dilakukan melalui tahapan antara lain :

1. Menghitung nilai tambah sektor kehutanan.
2. Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya hutan yang diambil.
3. Memberikan nilai ekonomi terhadap sumberdaya hutan yang diambil.
4. Mengurangi nilai tambah PDRB sektor kehutanan dengan nilai deplesi sumberdaya hutan diperoleh nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan.
5. Melakukan identifikasi kerusakan atau degradasi tanah/lahan, air dan udara akibat kegiatan kehutanan.
6. Menghitung besar volume kerusakan atau degradasi sumberdaya alam akibat kegiatan kehutanan.
7. Menentukan nilai ekonomi (valuasi) degradasi lingkungan,

8. Nilai degradasi dikurangkan dari nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan dan diperoleh nilai kontribusi hijau dari sektor kehutanan



Dari pengumpulan data di atas, maka model estimasi nilai PDRB Hijau Kehutanan dapat dilihat pada model estimasi nilai PDRB Hijau PDRB Konvensional Kehutanan (-) Depleksi Sumberdaya Hutan, PDRB Semi Hijau Hutan (-) Degradasi Sumberdaya Hutan, PDRB Hijau Kehutanan Tanpa Jasa Lingkungan, PDRB Hijau Kehutanan + Jasa Lingkungan.

Adapun estimasi Nilai Depleksi sumberdaya hutan yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan besarnya nilai pembayaran Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebagai pungutan yang dikenakan untuk pengganti nilai intrinsik terhadap hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Sementara estimasi Nilai Degradasi sumber daya hutan didekati dari data luas deforestasi berdasarkan perubahan tutupan lahan hutan Sumatera Utara dan Nilai jasa lingkungan hutan dihitung dengan menggunakan pendekatan Benefit Transfer.



Program yang dilakukan guna pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
9. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman modal
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Promosi Penanaman Modal
20. Program Pemasaran Pariwisata
21. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
22. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
23. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
24. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
25. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
26. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
27. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
28. Program Pengembangan UMKM

Faktor Penghambat :

Pertumbuhan PDRB Hijau di Provinsi Jambi menghadapi tantangan :

1. Ketergantungan Energi Fosil dan kebutuhan energi meningkat, sementara cadangan fosil (BBM, Batu Bara) terus berkurang dan tidak ramah lingkungan.
2. Degradasi Lingkungan & Alih Fungsi Lahan sebagai akibat dari terjadinya pembukaan lahan untuk perkebunan, yang berisiko memicu kebakaran hutan dan penurunan kualitas ekosistem.
3. Kerentanan Ekonomi Provinsi Jambi masih sangat bergantung pada sektor primer (perkebunan/pertambangan) yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan kerentanan iklim.
4. Energi Belum Merata pada masyarakat yang belum menikmati aliran listrik secara merata, menuntut penyediaan energi yang lebih berkelanjutan

Solusi Pertumbuhan PDRB Hijau :

1. Transisi ke Energi Terbarukan dengan mengembangkan sumber energi terbarukan lokal (seperti tenaga air atau bioenergi) untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara.
2. Penerapan Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) dan mendorong praktik pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan, sertifikasi produk hijau (seperti minyak sawit berkelanjutan), dan optimalisasi sektor pinang atau komoditas unggulan lainnya.
3. Investasi dan Kebijakan Hijau dengan mengarahkan penanaman modal asing dan dalam negeri ke sektor ekonomi hijau (rendah emisi).
4. Perencanaan Wilayah Berkelanjutan dengan memperkuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk melindungi kawasan hutan dan menetapkan zonasi yang ketat untuk industri rendah karbon.
5. Peningkatan SDM dan Ekonomi Sirkular dengan memberikan edukasi mengenai praktik ekonomi hijau dan pengelolaan limbah untuk mendorong efisiensi sumber daya

INDIKATOR KINERJA : TINGKAT KEMISKINAN



Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 6,89 persen, menurun 0,30 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,37 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 261,25 ribu orang, menurun 9,69 ribu orang terhadap Maret 2025 dan menurun 11,45 ribu orang terhadap September 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 sebesar 9,25 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 9,52 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2025 sebesar

5,70 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,01 persen.

Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin September 2025 perkotaan menurun sekitar 2,46 ribu orang (dari 120,30 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 117,84 ribu orang pada September 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan juga menurun sekitar 7,23 ribu orang (dari 150,64 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 143,41 ribu orang pada September 2025). Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp713.849/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp542.466 (75,99 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp171.383 (24,01 persen). Pada September 2025, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jambi memiliki 4,98 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp3.554.968/rumah tangga miskin/bulan.

Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan Tahun 2025

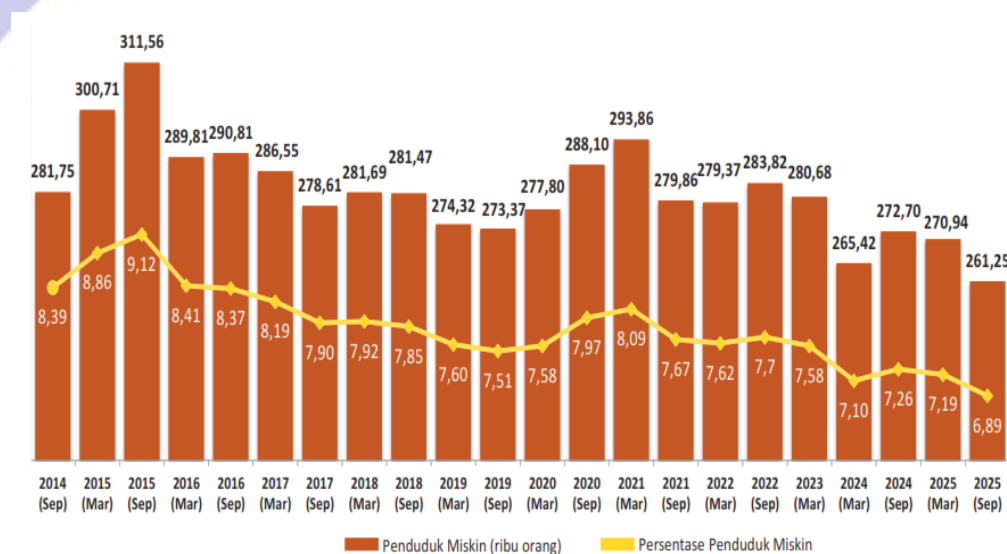
Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Tingkat Kemiskinan (Sept) %	7,97	7,58	7,26	6,8	6,89 (Sept)	98,69	6,8	8,25 (Indonesia)
* Didukung melalui angka persentase Penduduk miskin, garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita, penduduk dibawah garis kemiskinan, dan jumlah penduduk								

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2014–September 2025

Secara umum, pada periode September 2014–September 2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun di beberapa periode terjadi kenaikan baik pada jumlah maupun persentase penduduk miskin. Sejak September 2014, perkembangan kemiskinan bergerak naik sampai tahun 2015 lalu mengalami kecenderungan menurun hingga September 2019. Selanjutnya, pada Maret 2020–Maret 2021, jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat setelah sebelumnya menurun dalam beberapa periode. Hal ini berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19. Pada September 2021–September 2025, tingkat kemiskinan kembali menurun secara bertahap dengan beberapaperubahan antarperiode. Pada September 2025, persentase penduduk miskin mencapai titik terendah, yaitu sebesar 6,89 persen. Adapun

perkembangan tingkat kemiskinan September 2014 sampai dengan September 2025 secara lengkap disajikan pada Diagram berikut ini :

Diagram 3.6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Sept 2014 - Sept 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025 (2026)

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2024–September 2025

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2025 mencapai 261,25 ribu orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin menurun 9,69 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 11,45 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 6,89 persen, menurun 0,30 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,37 persen poin terhadap September 2024.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2025–September 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sekitar 2,46 ribu orang, demikian halnya di perdesaan turun sekitar 7,23 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,52 persen menjadi 9,25 persen. Sementara itu, di perdesaan juga turun dari 6,01 persen menjadi 5,70 persen.

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin pada September 2025

Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatra pada September 2025. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan yaitu masing-masing sebesar 12,22 persen, 11,88 persen, dan 9,85 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 4,26 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah ada di Provinsi Bangka Belitung.

Tabel 3.11. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, Maret 2025.

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	8,15	14,51	12,22	168,77	534,56	703,33
Sumatera Utara	7,16	7,35	7,24	648,75	479,31	1.128,06
Sumatera Barat	3,75	7,03	5,31	115,18	197,12	312,30
Riau	5,61	6,76	6,30	171,03	304,54	475,57
Jambi	9,25	5,70	6,89	117,84	143,41	261,25
Sumatera Selatan	8,91	10,43	9,85	310,56	587,68	898,24
Bengkulu	13,23	11,19	11,88	94,51	155,69	250,19
Lampung	7,37	10,88	9,66	229,09	631,04	860,13
Bangka Belitung	3,59	6,50	4,77	33,31	41,35	74,65
Kepulauan Riau	3,85	8,70	4,26	94,77	19,79	114,55
Indonesia	6,60	10,72	8,25	11.183,28	12.176,43	23.359,71

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025 (2026)

Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2024–September 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan sampai dengan September 2025.

Tabel 3.12. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Septembert 2024–September 2025

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2024	569.981	184.254	754.235
Maret 2025	572.986	186.813	759.799
September 2025	615.370	196.646	812.016
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	7,96	6,73	7,66
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	7,40	5,26	6,87
Perdesaan			
September 2024	464.125	148.620	612.745
Maret 2025	467.572	150.549	618.121
September 2025	506.394	158.501	664.895
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	9,11	6,65	8,51
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	8,30	5,28	7,57
Total			
September 2024	497.637	160.463	658.100
Maret 2025	501.425	162.702	664.127
Maret 2025	542.466	171.383	713.849
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	9,01	6,81	8,47
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	8,18	5,34	7,49

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2026 (2026)

Garis Kemiskinan pada September 2025 adalah sebesar Rp713.849/kapita/bulan. Dibandingkan Maret 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,49 persen. Sementara jika dibandingkan September 2024, juga terjadi kenaikan sebesar 8,47 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2025 di perkotaan sebesar 75,78 persen dan di perdesaan sebesar 76,16 persen.

Tabel 3.13. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2025

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	75,78	Makanan:	76,16
Beras	19,08	Beras	20,40
Rokok kretek filter	17,28	Rokok kretek filter	15,17
Cabe merah	4,78	Daging ayam ras	4,56
Daging ayam ras	4,55	Cabe merah	4,31
Telur ayam ras	3,89	Telur ayam ras	3,99
Mie instan	2,36	Gula pasir	2,46
Bawang merah	2,28	Mie instan	2,46
Daging sapi	1,78	Bawang merah	2,43
Kue basah	1,67	Cabe rawit	2,06
Cabe rawit	1,58	Tongkol/tuna/cakalang	1,89
Lainnya	16,52	Lainnya	16,42
Bukan Makanan:	24,22	Bukan Makanan:	23,84
Perumahan	6,86	Perumahan	8,39
Bensin	3,51	Bensin	3,19
Listrik	3,50	Listrik	2,51
Pendidikan	1,69	Pendidikan	1,54
Perlengkapan mandi	1,20	Perlengkapan mandi	0,97
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,88	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,81
Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,87	Pakaian jadi anak-anak	0,79
Pajak kendaraan bermotor	0,79	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,72
Perawatan kulit, muka, kuku, tambut	0,66	Perawatan kulit, muka, kuku, tambut	0,62
Pakaian jadi anak-anak	0,63	Pajak kendaraan bermotor	0,57
Lainnya	3,65	Lainnya	3,72

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025 (2026)

Pada September 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 19,08 persen di perkotaan dan 20,40 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (17,28 persen di perkotaan dan 15,17 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah cabe merah (4,78 persen di perkotaan dan 4,31 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,55 persen di perkotaan dan 4,56 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,89 persen di perkotaan dan 3,99 persen di perdesaan), mie instan (2,36 persen di perkotaan dan 2,46 persen di perdesaan), bawang merah (2,28 persen di perkotaan dan 2,43 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (6,86 persen di perkotaan dan 8,39 persen di perdesaan), bensin (3,51 persen di perkotaan dan 3,19 persen di perdesaan), dan listrik (3,50 persen di perkotaan dan 2,51 persen di perdesaan).

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga, September 2025

Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2025 adalah sebesar Rp3.554.968/bulan, naik sebesar 8,14 persen dibanding kondisi Maret 2025 yang sebesar Rp3.287.429/bulan.

Tabel 3.14. Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2024 s.d. Maret 2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2025	664.127	4,95	3.287.429
September 2025	713.849	4,98	3.554.968
Perubahan Maret 2025–September 2025 (%)	7,49	0,61	8,14

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025 (2026)

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan, Maret 2025–September 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2025–September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,831, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,976. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,153 turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,199.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Pada September 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,189 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,650. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,239 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,110.

Tabel 3.15. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2024 – September 2025

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2024	2,265	0,832	1,311
Maret 2025	1,465	0,730	0,976
September 2025	1,189	0,650	0,831
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
September 2024	0,846	0,198	0,415
Maret 2025	0,320	0,138	0,199
September 2025	0,239	0,110	0,153

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025 (2026)

Berbagai Program yang dilakukan secara crosscutting antar perangkat daerah turut mempengaruhi pencapaian penurunan angka kemiskinan. Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Sosial
8. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
9. Program Rehabilitasi Sosial
10. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Faktor Penghambat :

Penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan tren positif (turun 0,30% menjadi 6,81% pada September 2025) melalui penguatan sektor pertanian, bantuan sosial, dan penurunan pengangguran. Tantangan utamanya adalah ketimpangan desa-kota dan perlunya peningkatan kualitas SDM. Selain itu, permasalahan yang turut dihadapi yakni :

1. Kesenjangan Desa-Kota, masih terdapat disparitas tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Ketergantungan Sektor Primer, sektor ekonomi masih bergantung pada pertanian/perkebunan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
3. Rendahnya Kualitas SDM & Pendidikan menjadi faktor penting dimana pendidikan dan usia tanggungan keluarga memengaruhi pendapatan rumah tangga.
4. Tantangan Pasca-Pandemi, turut berdampak ekonomi lanjutan dari COVID-19 yang masih terasa.

Solusi dan Langkah Strategis :

1. Pemberdayaan Ekonomi Produktif dengan mendorong produktivitas ekonomi keluarga dan memfasilitasi usaha mandiri.
2. Peningkatan Perlindungan Sosial melalui Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran (bantuan pusat dan daerah).
3. Peningkatan Kualitas SDM dengan memastikan akses dan keberlanjutan pendidikan untuk memutus mata rantai kemiskinan.
4. Optimalisasi Data Terpadu menggunakan data akurat dari BPS dan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk perumusan kebijakan.
5. Pengurangan Pengangguran dengan upaya penciptaan kesempatan kerja melalui industri padat karya dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

SASARAN STRATEGIS 3 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. RASIO KONEKTIVITAS
2. AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
3. PERSENTASE DESA/ KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

**INDIKATOR KINERJA :
RASIO KONEKTIVITAS**

Konektivitas transportasi yang memadai menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kualitas bangsa dan negara untuk bisa bersaing dengan negara dan bangsa lain. Sistem dan konektivitas transportasi yang memadai juga dapat meningkatkan devisa dan pendapatan negara, mempermudah alur distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dapat mendistribusikan barang dan jasa lebih efektif dan efisien.

Upaya mengintegrasikan sektor transportasi yang efektif dan efisien terus dilakukan, demikian juga konektivitas transportasi dari satu titik ke titik yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki provinsi dan luasnya jangkauan wilayah, strategi desain konektivitas transportasi diarahkan pada prioritas konektivitas transportasi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi wilayah dan kelancaran logistik.

Dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi. Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan transportasi yang mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan dengan sistem yang sudah terbangun.

Rasio konektivitas merupakan persentase wilayah Provinsi Jambi yang sudah terlayani

oleh moda transportasi baik darat maupun perairan. Pengukuran atas indikator kinerja rasio konektivitas dilakukan dengan formulasi berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, sebagai berikut :

Rasio Konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan})$

1. $IK1 (\text{angkutan jalan}) = (\text{jumlah trayek yang dilayani pada provinsi} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}$.
2. $IK2 (\text{angkutan sungai, danau dan penyebrangan}) = \text{jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pada provinsi tersebut} \times \text{bobot lintas} \div (\text{jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada provinsi tersebut})$

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyebrangan yaitu :

- a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
- b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyebrangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyebrangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 10)

Rasio konektivitas = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot ASDP})$

IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}) \div \text{Jumlah kebutuhan trayek}$

$$= \frac{(54 \times 0,8)}{63}$$

$$= 0,685$$

IK1 (ASDP) = $(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas}) \div \text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan}$

$$= \frac{(2 \times 0,8)}{3}$$

$$= 0,53$$

Maka,

$$\text{Rasio konektivitas} = (0,685 \times 70) + (0,53 \times 30)$$

$$= 47,95 + 15,9$$

$$= 63,85$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka Rasio konektivitas sebesar 63,85% pada wilayah sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat maupun perairan.

Rasio Konektivitas Provinsi Jambi pada tahun 2025 mencapai angka 63,85%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 54,2% maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 117,8% masuk dalam kategori tinggi.

Tabel 3.16. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Rasio Konektivitas	53,5	54,05	58,74	54,2	63,85	117,8	54,4	73,39
* Didukung melalui angka Bobot angkutan jalan, bobot angkutan sungai, bobot trayek atau lintas								

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja rasio konektivitas antara lain :

- Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi
- Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan Provinsi
- Penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah

lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan regional

Selanjutnya, untuk meningkatkan rasio konektivitas dimasa yang akan datang perlu dilakukan upaya antara lain :

- Meningkatkan pengawasan perizinan trayek angkutan
- Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
- Penyediaan anggaran dalam pengelolaan transportasi
- Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM perhubungan

Peningkatan mobilitas yang semakin tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan kebutuhan transportasi yang semakin meningkat pula. Pada suatu wilayah yang sedang berkembang tentunya memiliki jumlah pergerakan yang besar dari pergerakan orang maupun barang pada ruang jalan dengan menggunakan transportasi.

Lalu lintas merupakan sebuah kebutuhan penunjang setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Beragam asal tujuan setiap individu dalam melakukan perjalanan menimbulkan suatu pergerakan massa yang cukup besar dari suatu wilayah menuju wilayah lainnya melalui sebuah infrastruktur transportasi yang dikenal dengan jaringan jalan.

Dalam kehidupan manusia, jaringan jalan diibaratkan sebagai urat nadi yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jaringan jalan mengalirkan setiap kebutuhan yang diperlukan oleh semua manusia di seluruh wilayah. Adanya hubungan antara pergerakan dan jaringan jalan yang saling mempengaruhi mengakibatkan pembebanan terhadap suatu jaringan jalan. Pada suatu waktu tertentu ketika jumlah pergerakan lebih besar dibandingkan kemampuan kapasitas jaringan jalan, akan timbul masalah lalu lintas yang akan mengurangi efektivitas maupun efisiensi dari pergerakan di jaringan jalan.

Pengukuran atas kinerja lalu lintas dilakukan pada ruas jalan kewenangan Provinsi yaitu dengan cara membandingkan antara volume lalu lintas pada suatu segmen jalan dalam suatu waktu dengan kapasitas lalu lintas. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan pada salah satu ruas jalan di Kota Jambi. Adapun formulasi penghitungan kinerja lalu lintas adalah sebagai berikut :

$$\text{Kinerja lalu lintas} = \frac{V/C \text{ Rasio}}{\text{Volume lalu lintas}}$$

Kapasitas lalu lintas

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik pada suatu ruas jalan per satuan waktu dinyatakan dalam kendaraan per jam. Kapasitas lalu lintas jumlah arus lalu lintas maksimum yang dapat dipertahankan. Nilai V/C Rasio sebesar 0,55 dapat diartikan bahwa kinerja lalu lintas bagus, arus lalu lintas cukup stabil, gerak kendaraan dikendalikan serta pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Apabila nilai V/C rasio semakin besar atau mendekati 1 maka kinerja lalu lintas semakin buruk.

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{0,55}{0,55} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja rasio konektivitas tahun 2025 ini antara lain sebagai berikut :

- Manajemen kinerja pembangunan baik dari tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
- Kesesuaian penyusunan APBD Provinsi Jambi dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- Kondisi sosial masyarakat Provinsi Jambi yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan tata tertib lalu lintas
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perhubungan serta penerapan teknologi pada beberapa program dan kegiatan.

Keberhasilan dari capaian ini tidak terlepas pula dari upaya dalam :

- Melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dengan baik.
- Mengusulkan secara berkelanjutan kegiatan perencanaan dilingkungan perhubungan.
- Mengupayakan peningkatan dana yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dengan menyiapkan lebih dini dan lengkap dokumen-dokumen dan data dukung usulan pembangunan.
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan BUMN sektor Perhubungan guna

mengalokasikan dana yang lebih besar lagi dalam peningkatan/pengembangan dan pembangunan prasarana perhubungan, khususnya pengembangan bandar udara dan pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi.

- e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna memperoleh sinergitas dan integrasi pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi.

Tingkat pencapaian konektivitas yang lebih baik tidak terlepas dari peningkatan kualitas jalan yang semakin baik pula. Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral, karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1.183,787 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra perekonomian dengan total sepanjang 855,589 km.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas. Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534 / KPTS / M / 2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang.

Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2025 difokuskan pada pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2025 adalah sebesar 69,385%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 83,87%, maka persentase capaian ini mencapai 82,729% atau masuk dalam kategori tinggi. Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan / peningkatan jalan dan

jembatan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan.

Terjadinya penurunan jalan provinsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Di awal periode 2025 tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program – program prioritas terwujudnya Jambi Mantap 2026.

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan.



Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.

Selain itu, peningkatan kondisi jalan mengurangi panjang jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.

Guna memastikan konektivitas selalu terjaga dengan baik, maka Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dengan melakukan berbagai langkah strategis diantaranya :

Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.

- a. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
- b. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.



Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini dilaksanakan melalui 3 program dan 12 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam mencapai target indikator Rasio konektivitas, Kinerja Lalu Lintas dan On time performance layanan transportasi. program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan, pelayanan serta sarana, prasarana dan fasilitas transportasi darat di Provinsi Jambi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jambi serta menetapkan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jambi. Kegiatan ini menghasilkan dokumen perencanaan yang menjadi

acuan dalam pembangunan bidang perhubungan.

- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi. Dalam kegiatan ini dihasilkan fasilitas keselamatan jalan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

- c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi serta menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dalam kegiatan ini akan terwujud pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta tersedianya angkutan umum aglomerasi massa perkotaan (BRT).

- d. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dalam kegiatan ini akan terwujud perizinan trayek angkutan yang tertib dan teratur.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan (SDP) serta laut dalam mencapai target indikator Rasio konektivitas. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan, pelayanan serta sarana, prasarana dan fasilitas pelayaran di Provinsi Jambi. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

- a. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi. Dalam kegiatan ini akan terwujud perizinan trayek angkutan sungai dan danau yang tertib dan teratur.

- b. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional. Dalam kegiatan ini akan tersedia dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pembangunan perhubungan.

3. Program Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan.

INDIKATOR KINERJA : AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan



Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.

Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah ketersediaan dan akses terhadap air bersih. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan perdesaan.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudah-mudahan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik

untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak



Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

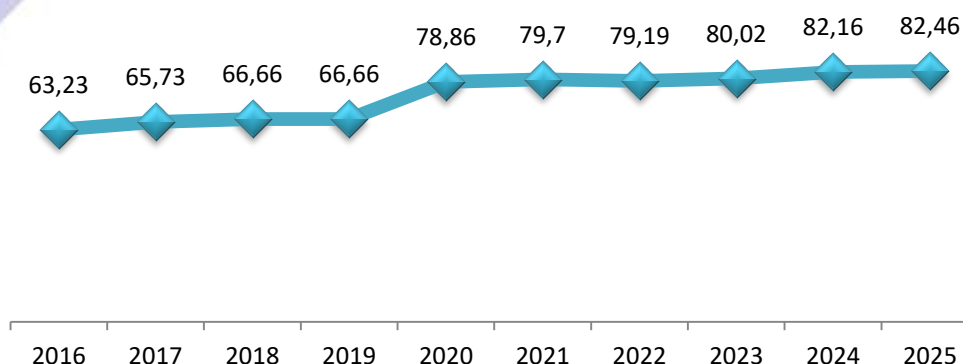
Tabel 3.17. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Akses Terhadap Air Minum Layak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Akses terhadap Air Minum Layak	78,06	80,02	82,16	87	82,46	94,78	85	93,22
* Didukung melalui Pengendalian pencemaran lingkungan, Peningkatan penduduk berakses air bersih, Penyediaan tempat tinggal layak								

Pada tahun 2025, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 82,46 persen. Capaian ini bergerak bertahap dalam mencapai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 85 persen, sampai dengan 2025 telah terealisasi sebesar 94,78% dengan kriteria sangat tinggi.

Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah sebesar 82,46%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2026 yakni sebesar 94,78% maka dengan capaian sampai dengan tahun 2025 mencapai 94,78% dan termasuk dalam kategori tinggi.

Grafik 3.4. Perkembangan Capaian Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Capaian terhadap akses air minum layak berdasarkan kawasan regional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18. Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Regional, 2025

Provinsi di Pulau Sumatera	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
	2025	2025	2025
ACEH	95,57	90,11	92,06
SUMATERA UTARA	96,22	89,17	93,24
SUMATERA BARAT	93,01	81,01	87,26
RIAU	96,35	89,42	92,17
JAMBI	92,2	77,76	82,46
SUMATERA SELATAN	92,14	83,74	86,82
BENGKULU	78,21	66,58	70,47
LAMPUNG	91,26	82,14	85,13
KEP. BANGKA BELITUNG	86,7	78,93	83,54
KEP. RIAU	95,99	76,65	94,6
INDONESIA	97,02	87,7	93,22

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian akses terhadap sumber air minum layak pada wilayah regional adalah sebesar 82,46% berada di atas Provinsi Bengkulu. Namun capaian ini masih berada dibawah rata-rata akses terhadap sumber air minum layak di wilayah pulau Sumatera. Terkait ini,

perlu pula kiranya menyajikan data rumah tangga terhadap sumber air utama yang digunakan untuk minum di Provinsi Jambi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Provinsi Jambi Tahun 2025

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang Branded Bottled, Refill Water	Leding Tap Water	Sumur Bor/Pompa Drilling Well/Pump	Sumur Terlindung Protected Well	Sumur Tak Terlindung Unprotected Well	Mata Air Terlindung, Air Hujan Protected Spring, Rain Water	Mata Air Tak Terlindung, Air Permukaan, Lainnya Unprotected Spring Surface Water, Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Kerinci	22,04	29,77	3,25	4,20	NA	NA	16,01	100,00
02. Merangin	18,79	2,58	4,82	37,59	16,54	16,54	14,45	100,00
03. Sarolangun	5,92	3,70	9,74	52,25	17,53	17,53	5,18	100,00
04. Batang Hari	11,61	13,49	14,22	46,83	12,09	12,09	NA	100,00
05. Muaro Jambi	30,11	4,58	8,20	37,20	16,01	16,01	NA	100,00
06. Tanjung Jabung Timur	46,36	NA	2,70	3,58	1,33	1,33	NA	100,00
07. Tanjung Jabung Barat	32,61	0,91	6,65	8,77	2,18	2,18	NA	100,00
08. Tebo	23,63	9,90	16,96	33,73	12,50	12,50	2,55	100,00
09. Bungo	33,65	1,63	9,81	39,07	9,78	9,78	4,17	100,00
10. Kota Jambi	57,29	19,49	3,02	17,93	1,93	1,93	-	100,00
11. Kota Sungai Penuh	48,60	36,76	2,15	7,89	NA	NA	3,90	100,00
Provinsi Jambi	30,45	9,59	7,64	28,19	9,00	11,05	4,09	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Faktor Penghambat :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Selain itu, permasalahan lainnya antara lain :

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1. Rendahnya Akses Air Leding, penggunaan air leding (PAM) sebagai sumber utama rumah tangga sangat minim, bahkan cenderung menurun.
2. Ketergantungan Sumur, mayoritas rumah tangga masih mengandalkan air sumur (42%) yang rentan terhadap pencemaran, terutama saat musim hujan.
3. Pencemaran Sumber Air, ketergantungan pada air permukaan (sungai)



menyebabkan risiko tinggi terhadap pencemaran akibat limbah domestik dan aktivitas manusia.

4. Keterbatasan Infrastruktur, belum meratanya jangkauan jaringan pipa PAM ke wilayah pedesaan dan pelosok.

Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten / kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, juga perlu dilakukan :

1. Perluasan Jaringan PAM: Pemerintah Daerah perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur perpipaan (PAM) terutama untuk wilayah yang padat penduduk.
2. Optimalisasi PAMSIMAS: Memperkuat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk daerah pedesaan agar pengelolaan air lebih berkelanjutan.
3. Perlindungan Mata Air: Melindungi daerah resapan air dan mengendalikan pencemaran sungai dari limbah industri maupun rumah tangga.
4. Penyuluhan Kualitas Air: Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengolahan air minum yang layak (dimasak/disaring) untuk mencegah penyakit bawaan air.
5. Monitoring Kualitas: Melakukan pengawasan rutin terhadap kualitas air isi ulang dan sumber air mandiri (sumur) untuk memastikan standar kesehatan

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE DESA / KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

Konektivitas internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Konektivitas internet sekarang menjadi hal yang inklusif dibandingkan satu dekade yang lalu.



Pasca pandemi Covid-19 mempercepat penetrasi internet di Indonesia ketika kegiatan perkantoran dan pendidikan banyak dilakukan di rumah, serta masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah. Internet menjadi sarana bagi masyarakat untuk bekerja, berkomunikasi, mendapatkan hiburan, akses pembelajaran, perbankan, kesehatan, bertransaksi dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi internet masih dan akan terus berkembang di luar yang kita bayangkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan populasi yang tinggi dan tersebar.

Program DUMISAKE Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris - Abdullah Sani telah melaksanakan penyediaan akses internet gratis telah dapat dinikmati oleh masyarakat.

Melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tersebut dalam Jambi Cerdas dan Pintar sebagaimana melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

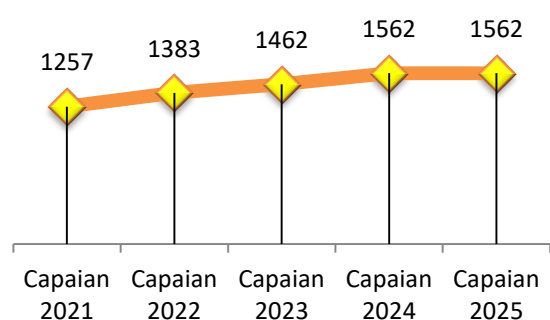
Program Unggulan Jambi Cerdas Dan Pintar Dari Pemerintah ini sejak tahun 2024 Berhasil Mengentaskan 80 Desa Di Provinsi Jambi Yang Tidak Memiliki Akses Internet. Penyedia Akses Internet Bagi Masyarakat Itu telah diselesaikan dalam Program Pengentasan Blank Spot Yang Tersebar Di 305 Desa Di Provinsi Jambi dan secara keseluruhan telah mencapai target di tahun 2024, dan capaian 2025 merupakan hasil akhir dari kinerja RPJMD 2021-2026 telah tercapai 100%.

Tabel 3.20. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	78,06	94,88	100	100	100	100	100	Na
* Jumlah Desa atau Kelurahan yang memiliki Akses Internet, Jumlah seluruh Desa/Kelurahan								

Dari total 1.562 Desa di Provinsi Jambi, terdapat 305 desa yang dikategorikan un-serve dan secara bertahap telah diberikan layanan internet desa sejak Tahun 2022 lalu sebanyak 125 desa, pada tahun 2023 sebanyak 80 desa, sampai dengan tahun 2025 lalu Pemerintah Provinsi Jambi telah menuntaskan target kinerja RPJMD dengan menyambungkan dan memberi layanan pada 80 desa sebagai penutup program internet desa.

Grafik 3.5. Trend Peningkatan Internet Desa



Sejak Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi, Sudah Berhasil Menyambungkan Jaringan Internet Untuk 125 Desa Blank Spot Yang Tersebar Di Sejumlah Daerah dan pada tahun 2024 Penyambungan pada 80 Desa lainnya telah selesai sesuai Target Penyelesaian Termasuk Tambahan Pembangunan Jaringan Repeater

Upaya pengentasan blank spot di wilayah Provinsi Jambi, dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, melalui kemudahan akses internet.



Awalnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan uji coba di 4 kabupaten dan Desa yang memang prioritas yang siap mendukung program ini dari Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan sebagian lagi dilaksanakan. Selama proses pengerjaan tidak terdapat persoalan yang menjadi kendala, melainkan hanya sedikit memakan waktu, karena jarak tempuh dan rute-rute menuju ke pelosok desa. Rute itu kadang harus nyeberang sungai, tetapi sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tersedianya akses internet sampai dengan ke pelosok Desa, ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa menjadi Desa Mandiri dan cepat mendapatkan informasi informasi terkini sehingga dapat mendorong perekonomian.

Azaz manfaat nya program ini sangat banyak, salah satu nya mendukung Desa itu supaya maju. Karena dengan berdirinya ini Desa akan mandiri tentu akan meningkatkan perekonomian bagi UMKM, nanti masyarakat di desa juga bisa membuat website.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN

INDIKATOR KINERJA :**INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.

Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut.

Berbagai isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin

lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.

2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :

- a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI
- b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.

3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :

- a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
- b. Meningkatnya limbah medis
- c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal



Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	68,15	73,97	73,15	75,05	102,59	73,53	73,89
* Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas lahan provinsi (IKL) ekosistem gambut, dan Indeks kualitas air laut (IKAL)								

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa indikator komposit antara lain : Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas lahan provinsi (IKL) ekosistem lahan, dan Indeks kualitas air laut (IKAL).

Capaian kinerja indikator komposit IKLH dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, lahan dan air laut	Indeks kualitas udara	77,71	79,81
		Indeks kualitas air	69,78	67,49
		Indeks kualitas lahan	73,05	73,70
		Indeks kualitas air laut	70,80	82,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025

Konsep ini merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL. Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal

Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2.5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2).

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2025, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO_2 , SO_2 dan $\text{PM}_{2.5}$.

Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO_2 , SO_2 dan $\text{PM}_{2.5}$ semakin baik.

Hasil pengolahan data dan perhitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2025 adalah 79,81 sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar 77,71 sehingga capaian kinerjanya mencapai 102,70%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 79,81 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “baik” ($70 \leq X < 90$). Tren IKU Provinsi Jambi mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2024. Namun, pada Tahun 2025 nilai IKU mengalami penurunan meskipun sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri);
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;

3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.

Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2025. Tahun 2025 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota.

Grafik 3.23. Indeks Kualitas Udara Provinsi Jambi

Tahun	Indeks Kualitas Udara	
	Target	Realisasi
2016	84	82,22
2017	85	89,11
2018	86	88,04
2019	87	87,25
2020	88	85,65
2021	89	87,08
2022	84,42	89,85
2023	84,52	90,57
2024	84,62	92,98
2025	84,72	79,81
2025	77,71	79,81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2025, 2026

Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) dan penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2025 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut :

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.
2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;
- b. Melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda Passive Sampler dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke display indoor dan outdoor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) ;
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;
3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan

sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.

Rekomendasi pengendalian pencemaran udara untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), antara lain :

1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang bersumber dari APBD untuk menambah jumlah data dan lokasi pemantauan
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kemampuan teknis
3. Membuat program kegiatan inovasi

INDEKS KUALITAS AIR

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI).

Indeks kualitas air merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk

memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.



Status kualitas air akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil terkait pengelolaan sungai/danau. Dalam menetapkan kualitas air, parameter-parameter tersebut tidak berdiri sendiri tetapi dapat ditransformasikan ke dalam suatu nilai tunggal yang mewakili, yaitu Indeks Kualitas Air. Tujuan perhitungan Indeks Kualitas Air adalah untuk menyederhanakan informasi sehingga informasi kualitas suatu perairan cukup disajikan dalam suatu nilai tunggal.

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia (IKA-INA) merupakan salah satu hasil pengembangan indeks kualitas air dengan metode penyusunan mengacu pada metode penyusunan NSF-WQI, yaitu dengan menggunakan metode Delphi dalam penetapan keputusan untuk pemilihan parameter, pembobotan dan penyusunan kurva sub indeks. IKA-INA dikembangkan untuk menyusun formulasi indeks kualitas air yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian kualitas air di Indonesia, sehingga semua penyusunan komponen IKA-INA yang berupa pemilihan parameter kualitas air, bobot parameter kualitas

air dan penyusunan kurva sub indeks merupakan hasil pengolahan data primer yang berasal dari panelis bidang air di Indonesia.

Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Dalam melakukan pemantauan, frekuensi pengambilan data ditentukan berdasarkan karakteristik klimatologis, yaitu pemantauan air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau (dengan asumsi debit air sungai rendah) dan 1 (satu) kali pada musim hujan (dengan asumsi debit air sungai tinggi).

Data tersebut harus mewakili hulu, tengah dan hilir pada setiap badan air yang dilakukan pemantauan. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mewakili sumber pencemar; pada daerah aliran sungai; pada titik intake pengolahan air minum; pada danau, waduk, atau situ; dan pada aliran badan air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.

Tabel 3.24. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2025

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	18	62,07%	70	43,45
Ringan	11	37,93%	50	18,97
Sedang	0	0%	30	0,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	29			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2025 dilakukan pada 16 titik pantau di sungai Batanghari. Dari data hasil Dinas pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi sebagaimana dilihat pada di atas.

Baku mutu air yang masuk dalam kategori Memenuhi sebesar 62,07%, selebihnya

sebesar 37,93% masuk dalam kategori Cemar Ringan. Sementara itu, hasil pengolahan data hasil pemantauan kualitas air dengan menggunakan aplikasi IKLH menunjukkan Indeks Kualitas air (IKA) Provinsi Jambi untuk Tahun 2025 sebesar 67,49.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2016-2025

Tahun	Indeks Kualitas Air	
	Target	Realisasi
2016	52,24	54
2017	52,26	57,11
2018	52,28	81,21
2019	52,30	58,49
2020	52,32	56,75
2021	52,34	48,96
2022	61,19	49,49
2023	61,29	46,06
2024	61,39	55,58
2025	61,49	67,49
2025	69,78	67,49

Sumber : Aplikasi IKLH, Tahun 2016-2025

Angka IKA Provinsi Jambi tahun 2025 (67,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 (55,58) sebesar 11,91 poin dengan selisih capaian 6,18%. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2025 belum mencapai target antara lain :

1. Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
2. Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
3. Deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
4. tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan.

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan

kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Angka indeks kualitas air yang masih belum memenuhi target ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melaksanakan pemantauan kualitas air sungai di 16 titik pantau;
- b. memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah; dan
- c. menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional dan Surat Edaran tentang Tata Kelola Sampah di Provinsi Jambi.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :

- a. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air;
- b. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
- c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air
- d. limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
- f. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air; dan
- g. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2025 belum mencapai target antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik)
- Deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi
- Tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan liar (PETI).



Aktivitas PETI Berdampak pada Kualitas Air Sungai Batang Hari

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut.

Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.



Kerusakan Daerah Aliran Sungai Akibat PETI

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melaksanakan pemantauan kualitas air sungai di 16 titik pantau (APBD) dan 16 titik pantau (APBN)
2. memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah.
3. menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota
4. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari.
5. menyusun draft baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

domestik dan USK khususnya untuk masyarakat

4. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, dan
6. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

INDEKS KUALITAS AIR LAUT

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah.

Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

- a. melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut
- b. melakukan pemantauan sampah laut

- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan dan daur ulang
- d. mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa industri mematuhi standar pembuangan limbah yang aman

Tabel 3.26. Perbandingan Target IKAL

Tahun	Indeks Kualitas Air Laut	
	Target	Realisasi
2021	76,54	83,58
2022	77,19	81,67
2023	77,84	70,69
2024	78,49	83,01
2025	79,14	82,27
2025	70,80	82,27

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 82,27 poin di atas target tahun ini yakni 79,14 poin atau sebesar 103,96% untuk periode Renstra Tahun 2021-2026. Sementara itu, capaian IKAL Tahun 2025 sebesar 82,27 poin yang melebihi target 70,80 pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,74 poin dari 83,01 pada tahun 2024 menjadi 82,27 pada tahun 2025.

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

1. melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut
2. melakukan pemantauan sampah laut
3. melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan dan daur ulang
4. mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa industri mematuhi standar pembuangan limbah yang aman.

INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Provinsi Jambi sendiri memiliki luasan lahan gambut mencapai 700.000 ha, dengan luasan yang rentan terbakar hampir 200.000 ha. Kondisi lahan gambut di Provinsi Jambi menjadi perhatian

serius mengingat potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya.

Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.



Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :
 - a. Terdapat drainase buatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
2. Fungsi Budidaya :
 - a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter dibawah permukaan gambut pada titik penaatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Penurunan kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasan tutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan. Perhitungan IKEG belum memasukan komponen intervensi pemulihan yang telah dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola air dan rehabilitasi revegetasi,

- c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan

3. Fungsi Budidaya :

- a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan
- b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Tabel 3.27. Capaian Kinerja 2021-2025 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	
	Target	Realisasi
2021	73,39	71,10
2022	73,89	64,09
2023	74,39	64,09
2024	74,89	64,09
2025	75,39	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2025, 2026

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG yakni :

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang di dalamnya terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

baik di lokasi konsesi maupun di APL, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD).

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari:
 - a. Rencana Pemanfaatan
 - b. Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - c. Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Jambi Tahun 2024-2053 dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 995/KEP.GUB/DLH3/2024 tentang Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Jambi Tahun 2024-2053.

RPPEG merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPEG Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya masing-masing.

RPPEG Provinsi Jambi selain akan menjadi pedoman dalam pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi, juga menjadi pedoman bagi kabupaten yang memiliki kawasan ekosistem gambut untuk membuat RPPEG Kabupaten. RPPEG penting untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut maupun untuk pemulihan ekosistem gambut yang terlanjur telah rusak.

3. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.
4. Penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat (Pokmas) serta melakukan penguatan kelembagaan antar desa melalui fasilitasi untuk kerjasama antar desa. Pokmas yang dibentuk merupakan Pokmas yang bergerak pada kegiatan pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sejumlah 15 Pokmas (Laporan Kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).
5. Dukungan komitmen dan partisipasi aktif dengan masyarakat serta berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga, memulihkan dan mengelola kembali ekosistem gambut.
6. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan edukasi restorasi/pemulihan gambut. Restorasi gambut merupakan bagian integral dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di lahan gambut.
7. Pelaksanaan penanaman pohon di lahan basah.

Sejak tahun 2021 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Pengelolaan Hutan
10. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
11. Program Pendidikan, Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
13. Program Penanggulangan Bencana

Faktor Penghambat :

1. Deforestasi dan Berkurangnya Tutupan Hutan hutan primer menurunkan fungsi penahan air dan memicu kerusakan lingkungan.
2. Pencemaran Kualitas Air Sungai mengakibatkan penurunan mutu air sungai akibat aktivitas domestik dan industri.
3. Pencemaran Udara (ISPU Tinggi) pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sering kali mencapai kategori tidak sehat akibat kebakaran hutan atau emisi kendaraan.
4. Alih Fungsi Lahan (Rakus Lahan) terhadap penggunaan lahan yang tidak terkendali meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.
5. Kurangnya Alat Pemantau Lingkungan sebagai kebutuhan sarana pengawasan yang lebih representatif untuk DLH

Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan menindak tegas pelanggar lingkungan serta meningkatkan sarana prasarana pengawasan (kendaraan dinas, laboratorium).
2. Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dengan melakukan penanaman kembali dan menjaga sisa tutupan hutan primer untuk mengembalikan fungsi ekologis.
3. Pengendalian Pencemaran Udara dan Air melalui instrumen pajak bahan bakar (PBBKB) untuk mengontrol emisi dan pemantauan ketat kualitas sungai.
4. Penerapan Eco-Office dalam melaksanakan penghematan energi (listrik, air, kertas) di instansi pemerintah untuk mengurangi jejak karbon.
5. Edukasi Lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan

**INDIKATOR KINERJA :
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
(GRK) BERBASIS LAHAN**

Hutan adalah sumberdaya alam yang multifungsi. Dalam kaitannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO₂ di udara dan memperangkapnya dalam bentuk biomassa hutan. Hutan klimaks ada dalam keseimbangan dinamik yang tidak lagi berfungsi mengurangi kadar CO₂. Jika dilakukan penebangan dengan cara yang benar, misalnya dengan tebang pilih yang mengikuti aturan, kerusakan yang terjadi adalah minimum. Pohon ditempat yang ditebang itu dipicu untuk tumbuh. Nisbah fotosintesis dan respirasi (P/R) naik sampai tercapai lagi keseimbangan. Oleh karena itu, jika penebangan dilakukan dengan baik akan menguntungkan dalam usaha penangkalan pemanasan global.

Reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO₂ akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa dalam hutan yang rusak. Apabila hutan yang rusak itu telah menjadi padang rumput. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO₂ di udara. Akan tetapi pada umumnya biomassa hutan tanaman itu lebih rendah jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan alam primer yang semula ada di tempat tersebut. Dengan demikian hutan tanaman sulit untuk dapat sepenuhnya mengembalikan kadar CO₂ udara pada tingkat seperti hutan klimaks, walaupun diproduksi bahan awet dari hutan tanaman. Apabila hutan tanaman dapat mengalihkan para peladang menjadi non-peladang, hutan yang

rusak yang semula dipakai untuk perladangan akan dapat pulih secara alamiah.

Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCo₂e¹— setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi, Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO₂e menjadi 74 MtCO₂e.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerja sama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui kegiatan *Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL) – Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai *trustee*.

Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 – 2021), Fase *pre investment* 2021 – 2025) dan Fase *Result Based Payment* (2021 - 2025).

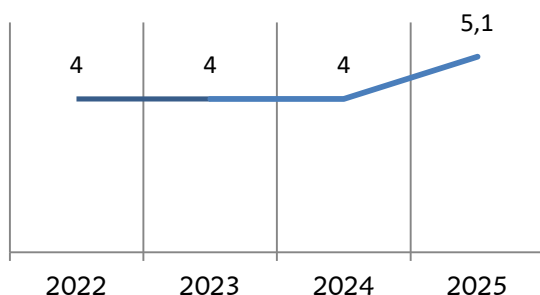
Saat ini proyek dimaksud dalam masa pre Investment untuk mendukung dan memperkuat kelembagaan, menyusun kebijakan dan intervensi penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk menurunkan emisi termasuk prioritas manfaat non karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan kegiatan ekosistem

lainnya, meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat, mengurangi konflik tenurial dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan kerangka kerja penurunan emisi termasuk pembagian manfaat di Provinsi Jambi.

Tabel 3.28. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Berbasis Lahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian		
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Berbasis Lahan	31,683 JtTon CO ₂ eq	4 JtTon CO ₂ eq	4 JtTon CO ₂ eq	5,1 JtTon CO ₂ eq	5,1 JtTon CO ₂ eq	100	3,541	NA
* Biomassa permukaan tanah, Biomassa hidup bawah permukaan tanah, bahan organik mati, emisi karbon dari kebakaran								

Grafik 3.6. Trend Kemampuan Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca



Sumber : Tim BIOCF Bappeda Provinsi Jambi, 2025

Salah satu dokumen menjadi syarat negosiasi *Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA) adalah dokumen *Emission Reduction Program Document* (ERPD) yang saat ini sedang dalam tahap validasi oleh World Bank. Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (safeguard) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program.

Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak

masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi. Oleh karenanya, di tahap ini BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah memfinalkan dokumen safeguards yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi. Safeguard documents yang dimaksud terdiri dari Strategic Environmental and Social Assessment (SESA),

Environmental and Social Management Framework (ESMF) termasuk dokumen Indigenous People Planning Framework (IPPF), Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), dan Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF) serta dokumen *Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM) dan Stakeholder Engagement Plan (SEP).

Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bermaksud untuk mempublikasikan dokumen-dokumen Safeguard dimana dokumen dimaksud

telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019 dan berbagai konsultasi dengan para stakeholder di Provinsi Jambi selama kegiatan tahun 2019 – 2025.

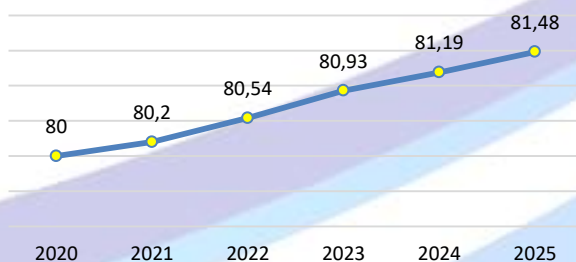
Dalam rangka penurunan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah strategis dengan memonitor dan optimalisasi capaian sasaran-sasaran jangka menengah pendukungnya antara lain : Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya.

Sasaran ini dicapai melalui program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan : Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi



Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On Internasional Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.

Grafik 3.7. Peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya

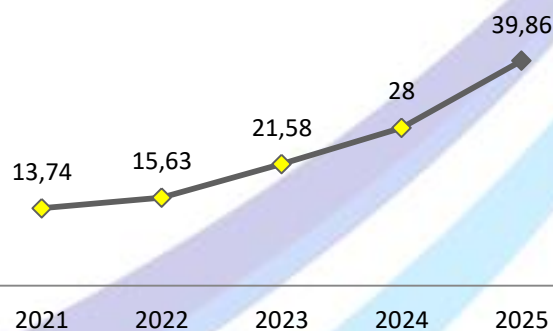


Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2025, 2026

Selain pemulihan dan perlindungan SDA hayati beserta ekosistemnya, turut pula diintervensi upaya Peningkatan Pemanfaatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal. Sasaran ini dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Pada tahun 2025, peningkatan pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal mencapai angka 39,86%. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pembinaan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan perhutanan sosial yang berdampak langsung pada optimalisasi pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Capaian luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.8. Luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara Optimal



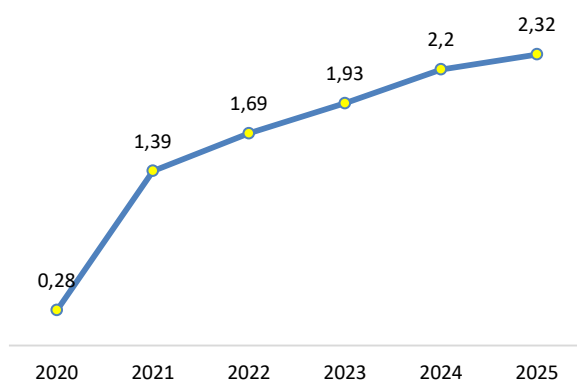
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2025, 2026

Upaya strategis turut pula dilakukan guna menekan angka emisi *carbon*. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan perluasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII

Capaian luasan tutupan lahan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.9. Persentase Luas Tanam Lahan kritis 2020 - 2025



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2025, 2026

Tingginya capaian pada sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi dikarenakan capaian penanaman pada tahun sebelumnya melebihi target yang didukung oleh kegiatan kompensasi pinjam pakai Kawasan yang pembinaan dan monitoringnya didanai dari APBD Provinsi. Selain itu, Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik melalui penanaman, pemeliharaan, maupun keterlibatan masyarakat dalam upaya pemulihan lahan kritis.



Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan sampai tahun 2025 sebesar 2,32% dari target yang ditetapkan karena terjadi peningkatan luas penanaman lahan kritis dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang IUPKH sebagai kompensasi pinjam pakai kawasan hutan dengan penambahan rehabilitasi pada tahun 2024 seluas 415 Ha.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- Relatif terbatasnya dukungan anggaran yang disediakan
- Kurangnya Jumlah personil pengamanan (polhut) dan brigade kebakaran
- Kurangnya sarana dan prasarana

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas perencanaan pemulihan ekosistem, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjamin keberlanjutan hasil pemulihan dan perlindungan sumber daya alam hayati.
- Optimalisasi peningkatan pendampingan kepada kelompok perhutanan sosial, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha guna mendorong pengelolaan perhutanan sosial yang lebih produktif dan berkelanjutan.

3. Peningkatan pemeliharaan hasil rehabilitasi, peningkatan kualitas tanaman, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hasil rehabilitasi agar keberlanjutan penurunan lahan kritis dapat terjaga.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hutan serta illegal pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni dan Instansi-Instansi vertikal lainnya).
5. Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNBPN PSDH dan Dana Reboisasi.

Upaya peningkatan karbon terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, pada tahun 2023 Gubernur Jambi ditunjuk menjadi pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI)

Penunjukkan tersebut dalam rangka implementasi Surat Keputusan KLHK Nomor SK: 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Inonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Dalam pemaparannya "Strengtening of Sub National Policies as the Real Action for

Reducing Emission Greenhouse Gas in FOLU Sectors", Gubernur Jambi menyampaikan strategi Pemerintah Provinsi Jambi yang terus fokus pada upaya dan intervensi penurunan emisi gas rumah kaca.

Jambi mempunyai ekosistem hutan dan lahan yang paling lengkap di Pulau Sumatera. Pemerintah Provinsi Jambi beserta Kabupaten/Kota mempunyai komitmen yang kuat dan mempunyai kelembagaan REDD+, serta konsistensi pada kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, konflik, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Kelembagaan.

Provinsi Jambi memiliki prioritas REDD+ yang mempunyai progres dalam penyiapan perangkat, inisiatif dan kolaborasi intervensi perencanaan lintas sektor, sehingga Jambi menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen untuk mengurangi tingkat deforestasi tinggi, degradasi hutan dan lahan.

Provinsi Jambi memiliki 3 pilar strategi pertumbuhan ekonomi hijau. Pertama, penggunaan tata guna lahan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan produktivitas. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses modal pembangunan dan mata pencaharian serta pemanfaatan jasa lingkungan. Terakhir, konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.

Sehingga, target yang ingin dicapai dari strategi tersebut yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; pertumbuhan yang inklusif dan adil; ketahanan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; ekosistem yang sehat dan produktif sebagai penyedia jasa lingkungan; dan penurunan efek gas rumah kaca.



Gambar 3.7. Gubernur Jambi menjadi Pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA)

Selain itu masyarakat lebih sejahtera dengan lingkungan yang baik, pendapatan masyarakat lebih tinggi, pertanian yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta hutan yang lestari berdampak pada implementasi perhutanan sosial dan masyarakat hukum adat yang lebih baik dan sejahtera.

Kemudian dalam rangka mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yaitu target penurunan emisi gas rumah kaca, Provinsi Jambi melalui Program/aksi Nyata Penurunan Emisi salah satunya Program J-SLMP BioCF-ISFL, telah disinergikan ke dalam Perencanaan Jangka Panjang (RPJP dan RTRW), Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Jambi).

Provinsi Jambi tetap konsisten dengan program dan kegiatan yang diimplementasikan melalui Perangkat daerah, Mitra Kerja Daerah, Private Sector dan Kelompok Masyarakat dalam upaya pemenuhan target Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi dan tujuan akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi GRK Indonesia serta memberikan dampak kesejahteraan masyarakat,

Untuk itu, diperlukan dukungan strategis pencapaian target optimal penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Jambi yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut : pertama meningkatkan supporting pembiayaan dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Jambi; kedua kolaborasi program dan kegiatan dalam mendukung perlindungan ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui peran multi pihak.

Provinsi Jambi telah mempersiapkan Dokumen Grand Growth Planning (GGP) sebagai pedoman intervensi kegiatan dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di tingkat tapak; mendorong program-program yang berkaitan dengan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Jambi; meningkatkan peran kelembagaan perubahan iklim lintas sektor yang didukung oleh Lembaga-Lembaga Donor Internasional; terakhir mendukung kebijakan Provinsi Jambi dalam membangun Kebijakan Satu Peta.

Provinsi Jambi secara geografis terdiri dari dataran tinggi, menengah dan rendah yang terbentang dari barat ke timur, secara ekologis memiliki empat taman nasional dengan luas kawasan hutan seluas lebih dari 2.098.535 hektar atau sekitar 45 persen. Dengan cukup luas dan kompleksnya kawasan hutan di Provinsi Jambi tersebut serta tingginya deforestasi yang terjadi, maka Provinsi Jambi berkomitmen dan fokus untuk melakukan intervensi perubahan iklim, salah satunya

dengan adanya kelembagaan REDD+, dan melakukan kebijakan pencegahan upaya kebakaran hutan dan lahan, penanganan konflik serta Pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Dalam melakukan intervensi penurunan emisi daerah Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang diintegrasikan dengan pembangunan rendah karbon yang merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga, Provinsi Jambi dengan dukungan lembaga non pemerintah telah menyusun Masterplan (Rencana Induk) Peta Jalan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi Tahun 2021-2045, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) Provinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional, hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan Program BioCF-ISFL dan kontribusi para pihak dalam pembiayaan program penurunan emisi GRK, dimana Program BioCF ISFL Provinsi Jambi Tahun 2022-2025 merupakan dana hibah dari World Bank (Bank Dunia).

Saat ini, program BioCF-ISFL kita telah memasuki tahapan Pra-Investasi dengan menggunakan metode On Granting dalam menghasilkan manfaat Penurunan Emisi dengan manfaat yang diperoleh tidak hanya berkontribusi bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat, sehingga nantinya target pertumbuhan ekonomi Hijau Provinsi Jambi dapat tercapai dan terwujud.

Faktor Penghambat :

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan di Jambi berfokus pada mitigasi deforestasi, degradasi hutan, dan pengelolaan lahan gambut melalui program seperti BioCF-ISFL, dengan target 10 juta ton. Masalah utama meliputi :

1. Deforestasi dan Degradasi Hutan pada konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan yang tidak terencana.
2. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terutama pada lahan gambut, yang melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar.
3. Tumpang Tindih Lahan terhadap konflik penggunaan lahan akibat data spasial yang belum tersinkronisasi.
4. Praktik Pertanian/Perkebunan Kurang Ramah Lingkungan dalam pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan degradasi.

Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Program BioCF-ISFL (BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes) skema insentif untuk menjaga hutan, mempromosikan agroforestri, dan pertanian ramah lingkungan.
2. Perhutanan Sosial dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi perambahan.
3. Restorasi Lahan Terdegradasi dan Gambut dengan memperbaiki ekosistem gambut untuk mencegah emisi lanjutan.
4. Sinkronisasi Data (Satu Peta) guna mempercepat kebijakan satu peta di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengatasi tumpang tindih.
5. Green Growth Plan (GGP) dalam penguatan pertumbuhan ekonomi hijau yang didukung oleh BPD LH.
6. Penguatan Tata Kelola KPH sebagai optimalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menjaga kawasan

SASARAN STRATEGIS 5 :

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator Kinerja :

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

INDIKATOR KINERJA :**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.



Tabel 3.29. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,13	4,53	4,48	4,38	4,08	107,35	4,2	5,86
* Didukung oleh informasi : Jumlah Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja								

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025 sebanyak 1,94 juta orang, naik 5,26 ribu orang dibanding Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,05 persen poin dibanding Agustus 2025. Penduduk yang bekerja sebanyak 1,86 juta orang, naik sebanyak 8,38 ribu orang dari Agustus 2025. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pengangkutan dan pergudangan sebesar 3,72 ribu orang. Sebanyak 808,9 ribu orang (43,5 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 2,24 persen poin dibanding Agustus 2025. Persentase setengah pengangguran turun sebesar 18,98 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 5,37 persen poin dibanding Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) November 2025 sebesar 4,08 persen, turun sebesar 0,17 persen poin dibanding Agustus 2025.

PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Jambi. Pada November 2025 ada sebanyak 2,84 juta orang yang masuk dalam kategori penduduk usia kerja, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 9,91 ribu orang jika dibanding Agustus 2025. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, dimana secara jumlah berada pada angka 1,94 juta orang, sisanya ada sebanyak 899,4 ribu orang yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada November 2025 terdiri dari 1,86 juta orang penduduk yang bekerja dan 79,22 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2025, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 5,26 ribu orang. Adapun penduduk bekerja menunjukkan kenaikan sebesar 8,38 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 3,12 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2025. TPAK pada November 2025 berada pada angka 68,32 persen, atau turun 0,05 persen poin dibanding Agustus 2025. TPAK adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada November 2025 TPAK laki-laki sebesar 85,89 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang berada pada angka 50,23 persen. Dibandingkan Agustus 2025, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen poin, sedangkan TPAK perempuan turun sebesar 0,39 persen poin.

Tabel 3.30. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2024–November 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	November 2025	Perubahan Ags 2025–Nov 2025	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2,77	2,79	2,81	2,83	2,84	9,91	0,35
Angkatan Kerja	1,86	1,92	1,88	1,93	1,94	5,26	0,27
- Bekerja	1,77	1,83	1,80	1,85	1,86	8,38	0,45
- Pengangguran	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	-3,12	-3,79
Bukan Angkatan Kerja	0,91	0,87	0,92	0,89	0,90	4,65	0,52
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,09	68,87	67,11	68,37	68,32	-0,05	
- Laki-Laki	85,16	86,04	85,43	85,60	85,89	0,28	
- Perempuan	48,43	51,17	48,22	50,63	50,23	-0,39	

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

KARAKTERISTIK PENDUDUK YANG BEKERJA

Karakteristik Penduduk yang Bekerja

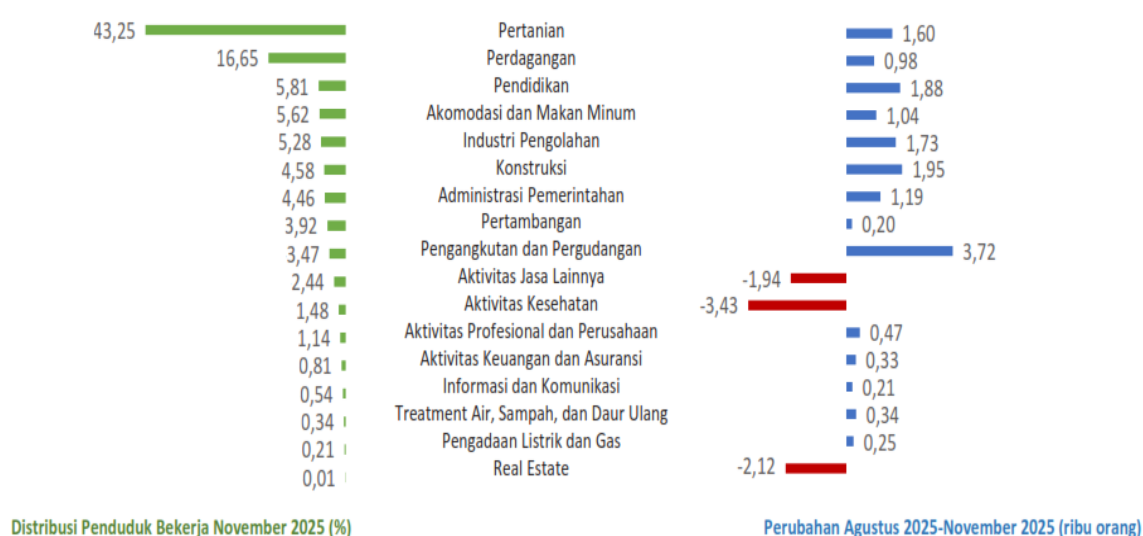
Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu terakhir.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas November 2025, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 43,25 persen, adapun sektor Perdagangan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 16,65 persen dan sektor Pendidikan menyerap sebesar 5,81 persen tenaga kerja.

Dibandingkan Agustus 2025, beberapa lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan, antara lain lapangan pekerjaan Pengangkutan dan Pergudangan (3,72 ribu orang), Konstruksi (1,95 ribu orang), Pendidikan (1,88 ribu orang), Industri Pengolahan (1,73 ribu orang), serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,60 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan Aktivitas Kesehatan turun sebesar 3,43 ribu orang, Real Estate turun sebesar 2,12 ribu orang serta Jasa Lainnya turun 1,94 ribu orang.

Diagram 3.7. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, November 2025



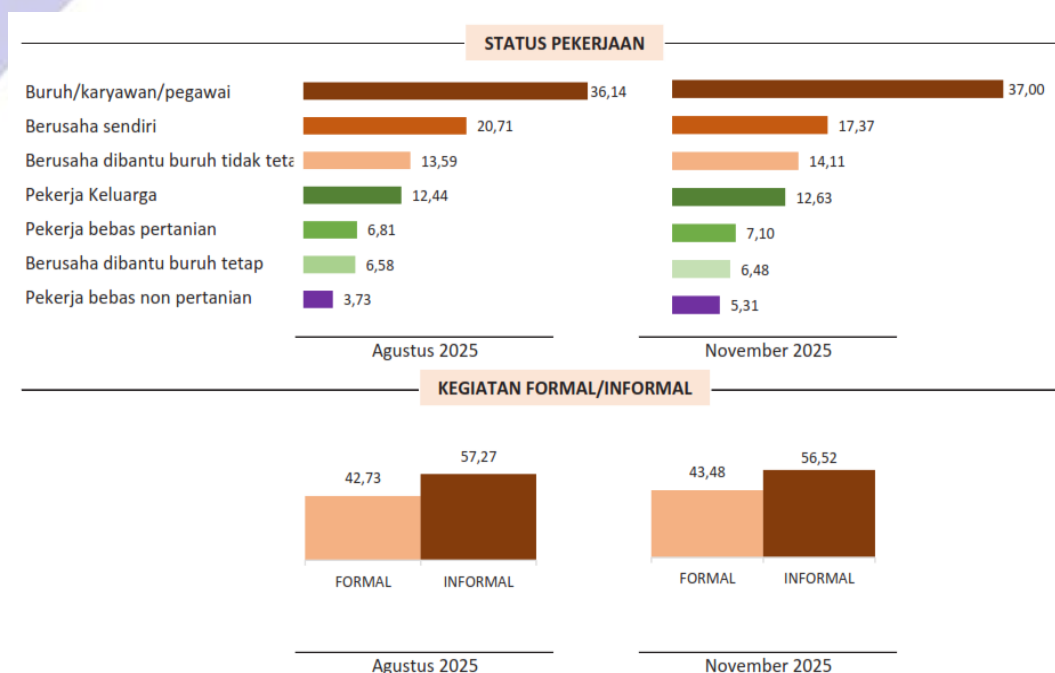
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, (2026)

Pada November 2025 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 37 persen, sementara yang paling kecil adalah pekerja bebas non pertanian sebesar 5,31 persen. Dibandingkan Agustus 2025, status berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, serta pekerja keluarga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,28 persen poin, 2,84 persen poin, 4,63 persen poin, 43,25 persen poin, serta 2,03 persen poin. Status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah berusaha sendiri serta berusaha dibantu buruh tetap, yaitu turun masing-masing sebesar 15,76 persen poin dan 1,08 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan status buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada November 2025, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1.051,32 ribu orang (56,52 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 808,93 ribu orang (43,48 persen). Dibandingkan Agustus 2025, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen poin.

Diagram 3.8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2025–November 2025



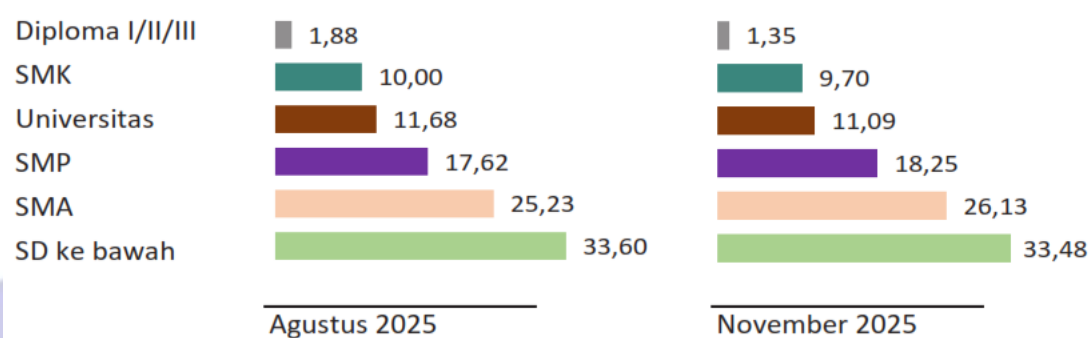
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada November 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 33,48 persen. Sementara penduduk berpendidikan tinggi atau yang menamatkan pendidikan Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 12,44 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2025.

Dibandingkan dengan Agustus 2025, penduduk bekerja berpendidikan SMP dan SMA mengalami peningkatan persentase masing-masing sebesar 4,04 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMK, Diploma I/II/III, dan Universitas masing-masing turun sebesar 2,57 persen poin, 27,91 persen poin, dan 4,56 persen poin.

Diagram 3.9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2025–November 2025

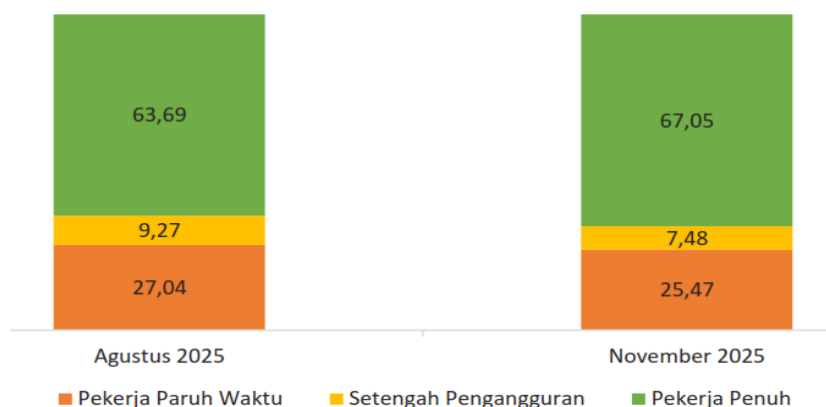


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 67,05 persen pada November 2025. Sementara 32,95 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2025, pekerja penuh mengalami kenaikan sebesar 5,75 persen poin.

Diagram 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2025–November 2025

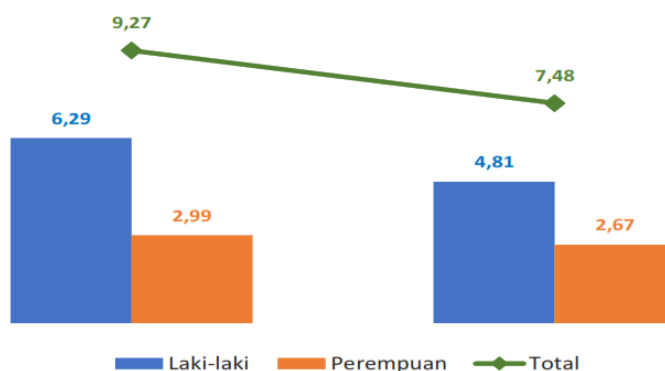


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada November 2025 sebesar 7,48 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 7 sampai 8 orang berstatus setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran pada November 2025 mengalami penurunan sebesar 18,98 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025.

Diagram 3.11. Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2025–November 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

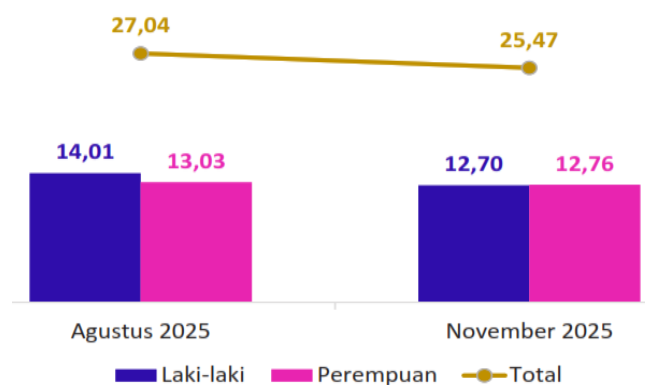
Pada November 2025, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 4,81 persen dan perempuan sebesar 2,67 persen. Dibandingkan Agustus 2025 tingkat setengah pengangguran laki-laki mengalami penurunan sebesar 23,15 persen poin, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan turun sebesar 10,20 persen poin.

Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Provinsi Jambi pada November 2025 tercatat sebesar 25,47 persen, yang berarti dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 25 sampai 26 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu mengalami penurunan 5,37 persen poin.

Pada November 2025, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki sebesar 12,70 persen, hampir sama dengan pekerja paruh waktu perempuan yang berada pada angka 12,76 persen. Dibandingkan Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu untuk laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,9 persen poin dan 1,57 persen poin.

Diagram 3.12. Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2025–November 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

KARAKTERISTIK PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanaftkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas November 2025 adalah sebesar 4,08 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang pengangguran. Pada November 2025, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,17 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025.

Pada November 2025, angka TPT laki-laki sebesar 3,62 persen, lebih rendah dibandingkan angka TPT perempuan yang mencapai 4,9 persen. Dibandingkan Agustus 2025, TPT laki-laki mengalami penurunan 0,42 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (4,47 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (3,83 persen). Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin, sedangkan TPT perdesaan naik 0,38 persen poin.

Tabel 3.31 Karakteristik Pengangguran, Februari 2024–November 2025

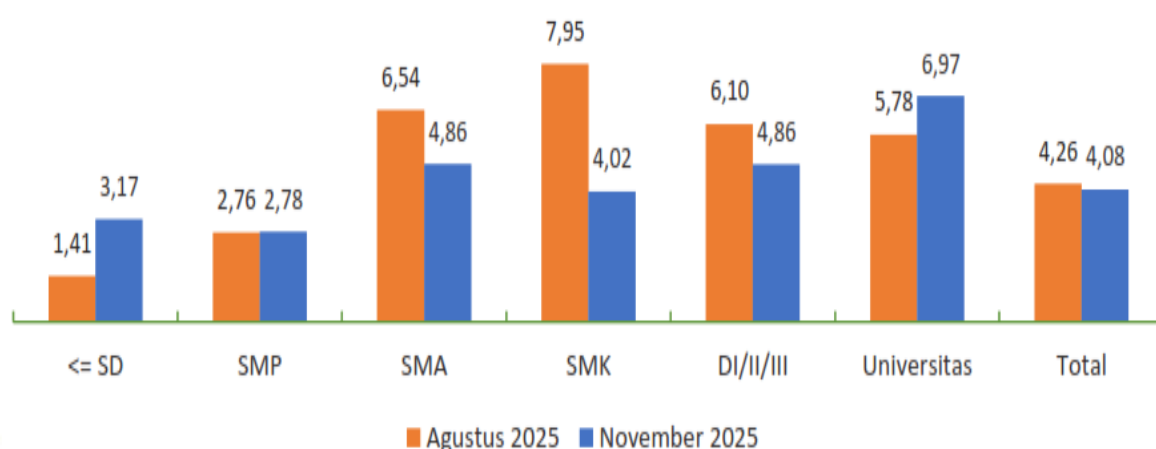
Karakteristik Pengangguran	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	November 2025	Perubahan Ags 2025–Nov 2025
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,45	4,48	4,48	4,26	4,08	-0,17
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-Laki	4,39	2,68	4,98	4,04	3,62	-0,42
- Perempuan	4,56	7,62	3,58	4,63	4,90	0,27
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal						
- Perkotaan	4,70	5,93	5,80	5,56	4,47	-1,09
- Perdesaan	4,31	3,66	3,67	3,45	3,83	0,38
TPT Menurut Pendidikan						
<= SD	1,99	2,53	2,01	1,41	3,17	1,75
SMP	4,06	3,24	1,81	2,76	2,78	0,03
SMA	7,60	6,80	7,42	6,54	4,86	-1,67
SMK	5,86	5,82	6,86	7,95	4,02	-3,93
DI/II/III	5,54	5,96	2,40	6,10	4,86	-1,24
Universitas	4,80	5,95	6,12	5,78	6,97	1,19

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Pola pengangguran menurut tingkat pendidikan menunjukkan pada November 2025 TPT dari tamatan Universitas merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, dengan capaian sebesar 6,97 persen, sedangkan pengangguran lulusan Diploma I/II/III mencapai 4,86 persen dan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 4,86 persen. Sementara itu TPT yang paling rendah adalah pendidikan SMP, yaitu sebesar 2,78 persen.

Dibandingkan Agustus 2025, penurunan TPT terjadi pada tingkat pendidikan SMK, SMA dan Diploma I/II/III dengan penurunan terbesar pada yang berpendidikan SMK yaitu sebesar 3,93 persen poin. Sementara itu, lulusan SMA dan Diploma I/II/III mengalami penurunan TPT masing-masing yakni sebesar 1,24 persen poin serta 1,67 persen poin.

Diagram 3.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2025–November 2025

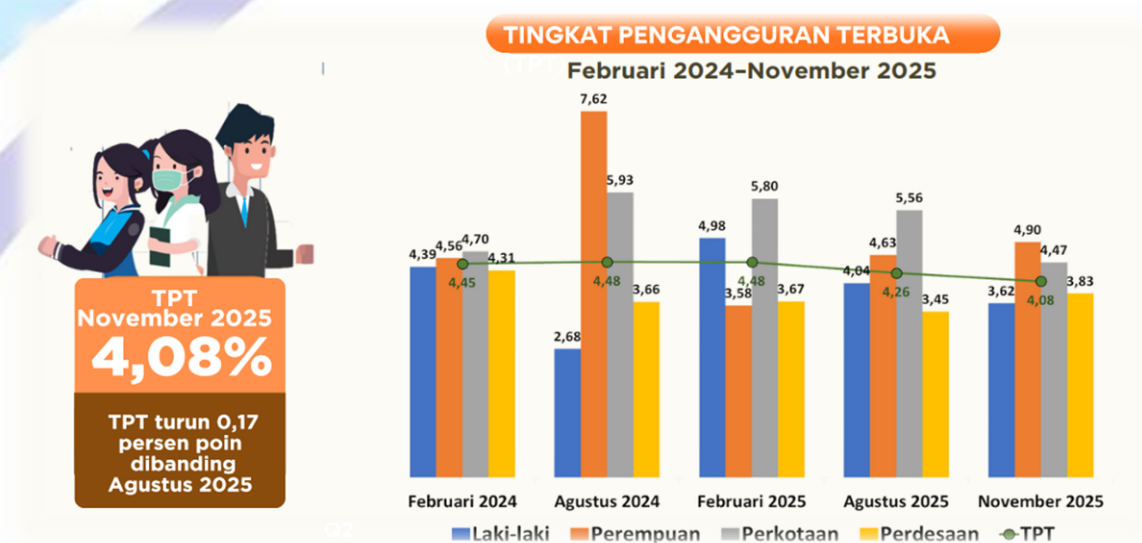


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Tabel 3.32. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Indonesia, Februari 2024–November 2025

Provinsi	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025	November 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,56	5,75	5,50	5,64	5,60
Sumatera Utara	5,10	5,60	5,05	5,32	5,28
Sumatera Barat	5,79	5,75	5,69	5,62	5,52
Riau	3,85	3,70	4,12	4,16	4,06
Jambi	4,45	4,48	4,48	4,26	4,08
Sumatera Selatan	3,97	3,86	3,89	3,69	3,59
Bengkulu	3,17	3,11	3,24	3,41	3,37
Lampung	4,12	4,19	4,07	4,21	4,14
Kepulauan Bangka Belitung	3,85	4,63	4,17	4,45	4,30
Kepulauan Riau	6,94	6,39	6,89	6,45	6,35
DKI Jakarta	6,03	6,21	6,18	6,05	6,31
Jawa Barat	6,91	6,75	6,74	6,77	6,66
Jawa Tengah	4,39	4,78	4,33	4,66	4,32
D.I. Yogyakarta	3,24	3,48	3,18	3,46	3,30
Jawa Timur	3,74	4,19	3,61	3,88	3,71
Banten	7,02	6,68	6,64	6,69	6,63
Bali	1,87	1,79	1,58	1,49	1,45
Nusa Tenggara Barat	3,30	2,73	3,22	3,06	3,05
Nusa Tenggara Timur	3,17	3,02	3,23	3,31	3,10
Kalimantan Barat	4,20	4,86	4,23	4,82	4,63
Kalimantan Tengah	3,67	4,01	3,47	3,97	3,44
Kalimantan Selatan	3,89	4,20	3,94	4,16	4,10
Kalimantan Timur	5,75	5,14	5,33	5,18	5,20
Kalimantan Utara	4,01	3,90	3,90	3,85	3,83
Sulawesi Utara	5,98	5,85	6,03	5,99	5,78
Sulawesi Tengah	3,15	2,94	3,02	2,92	2,89
Sulawesi Selatan	4,90	4,19	4,96	4,21	4,45
Sulawesi Tenggara	3,22	3,09	3,27	3,31	3,33
Gorontalo	3,05	3,13	3,12	3,42	3,23
Sulawesi Barat	3,02	2,68	3,17	2,86	3,01
Maluku	5,96	6,11	5,95	6,27	6,11
Maluku Utara	4,16	4,03	4,26	4,55	4,44
Papua Barat	4,31	4,13	4,21	4,55	4,34
Papua Barat Daya	6,02	6,48	6,61	6,85	6,56
Papua	5,81	6,48	6,92	6,96	7,08
Papua Selatan	4,75	4,05	4,90	4,04	3,89
Papua Tengah	2,49	2,75	3,55	3,62	3,74
Papua Pegunungan	1,18	1,32	1,68	1,68	1,55
Indonesia	4,82	4,91	4,76	4,85	4,74

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang Sangat tinggi pada Tahun 2025. Capaian ini menyumbang sebanyak 34,9% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2025 sebesar 30,00 % dan Capaian pada 2025 sebesar 115%, kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2025 ini cukup baik, seiring berakhirnya covid - 19, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 2.027 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi sebanyak 5.802 orang, untuk tahun 2025 terjadinya peningkatan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendaftar.



Penempatan tenaga kerja seiring dengan peningkatan kualitas tenaga kerja di Provinsi Jambi. Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada Tahun 2025. Capaian ini menyumbang sebanyak 5,44% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2025 sebesar 5,30% dan Capaian pada 2025 sebesar 103%, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi sebanyak 2.340 orang dari Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2025 Provinsi Jambi dengan jumlah 43.027 orang. Untuk Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas sebesar 5,51% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,5%.

Selain itu, capaian kinerja diatas tidak terlepas dari kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan yang diimplementasikan. Capaian kinerja Kepatuhan terhadap norma-norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada Tahun 2025. Capaian ini menyumbang sebanyak 126% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2025 sebesar 78% dan Capaian pada 2025 sebesar 98,60%, dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 15.544 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Perusahaan sebanyak 15.775 Perusahaan. Capaian persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan sebesar 15,76% , atau 160% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 9,8%, dengan jumlah perusahaan yang telah terbentuk bipartit sebanyak 170 perusahaan dari jumlah perusahaan yang memenuhi Kriteria sebanyak 1.078 Perusahaan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dengan upaya mencapai pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
5. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
6. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
7. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
8. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
10. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
11. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Penempatan Tenaga Kerja
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Faktor Penghambat :

1. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah di Provinsi Jambi belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tuntutan industri. Hal ini sering kali disebabkan oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah atau kurangnya akses terhadap program pelatihan vokasional yang relevan.
2. Ketidakseimbangan Jumlah Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja dalam Pertumbuhan jumlah angkatan kerja sering kali lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja baru yang tersedia, yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran.
3. Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata pada konsentrasi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja cenderung terpusat di daerah perkotaan (seperti Kota Jambi), sementara daerah pedesaan atau tertinggal masih minim kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan ketenagakerjaan antar wilayah di dalam provinsi.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yang Rendah menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja perempuan masih terbatas.
5. Ketergantungan pada Sektor Informal pekerja masih berada di sektor informal, yang sering kali ditandai dengan kurangnya perlindungan sosial, jaminan kerja, dan pendapatan yang tidak menentu. Program formalisasi diperlukan untuk membantu transisi ke pekerjaan formal.
6. Kondisi Lingkungan Kerja termasuk jaminan sosial tenaga kerja, di masa lalu sempat mengalami penurunan meskipun jaminan sosial secara umum membaik.

Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja guna perbaikan kondisi ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik di berbagai sektor akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang secara langsung berdampak positif pada IPK.
2. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang stabil atau meningkat di Provinsi Jambi merupakan indikator kesehatan ekonomi yang cenderung mendorong peningkatan aktivitas ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja.
3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang perlu ditingkatkan dalam jumlah perusahaan yang mendaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan (seperti BPJS Ketenagakerjaan) menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek perlindungan tenaga kerja, yang secara langsung meningkatkan nilai IPK.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup aspek pendidikan dan kesehatan, secara tidak langsung mempengaruhi kualitas angkatan kerja. Peningkatan IPM Jambi (yang mencapai 75,13 pada tahun 2025) berkorelasi positif dengan potensi peningkatan IPK di masa mendatang melalui peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
5. Pergeseran Tenaga Kerja Antar Sektor dari sektor informal ke sektor formal atau ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi juga dapat menjadi faktor pendorong peningkatan IPK.

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan

Indikator Kinerja :

INDEKS KETAHANAN PANGAN

INDIKATOR KINERJA : INDEKS KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Upaya pengendalian kerawanan pangan di Provinsi Jambi terus dilakukan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan berhasil meningkatkan indeks ketahanan pangan dari 74,94 di tahun 2024 menjadi 76,16 di tahun 2025 yang ditandai dengan penurunan jumlah kecamatan rentan rawan pangan dari awalnya 7 kecamatan menjadi 4 kecamatan.



Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan

dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Indeks Ketahanan, dengan capaian pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 3.33. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Ketahanan Pangan	70	72,17	74,94	74,5	76,16	102,22	75	76,20
* Didukung oleh Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari), Ketersediaan Pangan, Jumlah Penduduk, Kandungan Energi								

Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan kondisi Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari), Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun), Jumlah Penduduk (jiwa), serta kandungan energi.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 12 Tahun 2013.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat

dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2022, selama tahun 2023 sampai tahun 2025 tidak ada pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi karena keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013–2022 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan/ disalurkan sebanyak 310.046 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan, serta penyaluran bantuan kemanusiaan bagi provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh yang mengalami bencana banjir tahun 2025, sehingga stok Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 36.136 kg atau sebesar 28,63% dari idealnya CBP tahun 2025 sebanyak 126.180 kg (hasil penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi berdasarkan jumlah penduduk dan angka konsumsi beras).

Adapun rincian Kondisi Ketersediaan Pangan untuk konsumsi manusia (ton/tahun) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34. Ketersediaan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025

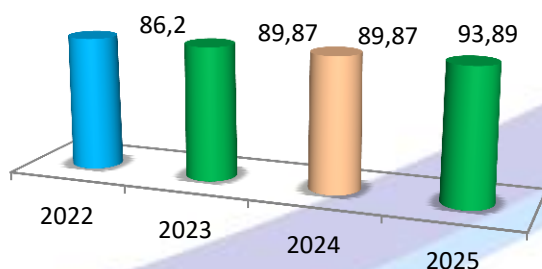
Jenis	Ketersediaan
Beras	600.387 ton/tahun
Jagung	12.409 ton/tahun
Kedelai	18.307 ton/tahun
Bawang Merah	27.049 ton/tahun
Bawang Putih	13.100 ton/tahun
Cabe Merah	50.830 ton/tahun
Cabe Rawit	18.968 ton/tahun
Daging Sapi	15.261 ton/tahun
Daging Ayam	44.467 ton/tahun
Telur Ayam	46.358 ton/tahun
Gula Pasir	49.686 ton/tahun
Minyak Goreng	51.499 ton/tahun

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2025, 2026

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 2,889 Kkal/Kap/Hari, hal ini mencapai kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Tidak tercapainya ketersediaan energi sebagaimana yang telah ditargetkan, dikarenakan terjadinya penurunan produksi gabah/ beras, dari produksi lokal.

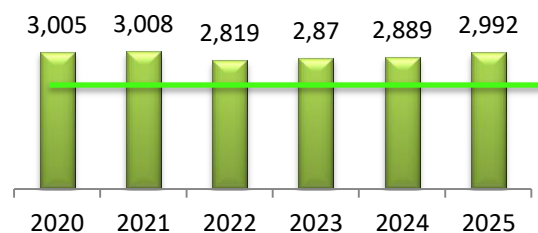
Perkembangan ketersediaan energi (kkal/kap/hari) guna Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal dilihat berdasarkan skor PPH ketersediaan, Ketersediaan Energi kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Diagram 3.14. Skor PPH Tahun 2025



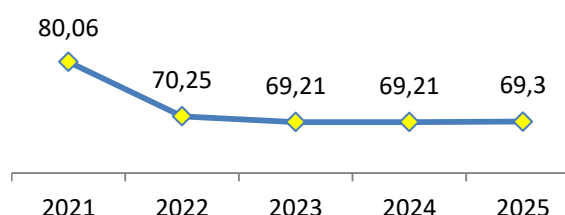
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025, 2026

Diagram 3.15. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025, 2026

Grafik 3.10. Ketersediaan Protein



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2025, 2026

Dari gambar diatas bahwa pada upaya capaian kinerja memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan, dengan target skor PPH ketersediaan sebesar 88,5 telah melebihi target, Ketersediaan Energi yakni sebesar 2,889 kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebesar 69,21 gr/kap/hr.

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan

Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).



Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)

Target konsumsi beras Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025 yakni 86,2 kg/kap/thn, berdasarkan hasil perhitungan tingkat konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sesuai data SUSENAS Tahun 2025, maka diperoleh jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 86,2 kg/kap/thn, hal ini dapat diartikan bahwa capaian realisasi Provinsi Jambi masuk kategori sangat baik atau sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Upaya untuk penurunan konsumsi beras pada Tahun 2025 tercapai dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi pangan penduduk kearah mengkonsumsi selain beras, seperti bergeser ke konsumsi gandum, tepung-tepungan selain beras.

IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 yakni sebesar 2.100 kkal/kap/hari. Berdasarkan kajian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2025 yakni sebesar 2.040 kkal/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 97,14% dengan kriteria penilaian sangat baik, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari)

Target terpenuhinya konsumsi protein Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025 yakni 62,5 gram/kap/hari dan telah terealisasi sebesar 60 gram/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 96% dan kriteria penilaian sangat baik.

Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan tentunya tidak terlepas dari upaya pengentasan kerawanan pangan Provinsi Jambi.

Persentase Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan

Salah satu indikator bahwa suatu wilayah dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik adalah diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah penduduk yang rawan pangan atau yang tahan pangan.

Kerawanan Pangan dapat diartikan apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, dan apabila konsumsi makanannya berada dibawah kalori minimum yang dibutuhkan.

Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan: yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi,

diperoleh gambaran bahwa Jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebesar 10,22% dari target 4,5%. Artinya untuk indikator Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan selama Tahun 2025 tidak terjadi penurunan, melainkan sebaliknya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 44,03% dari yang ditargetkan. Persentase Capaian Kinerja terkait persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan baru mencapai 55,97% dan termasuk kategori rendah.

Terjadinya kenaikan penduduk berisiko rawan pangan sebesar 5,72% diduga karena dampak dari kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi. Disamping itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran sebaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota atau ada keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi penduduk berisiko rawan pangan.

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Untuk indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, dengan realisasi sebesar 3,47% dari target sebesar 4,5% atau sebesar 129,68%. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2025, dari 143 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi, terdapat 4 (empat) kecamatan rentan pangan prioritas 4. Untuk kecamatan yang tahan pangan sebanyak 139 kecamatan, terdiri dari 2,169% atau sebanyak 3 kecamatan prioritas 5 dan sebesar 97,84% atau sebanyak 136 kecamatan prioritas 6. Jika dibandingkan tahun 2024, Indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, mengalami kenaikan, Dimana tahun 2024 Provinsi Jambi tidak ada kecamatan yang rawan pangan, namun tahun 2025 terdapat 4 kecamatan rawan pangan. Hal ini adanya keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi daerah rawan pangan, seperti kemiskinan, pengeluaran pangan, lama sekolah perempuan dan angka kesakitan.

Desa Mandiri Pangan

Untuk mencegah atau menurunkan kerawanan pangan ini maka Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penyediaan Protein Hewani dan Kegiatan Pemberian Bantuan terhadap daerah-daerah yang mengalami bencana alam berupa bantuan bahan pangan pokok yang diambilkan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Salah satu kegiatan nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (*Family Farming*). Pertanian keluarga atau *family farming* merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman pangan (padi dan jagung), Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura, serta produksi tanaman

Upaya Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Indikator persentase peningkatan produksi padi dengan target 2% terealisasi sebesar 30,88%, persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1% terealisasi sebesar 153,90%, persentase peningkatan produksi cabe merah dengan target 20% terealisasi sebesar 25,18%, dan persentase peningkatan produksi bawang merah dengan target 10% mengalami penurunan sebesar 71,87%.

Dari 4 indikator tersebut untuk indikator peningkatan produksi padi dan jagung tercapai sedangkan untuk produksi cabe mencapai target merah dan bawang merah belum melampaui target. Penyebab dari tercapainya target pada komoditi padi dan jagung karena didukung oleh kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat dan daerah terkait antisipasi darurat pangan. Selain

itu, perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi. Metodologi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

Sedangkan capaian Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 26.738 ton, mengalami peningkatan sebesar 16.207 ton atau sekitar 153,90% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 10.531 ton. Peningkatan produksi tanaman jagung di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh luas panen jagung sepanjang Januari hingga Desember 2025 yaitu sebesar 4.344 ton-JPK atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 mencapai 1.514 ton-JPK. Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 26.738 ton sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10.531 ton, secara total produksi jagung tahun pada tahun 2025 meningkat mencapai 253% dibanding tahun 2024.

Peningkatan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas. Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada tahun 2025 terjadi Refocusing anggaran pada anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.



Produksi tanaman hortikultura jenis cabai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1.714,570,68 kwintal pada tahun 2025 menjadi 2.146.288 kwintal. Terjadinya peningkatan produksi cabe merah dikarenakan adanya dukungan dari program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk daerah dalam bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi yaitu Bantuan benih cabe merah untuk pengembangan Kawasan cabe merah sebanyak 25 Ha diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota dan bantuan benih cabe merah 1 sachet (1 Ha) untuk paket percontohan cabe merah serta bantuan benih cabe rawit 1 sachet (0,5 Ha) untuk paket percontohan sayur-sayuran dan tanaman semusim. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fenomena dari inflasi yang menimbulkan tingginya harga cabe merah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat petani untuk membudidayakan komoditas cabe merah dan

rawit sehingga menjaga kestabilan harga cabe di pasaran. Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 122.876,65 kwintal pada tahun 2025 menjadi 218.559 kwintal. Pada komoditas bawang merah terjadi kenaikan produksi dikarenakan adanya bantuan sebanyak 2 Ha untuk pengembangan Kawasan bawang merah dan 200 kg (1 Ha) untuk paket percontohan bawang merah.

Sementara upaya strategis peningkatan Populasi sapi mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 1,02% dengan angka 114.060 ekor dibandingkan tahun 2024 sebesar 112.906 ekor. Peningkatan terjadi dikarenakan bantuan ternak dari pemerintah provinsi jambi untuk ternak sapi sebanyak 245 ekor dan tingginya pemotongan ternak sapi sebesar 25.853 ekor naik jika dibandingkan tahun lalu sebesar 22.735 ekor (14,39%). Populasi Kambing mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 4,58% dengan angka 125.248 ekor dibandingkan tahun 2024 sebesar 119.766 ekor. Peningkatan terjadi dikarenakan adanya bantuan ternak dari pemerintah provinsi sebanyak 301 ekor dan daging kambing juga semakin diminati sebagai alternatif protein hewani yang sehat, dengan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan ternak lain. Kambing memiliki tingkat reproduksi yang cepat dan relatif mudah dipelihara.

Penghitungan produksi daging sapi yang dihitung adalah daging dan bagian yang dapat di makan (karkas, jeroan dan daging variasi). Produksi Daging Sapi mengalami kenaikan di tahun 2025 sebesar 20,25% dengan angka 5.444 ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 4.524 ton. Peningkatan produksi daging terjadi dikarenakan minat masyarakat sudah mulai banyak mengkonsumsi daging sapi dilihat dari banyak nya jumlah pemotongan secara regular maupun qurban.

Produksi Daging Kambing mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 8,12% dengan angka 434 ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 468 ton. Penurunan produksi daging kambing disebabkan tidak adanya jaminan harga yang stabil dari komoditas peternak besar.

Produksi Ayam Buras mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan angka 1,473 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,47 ribu ton. Peningkatan produksi ayam buras (ayam kampung) didorong oleh kombinasi kebutuhan pangan dan program pemerintah. Produksi Ayam Ras Petelur mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan angka 0,33 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,32 ribu ton. Peningkatan produksi ayam ras petelur didorong oleh kombinasi upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah pusat dan daerah focus pada swasembada untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Produksi Ayam Ras Pedaging mengalami kenaikan di tahun 2025 dengan angka 60.41 ribu ton dibandingkan tahun 2024 sebesar 58.58 ribu ton. Peningkatan produksi daging ayam disebabkan ayam pedaging menjadi salah satu komoditas konsumsi utama yang permintaanya terus meningkat karena harganya yang terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lain. Permintaan ini meningkat terutama menjelang hari besar seperti Natal 2025 dan tahun baru.

Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja

a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah

sebagian besar untuk sector perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (Illegal Mining).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjung Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau.

b. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanaman petani belum maksimal.
2. Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini

karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.

3. Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :

- Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
- Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
- Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
- Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
- Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.

4. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.

5. Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

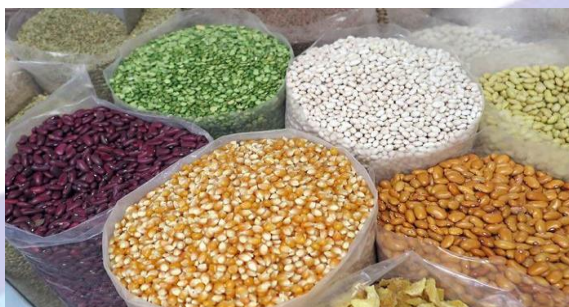
c. Masih berfluktuatifnya Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah - buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur-sayuran, pada saat-saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- ❖ Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- ❖ Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- ❖ Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

d. Relatif masih terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.



Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

- Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional.
- Selain itu, turut pula dengan kondisi masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

f. Persaingan produk impor

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi memenuhi standar kualitas ekspor
2. Tingkat efisiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat dapat bersaing dipasaran.
3. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional.
4. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

e. Rendahnya Nilai tambah produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usaha tani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik.

Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tambah produk tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
2. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

f. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembanganteknologi yang sudah ada (innovation) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdantai, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (Good Handling Procedure) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.

g. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

h. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

1. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
 - ✓ Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - ✓ Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
 - ✓ Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai

- ✓ Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - ✓ Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.
2. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
 3. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
 4. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
 5. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

i. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan,

- 1) Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
- 2) Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian

bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.

- 3) Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsin (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

j. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan

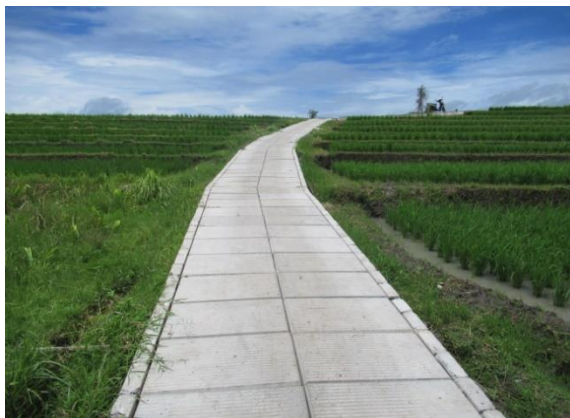
Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- 2) Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- 3) Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
- 4) Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

k. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.



Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

Berdasarkan problematika tersebut di atas, maka upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura pada tahun 2025. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan berupa : Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung UPSUS, perbanyak benih

sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT, program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

3. Berkembangnya Usaha Agribisnis

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak dibidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2025.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan

hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih.

4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan



Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyakan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pengadaan sarana dan prasarana balai benih kentang di Kabupaten Kerinci (BBH Kayu Aro).

5. Meningkatkan Penggunaan / Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan penggunaan / penanaman benih bermutu varietas unggul

dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih.

Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksanakan sebanyak 1 kali. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini juga dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyakan benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyakan benih sumber padi varietas unggul lokal.

6. Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih

Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu. Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya.

Dalam pencapaian sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyakan benih pokok dan benih sebar, perbanyakan benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyakan benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju untuk tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan berupa

Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering,

Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, produktivitas padi dilahan bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi didaerah rawa lebak.

8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada.

Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi

Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul)

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan.

Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah-daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.

10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam memproduksinya akan mudah dipasarkan dan akan muda bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain : penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar. Upaya yang ditempuh diantaranya :

- a) Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.

- b) Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk. Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.
- c) Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi "off season" untuk komoditi bernilai tinggi.

11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usaha tani dilanjutkan dengan pengembangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
- b) Mensosialisasikan sistim pengemasan/ packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

12. Mempercepat Transfer Teknologi Dan Tepat Sasaran Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

- a) Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan. Peserta adalah utusan kelompok yang mdah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.
- b) Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepetani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
- c) Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagaimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun 2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian didaerahnya.

Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder (PT. SHS dan PT Pertani), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

14. Meningkatkan Efisiensi Usaha tani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Thresher pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan Kedelai. Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian

9. Program Penyuluhan Pertanian

SASARAN STRATEGIS 7 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

INDIKATOR KINERJA :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi tahun 2025 mencapai 75,13, meningkat 0,77 poin atau 1,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,36. Selama 2020–2025, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun.

Tabel 3.35. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2024
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Pembangunan Manusia	71,29	73,73	74,36	73,56	75,13	102,13	74,04	75,02
* Didukung oleh Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Melek Huruf, Indeks rata-rata lama sekolah, Indeks Standar Hidup Layak								

Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Peningkatan pada dimensi standar hidup layak lebih cepat dari dimensi lainnya.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,39 tahun, meningkat 0,33 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data Umur Harapan Hidup saat Lahir menggunakan hasil Long Form SP2020.

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada 2025 meningkat 0,20 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,14 tahun menjadi 13,34 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,05 tahun, dari 8,90 tahun menjadi 8,95 tahun pada tahun 2025.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2025 meningkat 397 ribu rupiah atau 3,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Perkembangan IPM Provinsi Jambi Tahun 2021–2025

Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018 status pembangunan manusia Provinsi Jambi sudah berada pada level “tinggi”. Selama 2020–2025, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 72,29 pada 2020 menjadi 75,13 pada 2025.

Diagram 3.16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2020–2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2020–2025

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi standar hidup layak dan pengetahuan. Seluruh indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat sebesar 3,42 persen. Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami pertumbuhan paling pesat, sebesar 1,52 persen dari tahun sebelumnya, capaian ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2021. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat sebesar 0,56 persen. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mengalami pertumbuhan sebesar 0,45 persen, juga merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2021. Perkembangan dimensi penyusun IPM selama 2020–2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.36. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	73,33	73,38	73,61	73,84	74,06	74,39
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,98	13,04	13,05	13,13	13,14	13,34
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,55	8,60	8,68	8,81	8,90	8,95
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	10.392	10.588	10.871	11.160	11.621	12.018

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH Provinsi Jambi telah meningkat sebesar 1,06 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada 2020, UHH Provinsi Jambi adalah 73,33 tahun dan pada 2025 mencapai 74,39 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,33 tahun atau 0,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,25 persen per tahun.

Grafik 3.11. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

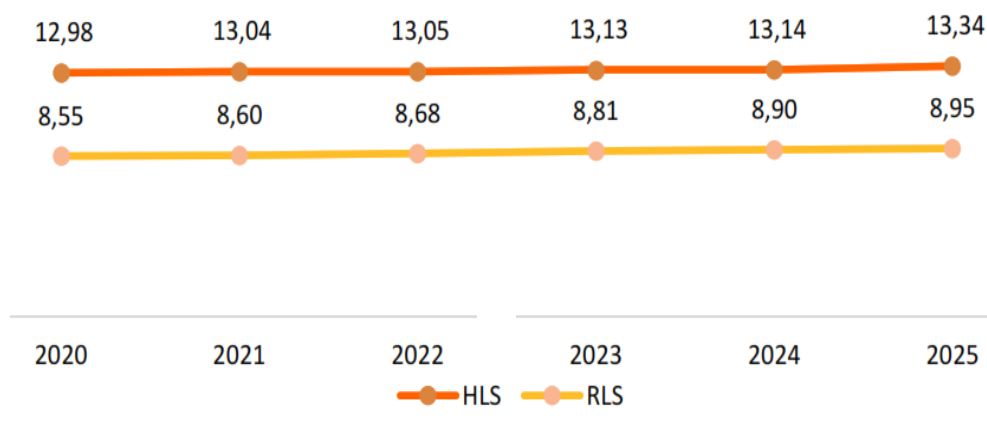
Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,55 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,92 persen per tahun. HLS pada 2025 meningkat 0,20 tahun atau 1,52 persen dibandingkan tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yaitu 0,31 persen.



Sementara itu, RLS pada tahun 2025 meningkat 0,05 tahun atau 0,56 persen dibandingkan tahun 2024, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 (1,01persen).

Grafik 3.12. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi (tahun) 2020–2025

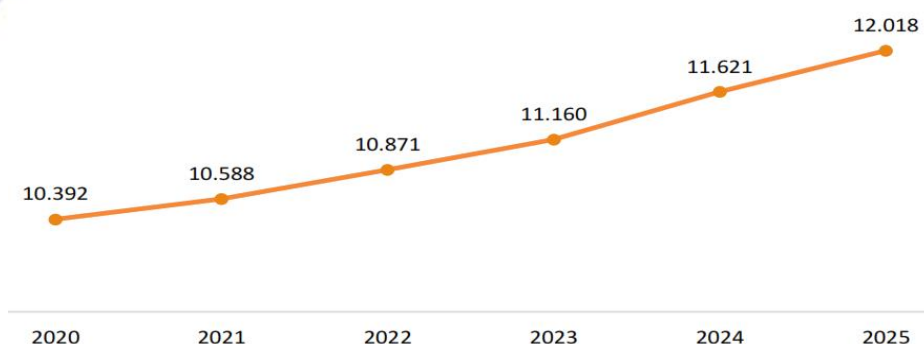


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak. Dimensi ini dipresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Provinsi Jambi mencapai 12,018 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 397 ribu rupiah atau 3,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2024 yang sebesar 2,83 persen per tahun.

Grafik 3.13. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020–2025

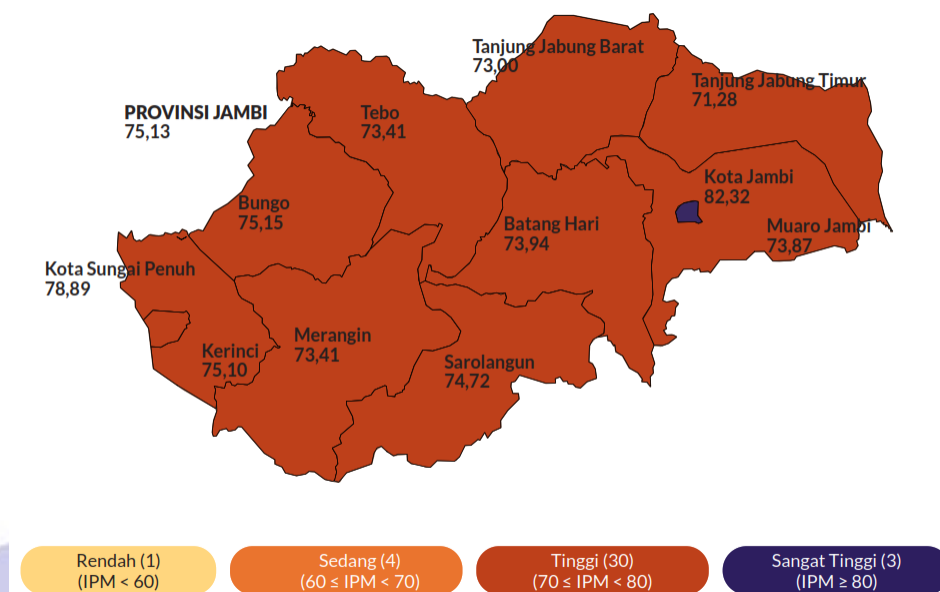


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025, jumlah kabupaten/kota berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) sebanyak 10 kabupaten/kota dan berstatus “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$) sebanyak 1 yaitu Kota Jambi. Tidak ada lagi kabupaten/kota dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) dan “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai IPM. Peningkatan nilai IPM paling besar terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu meningkat 0,99 poin atau 1,37 persen dari tahun 2024. Kota Jambi berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” dengan nilai IPM sebesar 82,32, mengalami peningkatan paling sedikit dari kabupaten/ kota lainnya yaitu 0,55 poin atau 0,67 persen dari tahun 2024.

Gambar 3.7. IPM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Kedua wilayah kota di Provinsi Jambi adalah peraih IPM terbesar dari sebelas kabupaten/kota yang ada. Setelah Kota Jambi dengan IPM 81,77, peraih IPM terbesar kedua adalah Kota Sungai Penuh dengan IPM sebesar 77,93 dan posisi ketiga dicapai oleh Kabupaten Bungo dengan IPM 74,44. Urutan keempat dan kelima ditempati oleh Kabupaten Kerinci dan Sarolangun, dengan IPM masing-masing sebesar 74,33 dan 73,76. Selanjutnya pada posisi keenam dan ketujuh adalah Kabupaten Batang Hari dengan IPM sebesar 73,12 dan Kabupaten Muaro Jambi dengan IPM sebesar 73,11. Rangking kedelapan adalah Kabupaten Tebo dengan IPM sebesar 72,67, sedangkan yang kesembilan adalah Kabupaten Merangin dengan IPM sebesar 72,65. Posisi kedua terakhir ditempati oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai IPM 72,01 dan Tanjung Jabung Timur dengan nilai IPM 70,77.

Tabel 3.37. IPM per Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2020-2025

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir ¹ (tahun)				Harapan Lama Sekolah (tahun)				Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Provinsi Jambi	73,61	73,84	74,06	74,39	13,05	13,13	13,14	13,34	8,68	8,81	8,90	8,95
Kerinci	72,94	73,18	73,39	73,66	13,89	13,91	13,92	14,18	8,57	8,59	8,60	8,76
Merangin	73,78	73,97	74,13	74,40	12,05	12,25	12,26	12,50	7,91	8,13	8,40	8,41
Sarolangun	73,26	73,46	73,65	73,94	12,47	12,48	12,60	12,82	8,12	8,14	8,35	8,60
Batang Hari	74,22	74,48	74,74	75,14	12,94	12,96	12,97	13,20	8,21	8,22	8,35	8,41
Muaro Jambi	74,33	74,55	74,75	75,06	12,99	13,15	13,37	13,38	8,59	8,69	8,70	8,72
Tanjung Jabung Timur	73,78	74,09	74,37	74,82	12,18	12,20	12,21	12,22	7,19	7,43	7,70	7,71
Tanjung Jabung Barat	72,99	73,21	73,41	73,75	12,64	12,67	12,68	12,71	8,18	8,31	8,32	8,54
Tebo	73,25	73,45	73,62	73,88	12,65	12,92	12,93	13,20	7,70	7,94	8,04	8,05
Bungo	73,49	73,76	74,02	74,35	12,64	12,66	12,67	12,92	8,29	8,39	8,60	8,61
Kota Jambi	74,61	74,85	75,12	75,53	15,38	15,54	15,55	15,56	11,21	11,32	11,51	11,59
Kota Sungai Penuh	73,73	74,01	74,29	74,70	14,81	14,83	14,84	14,85	10,34	10,36	10,48	10,75
Indonesia	73,70	73,93	74,15	74,47	13,10	13,15	13,21	13,30	8,69	8,77	8,85	9,07

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Lanjutan : Tabel 3.38. IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020-2025

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah)				IPM			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Provinsi Jambi	10.871	11.160	11.621	12.018	73,11	73,73	74,36	75,13
Kerinci	10.570	10.965	11.441	11.650	73,24	73,77	74,33	75,10
Merangin	10.714	10.969	11.425	11.847	70,98	71,81	72,65	73,41
Sarolangun	12.069	12.392	12.679	13.030	72,66	73,05	73,76	74,72
Batang Hari	10.173	10.528	10.872	11.219	71,99	72,50	73,12	73,94
Muaro Jambi	9.118	9.525	10.007	10.579	71,41	72,26	73,11	73,87
Tanjung Jabung Timur	9.503	9.898	10.328	10.626	68,96	69,85	70,77	71,28
Tanjung Jabung Barat	9.968	10.229	10.696	11.266	70,88	71,44	72,01	73,00
Tebo	10.725	10.894	11.415	11.791	71,14	71,99	72,67	73,41
Bungo	11.956	12.224	12.820	13.182	73,08	73,57	74,44	75,15
Kota Jambi	12.597	12.783	13.388	13.706	80,38	80,93	81,77	82,32
Kota Sungai Penuh	10.745	11.027	11.499	11.994	76,75	77,20	77,93	78,89
Indonesia	11.479	11.899	12.341	12.802	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Keterangan : UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), HLS : Harapan Lama Sekolah, RLS : Rata-rata Lama Sekolah, IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pengelolaan Pendidikan
10. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
11. Program Pengembangan Kurikulum
12. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
13. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
15. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
16. Program Pembinaan Perpustakaan
17. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
18. Program Pembinaan Sejarah
19. Program Pengelolaan Permuseuman
20. Program Pengembangan Kebudayaan
21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
22. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
23. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
24. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Bangsa
25. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial
26. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
27. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Faktor Penghambat :

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun- temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi.

Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.

3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.
4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan terlupakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.

SASARAN :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER



INDIKATOR KINERJA :

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang

juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan.

IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi tahun 2024 (capaian 2025) adalah sebesar 0,528, relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan pada indikator proporsi perempuan usia 15–49 tahun

yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Indikator MTF mengalami penurunan dari 23,80 persen pada tahun 2023 menjadi 19,90 persen pada tahun 2024 persen dan indikator MHPK20 mengalami penurunan dari 32,40 persen pada tahun 2023 menjadi 30,00 persen.

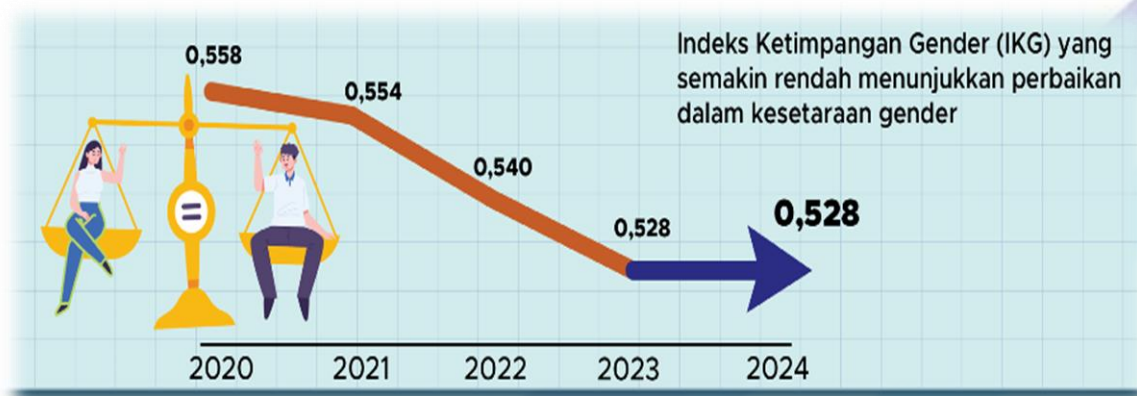
Pada dimensi pemberdayaan, persentase perempuan sebagai anggota legislatif berkurang dari 16,36 persen pada tahun 2023 menjadi 12,73 pada tahun 2024. Sementara itu, indikator persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan

masingmasing 1,38 persen dan 0,05 persen. Penurunan pada dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang turun dari 51,68 persen pada tahun 2023 menjadi 51,17 persen pada tahun 2024. Secara spasial, ketimpangan gender mengalami penurunan yang signifikan di sebagian besar provinsi di Indonesia.

Capaian kinerja Indeks Ketimpangan Gender yang dikeluarkan pada tahun 2025 merupakan angka ketimpangan tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3.39. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Tahun capaian kinerja		Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2024
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Ketimpangan Gender	Na	0,540	0,528	0,58	0,528	109,84	Na	0,421
* Didukung oleh Indeks Keterwakilan di Parlemen, Indeks Pengambilan Keputusan, Indeks Distribusi Pendapatan								

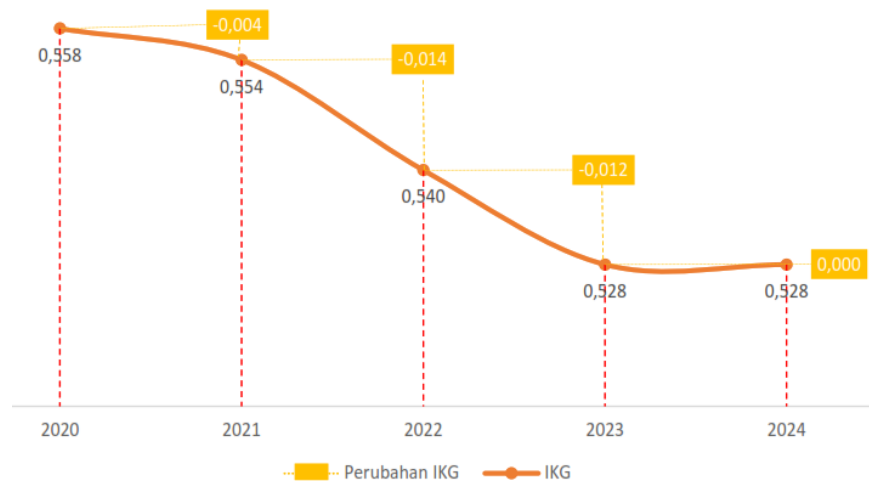




Ketimpangan gender di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,030 poin, rata-rata turun 0,008 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2022, turun 0,014 poin. Salah satu indikator yang berkontribusi terhadap perbaikan ini adalah menurunnya ketimpangan dalam pemberdayaan perempuan. Proporsi anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2021 menjadi 16,36 persen pada tahun 2022.

Perkembangan Capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.14. Perkembangan IKG



Sumber : DP3AP2 Provinsi Jambi, BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

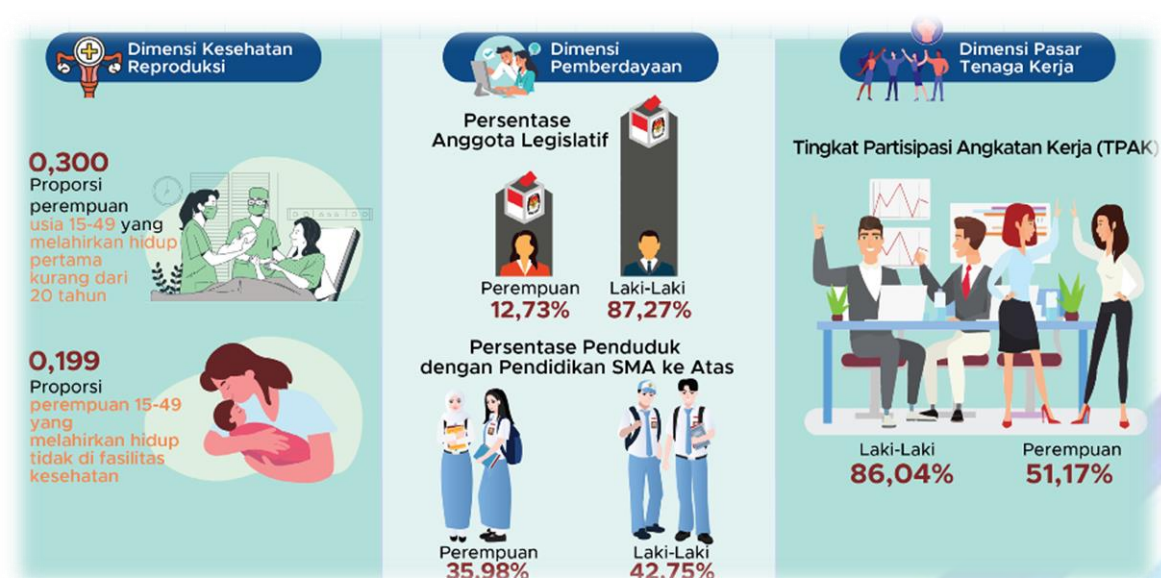
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 menurut Dimensi Pembentuknya

Indeks Ketimpangan Gender dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Setiap dimensi dibentuk oleh indikator penyusun. Perkembangan indikator penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi selama 2020-2024 dapat dilihat di Tabel berikut :

Tabel 3.40. Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi, 2020–2024

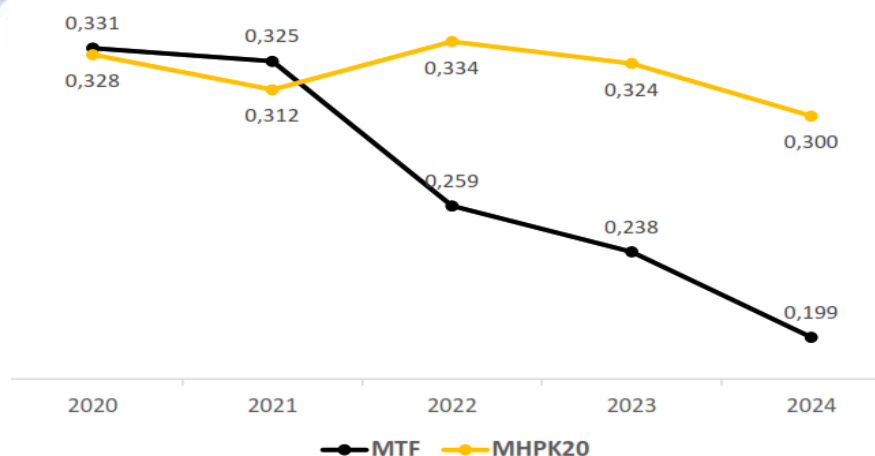
Dimensi/Indikator	Gender	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,331	0,325	0,259	0,238	0,199
MHPK20	Perempuan	0,328	0,312	0,334	0,324	0,300
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	85,45	85,45	83,64	83,64	87,27
	Perempuan	14,55	14,55	16,36	16,36	12,73
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	38,96	39,74	40,53	41,37	42,75
	Perempuan	33,33	33,73	35,28	35,93	35,98
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-laki	84,96	83,91	86,17	85,27	86,04
	Perempuan	50,04	49,89	48,97	51,68	51,17

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

**Dimensi Kesehatan Reproduksi**

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 (dua) indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Pada tahun 2020, angka MTF Provinsi Jambi sebesar 33,10 persen dan kemudian secara berturut-turut turun hingga menjadi 19,90 persen pada tahun 2024. Indikator MHPK20 selama tahun 2020–2021 juga menurun dari 32,80 persen menjadi 31,20 persen. Namun pada tahun 2022, MHPK20 mengalami peningkatan menjadi 33,40 persen dan kemudian kembali turun menjadi 30,00 persen di tahun 2024. Perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Provinsi Jambi telah berhasil diminimalkan.

Grafik 3.15. Perkembangan Indikator Dimensi Indeks Kesehatan Reproduksi Provinsi Jambi, 2020–2024



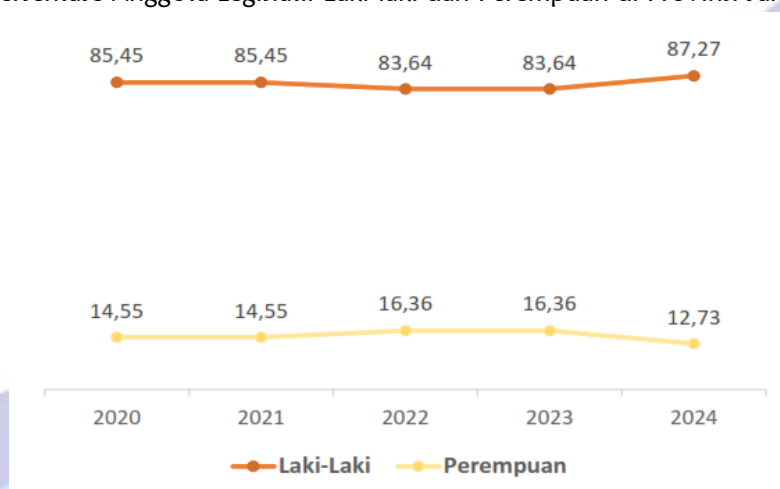
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Dimensi Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator yang dibagi menurut gender, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Selama periode 2020–2023, persentase anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi cenderung meningkat dari 14,55 persen pada tahun 2020 menjadi 16,36 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, persentase anggota legislatif perempuan di Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan menjadi 12,73 persen. Kondisi ini merepresentasikan bahwa peran laki-laki dalam pengambilan keputusan menjadi lebih dominan daripada perempuan.

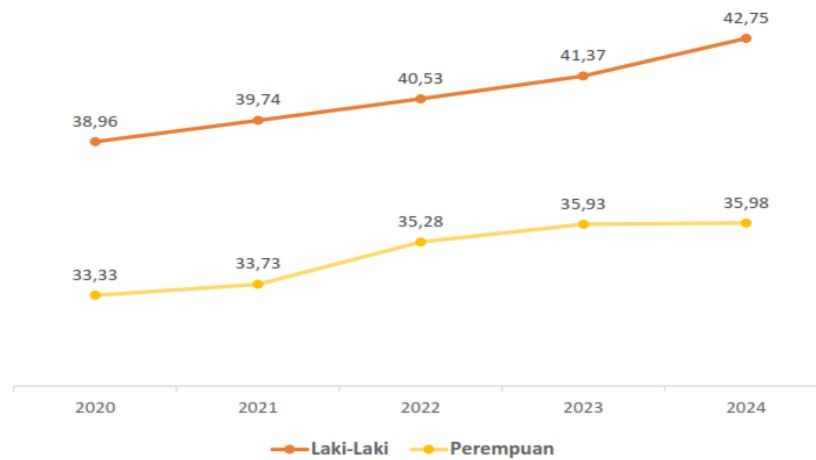
Sementara itu, persentase penduduk usia 25 tahun ke atas berpendidikan minimal SMA ke atas selama kurun waktu 2020–2024 konsisten meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas pada tahun 2020 sebesar 38,96 persen, meningkat menjadi 42,75 persen pada tahun 2024 (naik 3,79 persen poin), sementara perempuan meningkat dari 33,33 persen pada tahun 2020 menjadi 35,98 persen pada tahun 2024 (naik 2,65 persen poin).

Grafik 3.16. Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Jambi, 2020–2024



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Grafik 3.17. Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas di Provinsi Jambi, 2020–2024

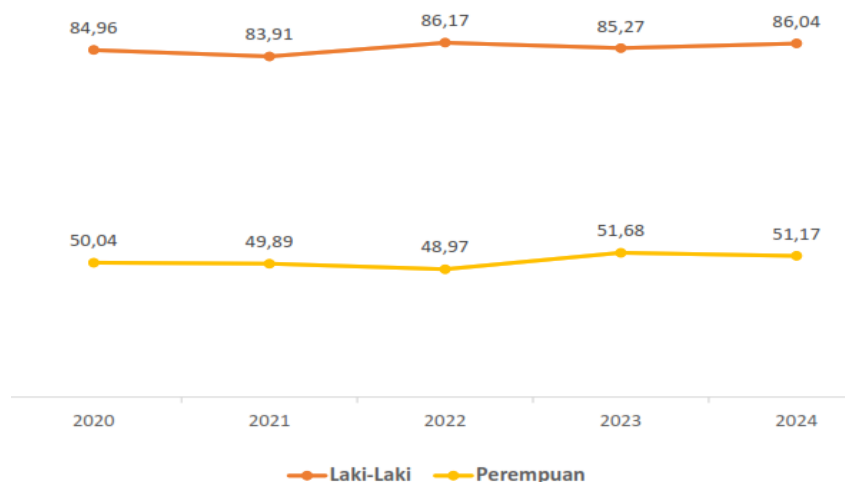


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama tahun 2020–2024, TPAK baik perempuan maupun laki-laki menunjukkan tren peningkatan. TPAK laki-laki pada tahun 2020 sebesar 84,96 persen meningkat menjadi 86,04 persen pada tahun 2024 (naik 1,08 persen poin), sementara TPAK perempuan meningkat dari 50,04 persen pada tahun 2020 menjadi 51,17 persen pada tahun 2024 (naik 1,13 persen poin). Peningkatan TPAK perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki menunjukkan bahwa kesempatan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi lebih setara.

Grafik 3.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Jambi (persen), 2020–2024

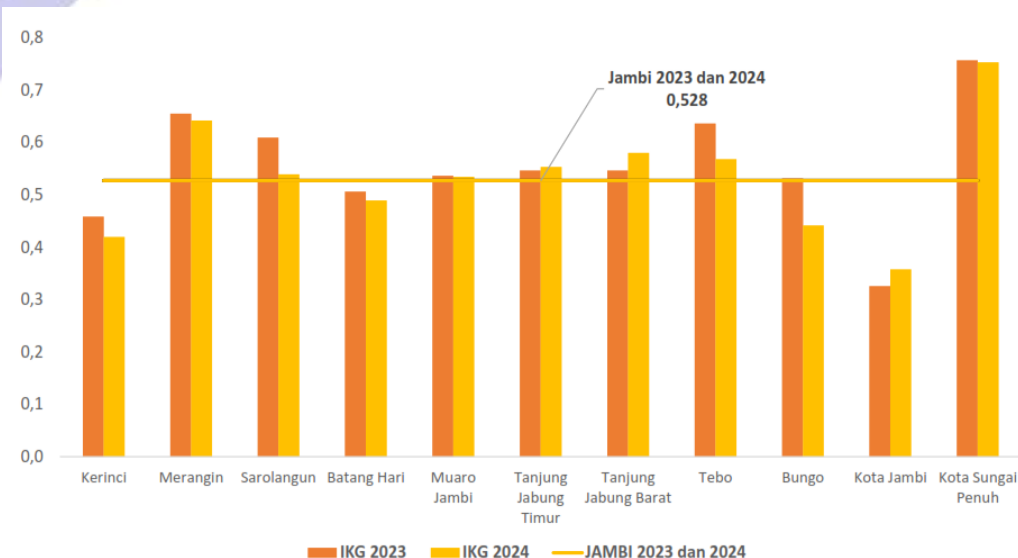


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024

Selama kurun waktu 2020–2024 terjadi perbaikan capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) di tingkat kabupaten/kota. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan ketimpangan gender setiap tahunnya.

Diagram 3.17. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023–2024



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Pada tahun 2024, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Jambi (0,358), diikuti oleh Kabupaten Kerinci (0,420), Kabupaten Bungo (0,442), Kabupaten Batang Hari (0,490), dan Kabupaten Muaro Jambi (0,535). Dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 8 (delapan) di antaranya mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2023.

Kabupaten Bungo mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,090 poin. Penurunan ketimpangan ini terutama didorong oleh penurunan ketimpangan pada dimensi kesehatan reproduksi. Pada dimensi ini, indikator MTF turun sebesar 0,106 persen poin dan indikator MHPK20 turun sebesar 0,090 persen poin. Perbaikan pada dimensi ini menunjukkan adanya penurunan risiko perempuan terhadap kesehatan reproduksi.

Tabel 3.41. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020–2024

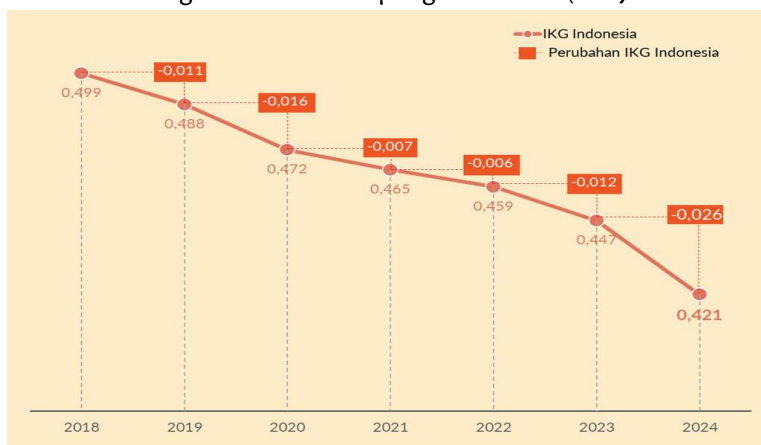
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	0,592	0,568	0,571	0,459	0,420
Merangin	0,857	0,669	0,673	0,656	0,643
Sarolangun	0,603	0,594	0,574	0,610	0,540
Batang Hari	0,520	0,522	0,521	0,507	0,490
Muaro Jambi	0,616	0,581	0,579	0,537	0,535
Tanjung Jabung Timur	0,539	0,561	0,548	0,547	0,554
Tanjung Jabung Barat	0,553	0,517	0,538	0,547	0,581
Tebo	0,646	0,649	0,631	0,637	0,569
Bungo	0,609	0,593	0,568	0,532	0,442
Kota Jambi	0,252	0,431	0,250	0,326	0,358
Kota Sungai Penuh	0,794	0,788	0,791	0,758	0,754
Provinsi Jambi	0,558	0,554	0,540	0,528	0,528

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024 (2025) Nasional

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2024 sebesar 0,421, turun 0,026 poin atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan penurunan tahun sebelumnya. Perbaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terjadi pada semua dimensi, terutama pada dimensi pasar tenaga kerja. Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Grafik 3.18. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nasional 2018-2024



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2024 sebesar 0,421, turun 0,026 poin atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan penurunan tahun sebelumnya. Perbaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terjadi pada semua dimensi, terutama pada dimensi pasar tenaga kerja. Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Pada 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mencapai 0,421 atau turun 0,026 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan IKG 2024 melebihi dua kali lipat capaian penurunan tahun sebelumnya. Selama periode 2018–2024, IKG Indonesia secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,013 poin per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kesetaraan gender di Indonesia.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024 tingkat Provinsi

Secara umum, kesetaraan gender tahun 2024 mengalami perbaikan di sebagian besar provinsi yang ditunjukkan oleh penurunan angka IKG pada 26 provinsi. Tiga provinsi dengan penurunan IKG terbesar yaitu Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, dan DKI Jakarta, masing-masing sebesar 0,120 poin, 0,111 poin, dan 0,109 poin. Penurunan IKG di Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta didorong oleh perbaikan seluruh indikator, kecuali indikator persentase penduduk dengan pendidikan SMA ke atas. Sementara itu, penurunan IKG di Kep. Bangka Belitung didorong oleh perbaikan seluruh indikator. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, dan DKI Jakarta telah berhasil mengurangi ketimpangan gender lebih cepat dibanding provinsi lainnya.

Di sisi lain, terdapat lima provinsi yang mengalami peningkatan IKG, yaitu Maluku sebesar 0,029 poin, Kalimantan Timur sebesar 0,027 poin, DI Yogyakarta sebesar 0,021 poin, Riau sebesar 0,013 poin, dan Kalimantan Tengah sebesar 0,008 poin. Peningkatan IKG di Maluku didorong oleh kenaikan indikator MHPK20 dan penurunan keterwakilan perempuan di legislatif. Sementara itu, peningkatan IKG di Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta didorong oleh kenaikan indikator

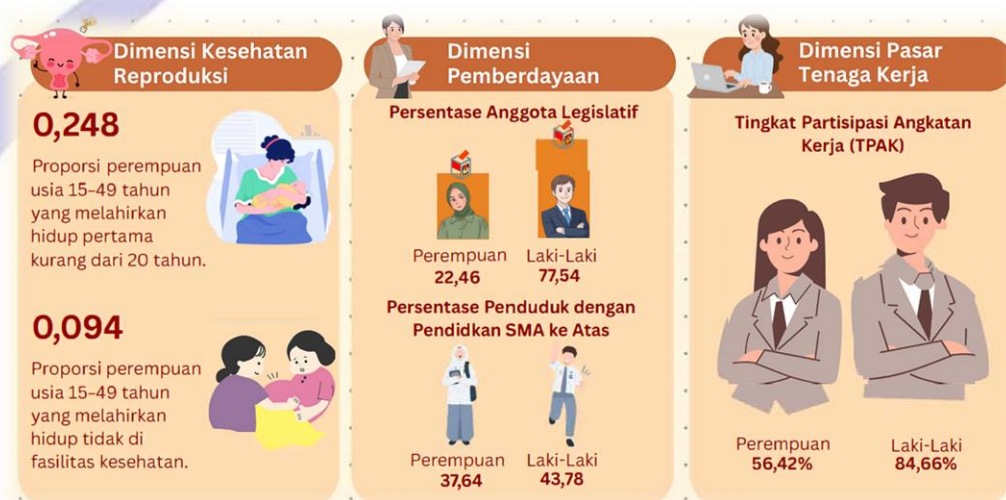
MHPK20 dan kenaikan ketimpangan pada dimensi pemberdayaan. Peningkatan ketimpangan pada dimensi pemberdayaan juga mendorong peningkatan IKG di Riau dan Kalimantan Tengah. Selain itu, peningkatan IKG di Kalimantan Tengah juga didorong oleh peningkatan ketimpangan pada dimensi pasar tenaga kerja.

Pada 2024, sebagian besar provinsi memiliki capaian kesetaraan gender lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Terdapat 22 provinsi dengan capaian kesetaraan gender lebih rendah dibandingkan capaian nasional, ditunjukkan oleh IKG yang lebih tinggi dari IKG nasional. Meskipun demikian, terdapat 16 provinsi lain dengan capaian kesetaraan gender yang lebih baik dibandingkan capaian nasional, ditunjukkan oleh IKG yang lebih rendah dari IKG nasional.

Tabel 3.42. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Provinsi, 2018–2024

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,503	0,528	0,514	0,503	0,504	0,489	0,459
Sumatera Utara	0,465	0,484	0,468	0,445	0,442	0,425	0,399
Sumatera Barat	0,447	0,527	0,503	0,455	0,430	0,425	0,381
Riau	0,497	0,523	0,503	0,477	0,473	0,458	0,471
Jambi	0,561	0,575	0,558	0,554	0,540	0,528	0,528
Sumatera Selatan	0,528	0,531	0,521	0,520	0,517	0,496	0,479
Bengkulu	0,550	0,544	0,523	0,520	0,478	0,469	0,384
Lampung	0,504	0,494	0,474	0,458	0,456	0,437	0,399
Kep. Bangka Belitung	0,587	0,585	0,559	0,527	0,497	0,490	0,379
Kepulauan Riau	0,386	0,414	0,416	0,387	0,395	0,348	0,309
DKI Jakarta	0,300	0,237	0,210	0,194	0,320	0,256	0,147
Jawa Barat	0,508	0,504	0,489	0,493	0,490	0,482	0,458
Jawa Tengah	0,389	0,376	0,370	0,377	0,371	0,336	0,308
D.I. Yogyakarta	0,220	0,243	0,149	0,250	0,240	0,142	0,163
Jawa Timur	0,483	0,476	0,449	0,460	0,440	0,423	0,347
Banten	0,491	0,503	0,484	0,475	0,478	0,464	0,453
Bali	0,262	0,237	0,305	0,265	0,321	0,239	0,183
Nusa Tenggara Barat	0,577	0,668	0,665	0,653	0,648	0,650	0,530
Nusa Tenggara Timur	0,511	0,481	0,471	0,437	0,436	0,428	0,402
Kalimantan Barat	0,582	0,566	0,558	0,547	0,522	0,519	0,493
Kalimantan Tengah	0,565	0,541	0,547	0,537	0,526	0,541	0,549
Kalimantan Selatan	0,540	0,529	0,528	0,525	0,514	0,507	0,486
Kalimantan Timur	0,497	0,477	0,467	0,436	0,443	0,414	0,441
Kalimantan Utara	0,481	0,497	0,468	0,472	0,444	0,452	0,418
Sulawesi Utara	0,463	0,453	0,431	0,439	0,444	0,422	0,386
Sulawesi Tengah	0,524	0,518	0,520	0,497	0,477	0,469	0,461
Sulawesi Selatan	0,492	0,460	0,427	0,410	0,390	0,366	0,365
Sulawesi Tenggara	0,575	0,565	0,559	0,554	0,490	0,491	0,460
Gorontalo	0,472	0,457	0,456	0,443	0,411	0,391	0,365
Sulawesi Barat	0,539	0,554	0,543	0,543	0,510	0,494	0,491
Maluku	0,532	0,547	0,534	0,521	0,527	0,509	0,538
Maluku Utara	0,566	0,544	0,547	0,541	0,534	0,519	0,508
Papua Barat	0,594	0,543	0,527	0,527	0,537	0,537	0,558
Papua Barat Daya	–	–	–	–	–	...	0,525
Papua	0,550	0,551	0,532	0,535	0,515	0,518	0,479
Papua Selatan	–	–	–	–	–	...	0,530
Papua Tengah	–	–	–	–	–	...	0,526
Papua Pegunungan	–	–	–	–	–	...	0,579
Indonesia	0,499	0,488	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026



Meskipun telah banyak kebijakan dan peraturan, diskriminasi antar gender masih terjadi di pasar tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan implementasinya yang belum optimal. Penghapusan diskriminasi gender dalam ekonomi tidak hanya dengan peran pemerintah tetapi juga membutuhkan peran pihak terkait seperti pengusaha, lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Kebijakan mengenai diskriminasi antar gender dapat dimulai dari aturan tentang cuti bersalin, pengasuhan anak, pengaturan jam kerja, dan kebijakan lain perlu diperhatikan guna meningkatkan kualifikasi dan akses perempuan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan, promosi, dan pelatihan.

Untuk masalah kewirausahaan, akses pelatihan dan permodalan yang kurang bagi perempuan ini memerlukan peraturan atau kebijakan yang memberikan perhatian khusus bagi pengusaha perempuan. Sifat atau kodrat perempuan yang biasanya lebih bersifat pasif memerlukan perhatian lebih dari pemangku kebijakan dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, produktivitas dan kinerja pekerja atau pengusaha perempuan akan meningkat dan mencapai kesetaraan gender, yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
3. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Perlindungan Perempuan

Faktor Penghambat :

Capaian IKG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat :

1. Terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.
2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.
3. Blum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kinerja.

Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

3.3. Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 Periode RPJMD 2025-2029

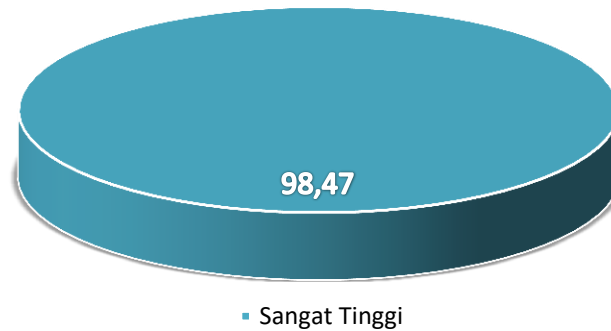
Tabel 3.43. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
(Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	79	79	100
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,42	3,46	101,17
3.	Terwujudnya Transformasi Digital Di Provinsi Jambi	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	50,80	42,3	83,27
4.	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jambi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8%	4,93	102,71
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38	4,08	107,35
		Indeks Ketahanan Pangan	74,5	76,16	102,23
5.	Terciptanya Ekosistem Inovasi Di Provinsi Jambi	Indeks Inovasi Daerah	58,75	59,75	101,7
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,8	6,89	98,69
7.	Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan Inklusif Secara Sosial	Indeks Ekonomi Hijau	61,39	57,92*	94,35
		Indeks Ekonomi Biru	15,26	14,03*	91,94
8.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,15	75,05	102,60
		Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	78,5	78,5*	100
9.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Modal Manusia	0,56	0,54*	96,43

Capaian kinerja tahun 2025 pada periode RPJMD 2025-2029 merupakan Perjanjian Kinerja baru yang ditetapkan pada bulan September 2025 yang turut diperhitungkan capaian kinerjanya. Terdapat beberapa indikator kinerja yang masih digunakan dalam mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 dan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, indikator tersebut antara lain : Indeks Reformasi Birokrasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketahanan Pangan, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Kualitas Lingkungan.

Jika dilihat dari capaian Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 periode RPJMD 2025-2029 secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Periode RPJMD 2025-2029



Dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 8 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel di atas, maka seluruh indikator capaian sebesar >91% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi dengan rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar **98,65**. Dengan demikian kinerja tahun 2025 sebagai masa transisi sebagai penutup RPJMD masuk dalam kategori berhasil mencapai kinerja maksimal.

Pada bagian berikut akan disampaikan capaian pada indikator kinerja lainnya yang telah diperjanjikan untuk diraih target kinerjanya berdasarkan sasaran dan indikator komposit pendukungnya.

SASARAN :

Meningkatnya Daya Saing Daerah

Indikator Kinerja :

INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

SASARAN :

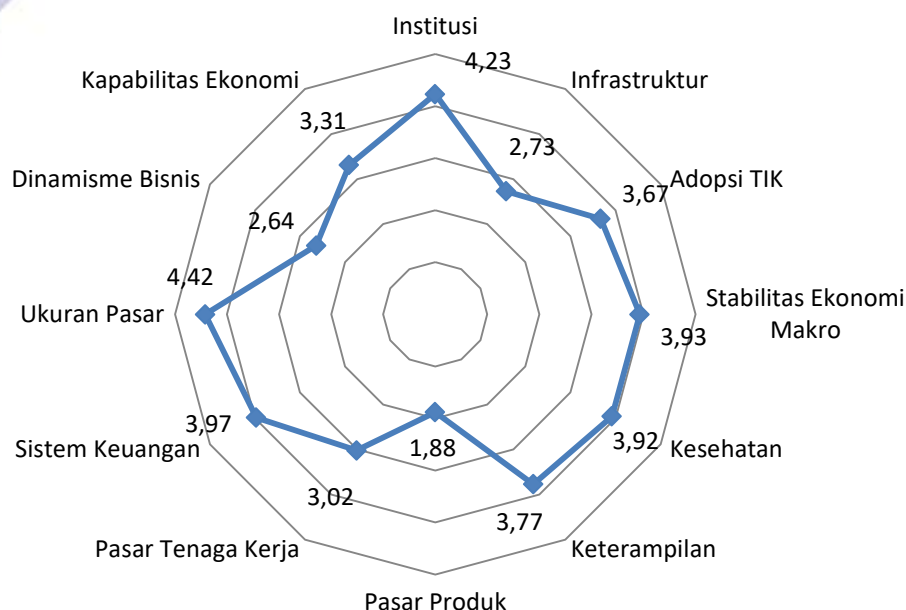
Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi

Indikator Kinerja :

INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

Indeks Daya Saing Daerah merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi, dengan 12 pilar penilaian yakni : Kelembagaan/institusi, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Capaian 12 pilar penilaian Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.7. Capaian 12 Pilar Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi



Penjelasan :

Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, check and balances, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet fixed-broadband, dan pengguna internet.

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.

Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/start-up, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Dari capaian rata-rata pilar IDSD tersebut di atas, didapat nilai capaian Provinsi Jambi sebesar 3,46 sebagaimana dirilis Badan Riset Nasional pada Februari 2026. Perbandingan capaian kinerja IDSD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Tahun capaian kinerja	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Daya Saing Daerah	3,38	3,38	3,42	3,46	101,17	3,99	3,50
Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	42,3**	42,3**	50,80	42,3*	83,26	52,65	44,53

* Didukung oleh capaian 12 Pilar IDSD

Capaian indikator kinerja di atas turut ditopang oleh kinerja “antara” atau kinerja sasaran “antara” yang patut digambarkan capaian kinerjanya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.45. Capaian Sasaran Kinerja “Antara”

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi	Rasio Konektivitas	0.5874	0,588	0,588	100	0,63	Na
	Indeks Daya Saing Infrastruktur	2,38	2,5	2,73	109,20	2,79	2,97
	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	42,3**	50,80	42,3*	83,26	52,65	44,53
	Tingkat inklusi keuangan provinsi	85*	91,35	85,19 (mei)	93,26	94,25	80,51
	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	91,35	5,9	3,51	59,5	6,85	3,47

Kenaikan IDSD menjadi indikator penting dalam memperkuat posisi Jambi di tengah persaingan antar daerah di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Jambi semakin kompetitif di tingkat nasional. “Keunggulan Jambi pada IDSD 2025 terlihat pada program pembangunan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, serta indikator ekonomi yang terus menunjukkan tren positif”. Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.

Penguatan di tingkat kabupaten/kota dinilai penting untuk menarik minat investor dan memperluas peluang pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini. Melalui kolaborasi yang solid dan strategi pembangunan yang terarah, Jambi mampu terus meningkatkan nilai IDSD serta memperkuat posisinya sebagai provinsi yang produktif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional. IDSD memiliki peran strategis sebagai instrumen pengukuran pergerakan produk daerah dan tingkat produktivitas masing-masing wilayah. Karena itu, indikator tersebut harus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Gambar 3.10. Penerimaan Penghargaan IDSD Provinsi Jambi Tahun 2025 (2026)
Oleh Kepala BRIN kepada Gubernur Jambi



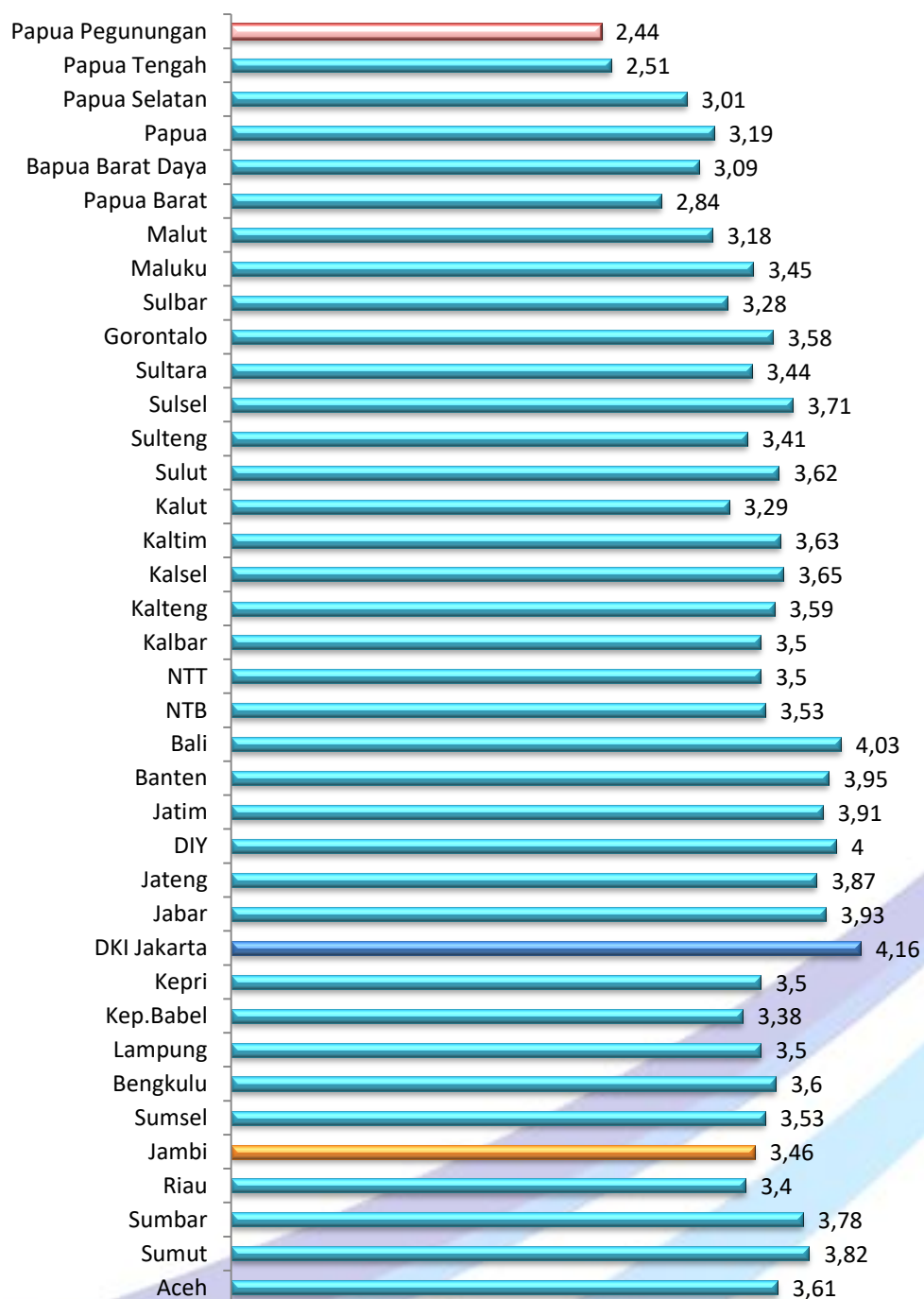
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 mencatat kenaikan menjadi 44,53, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan itu menjadi bukti nyata percepatan transformasi digital Indonesia dan semakin cakupannya masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital. Angka ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia bergerak menuju visi besar pemerintah digital 2045, IMDI 2025 telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi. IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,

Pemanfaatan indeks itu sebagai rujukan strategis sangat krusial untuk merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran, memastikan setiap program penguatan keterampilan digital nasional berbasis data yang akurat. Pengukuran IMDI itu mencakup empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Literasi Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Indeks yang diukur berkala setiap tahun sejak 2022 tersebut mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil dari capaian penting dalam forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

Capaian IDSD Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Capaian IDSD antar Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Grafik 3.19. Capaian IDSD antar Provinsi di Indonesia Tahun 2025



Sumber : BRIN RI 2026

Untuk 2025, pengukuran yang dilakukan pada Juli-Agustus dengan melibatkan lebih dari 18 ribu responden individu dan 11 ribu responden industri itu juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota. Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2022, pengukuran IMDI telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun, dengan cakupan pengukuran di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, IMDI dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi masyarakat digital berbasis kewilayahan di seluruh Indonesia

Pada 2022 skor nasional tercatat sebesar 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif. Di 2023, skor melonjak signifikan menjadi 43,18, menandai adanya dampak nyata dari perluasan program literasi digital di berbagai wilayah. Pada 2024 skor naik menjadi 43,34, sebuah sinyal bahwa literasi digital makin membaik. Di tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih skor IMDI tertinggi secara nasional dengan angka 56,97, disusul oleh Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05).

Untuk kabupaten/kota, Pemkot Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Malang dan Jakarta Barat. Wilayah tengah diisi oleh Bontang, Hulu Sungai Tengah, dan Tarakan. Sementara di timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi. Nilai nasional merupakan rata-rata dari nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota. Dari keempat pilar, infrastruktur dan ekosistem mencatat skor tertinggi (53,06), sementara pilar pemberdayaan masih menempati posisi terendah (34,42), mengisyaratkan area yang perlu mendapat perhatian lebih. Kehadiran IMDI pada akhirnya menjadi fondasi kokoh bagi perumusan kebijakan berbasis bukti, memastikan setiap langkah transformasi digital Indonesia selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi, antara lain :

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran
- d. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- e. Program Pengelolaan Perkeretaapian
- f. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- g. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- h. Program Pengelolaan sumber daya air
- i. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- j. Program Pengelolaan sumber daya air
- k. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- l. Program penataan bangunan gedung
- m. Program penataan bangunan dan lingkungannya
- n. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- o. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- p. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- q. Program pemberdayaan dan perlindungan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro
- r. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- s. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- t. Program kualitas pendidikan dan pelatihan perkoperasian, UMKM, dan pelaku usaha lokal
- u. Program penelitian dan pengembangan inovasi daerah
- v. Program pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah
- w. Program promosi, pelayanan, pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal
- x. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Faktor Penghambat :

1. Rendahnya Kapabilitas Inovasi, ini adalah kelemahan utama, di mana daerah belum mampu menghasilkan, mengadopsi, dan mengkomersialkan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi.
2. Ketimpangan Infrastruktur, infrastruktur dasar, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang belum merata antarwilayah.
3. Kualitas SDM Rendah, pendidikan dan kesehatan yang belum memadai, berdampak langsung pada produktivitas.
4. Birokrasi dan Institusi, efisiensi pemerintah dalam hal peraturan dan kemudahan berusaha masih perlu ditingkatkan.
5. Transformasi digital di Provinsi Jambi menghadapi tantangan utama berupa Ketimpangan Infrastruktur, masih terdapat area blank spot atau minim akses internet yang stabil, terutama di luar pusat kota, menghambat pemerataan digitalisasi.
6. Rendahnya Literasi Digital mengakibatkan terbatasnya keterampilan digital, khususnya bagi tenaga pendidik dan pelajar, yang menghambat efektivitas pembelajaran daring.
7. Kesenjangan Keterampilan & SDM berakibat belum semua elemen masyarakat dan aparat siap dengan perubahan teknologi yang cepat.
8. Keamanan Data belum optimal sehingga beresiko lemahnya keamanan data dan privasi dalam proses digitalisasi pelayanan publik.

Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Penguatan Ekosistem Inovasi, membangun kolaborasi riset antara akademisi, pemerintah, dan swasta untuk menghasilkan inovasi yang relevan.
2. Investasi SDM dan Sektor Riil, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan melakukan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah.
3. Adopsi Teknologi (Digitalisasi), mendorong UMKM menggunakan teknologi (seperti AI) untuk meningkatkan efisiensi dan perluasan pasar.
4. Pemanfaatan Data IDSD, menggunakan data Indeks Daya Saing Daerah 2023 sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar yang menunjang sektor ekonomi strategis.
6. Penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital terstruktur, dan implementasi.
7. Pembangunan Infrastruktur dengan cara percepatan perluasan jaringan internet (mobile dan fixed broadband) untuk mengatasi daerah blank spot guna mencapai target 100 Mbps pada 2029.
8. Program "Jambi Smart Province" dengan mengintegrasikan kurikulum digital di tingkat sekolah (SMK) dan pelatihan literasi digital yang terstruktur dan berkelanjutan.
9. Pusat Data Terintegrasi, melalui optimalisasi Jambi Data & Analytic Center (JDAC) untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik.
10. Peningkatan Keamanan Sibe dengan cara memperkuat infrastruktur keamanan data dalam operasional pemerintah (SPBE) untuk melindungi data masyarakat.
11. Peningkatan Komitmen & Anggaran dalam Penguatan komitmen politik dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung infrastruktur digital.

SASARAN :

Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi

Indikator Kinerja :

1. PERTUMBUHAN EKONOMI
2. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
3. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Sasaran Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi diukur melalui 3 indikator kinerja utama yakni : Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Ketahanan Pangan. Ketiga capaian indikator tersebut telah dijelaskan pada analisis pengukuran capaian kinerja pada bagian sebelumnya (3.2). Namun demikian terdapat capaian kinerja “antara” yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.46. Capaian Sasaran Kinerja “Antara”

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian		
Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi	Inflasi	1,43	3,1 – 3,7	3,71	99,73	1,5 – 3,5	2,92
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,542 (rendah)	1,550	0,574	37,03	1,795	Na
	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	5,55	5,50	5,5	100	4,32	Na
	PDRB (juta rupiah perkapita tahun)	86,72	92,2	89,35	96,90	140,68	Na
Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Rasio Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	1,10	1,21	5,87	485,10	1,27	2,68
	Distribusi Sektor Tersier	35,28	35,29	34,93	99,26	35,5	14,35
	Rasio Industri Pengolahan	9,77	9,78 – 10,1	9,78	100	9,99 – 10,1	4,09
	Pertumbuhan PDRB pada lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	4,25	5,5	3,64	66,20	8,1	14,35

Inflasi

Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jambi sebesar 3,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,50. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 5,52 persen dengan IHK sebesar 113,19 dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,03 persen dengan IHK sebesar 109,57.

Inflasi y-on-y di Provinsi Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,49 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,86 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 1,25 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,59 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,92 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan

Budaya sebesar 2,68 persen; kelompok Pendidikan sebesar 2,20 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,68 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 10,14 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,34 persen; dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,22 persen. Pada Desember 2025, Provinsi Jambi mengalami inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,62 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 3,71 persen.

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan data PMK No. 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, rasio kapasitas fiskal Provinsi Jambi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,574. Nilai ini menempatkan Provinsi Jambi dalam kategori kapasitas fiskal Rendah. Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Jambi masih rendah (sekitar 41,19%), sementara dana transfer pusat masih mendominasi (>58%). Hal ini disebabkan ketergantungan yang cukup tinggi pada dana transfer pusat.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Indikator ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus-menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "nilai tambah".

Tabel 3.47. Incremental Capital Output Ratio Provinsi Jambi, 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp)	148.354,25	153.850,63	161.731,95	169.277,62	176.906,50
Perubahan PDRB ADHK (miliar Rp)	-756,83	5.496,37	7.881,32	7.545,68	7.628,87
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37	42.357,56
ICOR	-42,58	6,41	4,58	5,26	5,55

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mengalami fluktuasi dalam rentang -42,58 hingga 5,55 selama periode 2020–2024. Pada tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19, investasi dalam kondisi kondusif dengan ICOR sebesar 5,14. Namun, ketika pandemi melanda pada tahun 2020, angka ICOR anjlok menjadi -42,58, yang mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan belum mampu menghasilkan output secara optimal. Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan dengan nilai ICOR meningkat menjadi 6,41, menunjukkan adanya pemulihan investasi yang lebih efektif.

Pada tahun 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ICOR tetap berada di angka 4,58, yang masih mencerminkan efisiensi investasi yang cukup baik. Pada tahun 2023, nilai ICOR kembali mengalami kenaikan menjadi 5,26, seiring dengan peningkatan investasi yang lebih stabil. Proyeksi tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan lebih lanjut dengan ICOR mencapai 5,55, yang mencerminkan efisiensi investasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

PDRB Perkapita

Perekonomian Provinsi Jambi 2025 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp349,66 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp92,79 juta atau US\$5.632,03.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen, tumbuh lebih cepat dari tahun 2024 yaitu 4,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,75 persen.

Perekonomian Provinsi Jambi 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp349,66 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp185,58 triliun.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 8,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,75 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,03 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,35 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,27 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,05 persen.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2025 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedangkan dari sisi pengeluaran andil terbesar diberikan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa.

Pertumbuhan PDRB pada lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,88 persen. Kemudian diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,77 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,06 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,49 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,98 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 5,10 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontraksi adalah Konstruksi sebesar 4,14 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Sosial Wajib sebesar 2,62 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,49 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,79 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,57 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen.

Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi, antara lain :

- a. Program Pelayanan Penanaman Modal
- b. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- c. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- d. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- e. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- f. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- h. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- i. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
- j. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- k. Program Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- l. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- m. Program Penempatan Tenaga Kerja
- n. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- o. Program Hubungan Industrial
- p. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- q. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- r. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- s. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- t. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- u. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- v. Program Perekonomian Dan Pembangunan
- w. Program Promosi Penanaman Modal
- x. Program Pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional
- y. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- z. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- aa. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

SASARAN :

Terciptanya Ekosistem Inovasi di Provinsi Jambi

Indikator Kinerja :

INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Jambi, yang diukur oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, merupakan bagian dari evaluasi tahunan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Pengukuran ini didasarkan pada laporan inovasi daerah yang telah divalidasi, mencakup inovasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

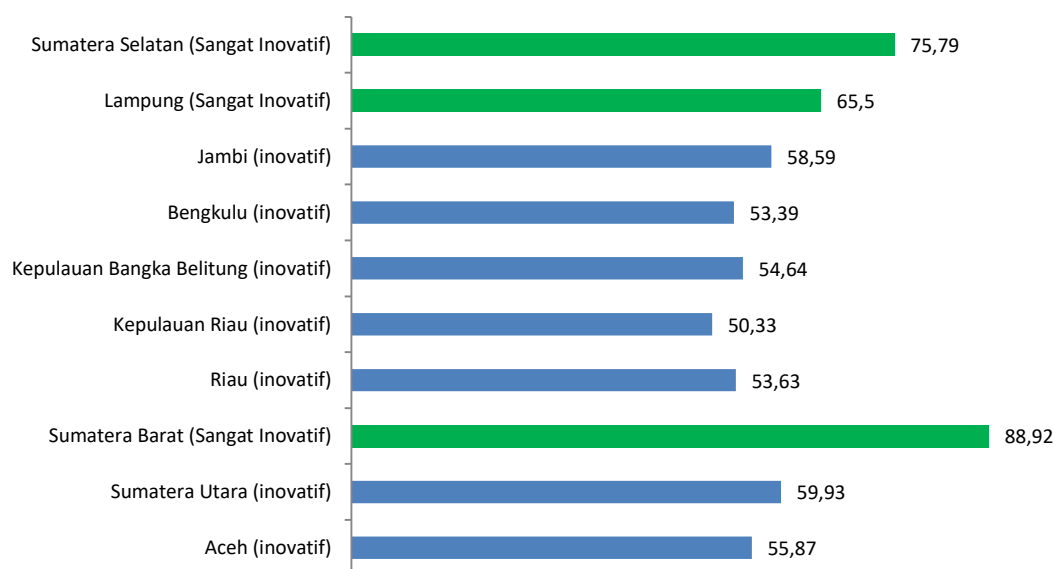
Kemendagri menetapkan IID untuk mengukur hasil inovasi daerah selama minimal 2 tahun terakhir, guna meningkatkan daya saing, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Proses Validasi data yang disubmit oleh pemerintah daerah melalui Breda Provinsi Jambi divalidasi oleh BSKDN bersama tim ahli dari universitas (seperti Universitas Indonesia dan UGM) untuk menjamin kualitas data. Inovasi menjadi bagian krusial dalam mendukung visi pembangunan, termasuk dalam program-program prioritas seperti "Jambi Mantap".

Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi memperoleh nilai 58,59. Angka tersebut merupakan angka capaian 2024 yang dirilis oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri pada bulan Desember tahun 2024, sedangkan progress capaian 2025 belum dirilis secara resmi. Dengan demikian data kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah capaian 2024.

Tabel 3.48. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Tahun capaian kinerja	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Inovasi Daerah	58,59	58,59	58,75	58,59 (inovatif)	99,73	61	3,43
* Didukung oleh capaian Skor Indikator Satuan Inovasi Pemda & Jumlah Inovasi							

Grafik 3.20. Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah di Wilayah Sumatera



Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Terciptanya Ekosistem Inovasi di Provinsi Jambi, yakni :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan
2. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Faktor Penghambat :

1. Penurunan Predikat, terjadi penurunan dari kategori "Sangat Inovatif" menjadi "Inovatif" pada tahun 2022-2024, menunjukkan perlunya konsistensi.
2. Kualitas Inovasi (Kecanggihan Produk) pada aspek teknis seperti integrasi sistem, replikasi inovasi, dan kematangan pelayanan masih rendah.

3. Data Dukung pada sekitar 21,84% indikator belum terisi atau tidak sesuai, menunjukkan kelemahan dalam pelaporan dan dokumentasi inovasi.
4. Kesenjangan Kematangan dan ketimpangan kualitas inovasi antara pemerintah provinsi dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota.

Solusi dan Strategi Peningkatan :

1. Optimalisasi Gerakan "1 OPD 1 Inovasi" dimaksudkan agar setiap OPD menghasilkan inovasi, tidak hanya berbasis digital tapi juga inovasi sosial/non-digital yang memecahkan masalah sehari-hari.
2. Peningkatan Kualitas Data Dukung dan memperbaiki kualitas dokumentasi, bukti pendukung, dan indikator kematangan inovasi untuk mencapai skor tertinggi (111).
3. Pendampingan Intensif (Mentoring) ke kabupaten/kota dengan kinerja rendah agar inovasi berdampak luas dan berkelanjutan.
4. Replikasi dan Inovasi Berkelanjutan guna memperkuat aspek replikasi (mengadopsi inovasi sukses) dan memastikan inovasi tidak berhenti saat pemimpin berganti.
5. Menggunakan inovasi untuk mengatasi isu krusial seperti penurunan stunting, pengangguran, dan peningkatan ekonomi daerah

SASARAN :

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja :

TINGKAT KEMISKINAN

Analisis sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi diukur melalui indikator kinerja utama Tingkat Kemiskinan telah dijelaskan pada analisis pengukuran capaian kinerja pada bagian sebelumnya (3.2).

SASARAN :

Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan Inklusif Secara Sosial

Indikator Kinerja :

INDEKS EKONOMI HIJAU

INDEKS EKONOMI BIRU

Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Index (GEI) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 3rd G20 Development Working Group (DWG) Side Event: "Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy. Indeks Ekonomi Hijau menjadi alat ukur tangible, representatif, dan akurat untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau, salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. Transformasi ekonomi merupakan 'game-changers' pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19, sekaligus upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi, sesuai Visi Indonesia 2045.

Tabel 3.49. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Tahun capaian kinerja	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Ekonomi Hijau	57,92**	57,92**	61,39	57,92*	94,34	68,60	Na
Indeks Ekonomi Biru	14,03*	14,03*	15,26	14,03*	91,94	19,01	Na

Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks Ekonomi Hijau juga bertujuan menjaga arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang serta mempercepat penerapan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, sebagai tulang punggung dalam proses transisi menuju Ekonomi Hijau. Indonesia mengusung sinergi keberlanjutan dalam pembangunan sekaligus menciptakan peluang signifikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), target Net-Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat, dan visi “Living Harmony with Nature” pada 2050.

Laporan Indeks Ekonomi Hijau menyebutkan, upaya transisi menuju Ekonomi Hijau dapat memberikan beragam manfaat bagi Indonesia, di antaranya pertumbuhan PDB rata-rata di angka 6,1-6,5 persen per tahun hingga 2050, 87-96 miliar ton emisi Gas Rumah Kaca yang diselamatkan pada rentang 2021-2060, hingga 68 persen penurunan intensitas emisi di 2045, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) lebih tinggi di rentang 25-34 persen, setara USD 13.890-14.975 per kapita pada 2045. Selain itu, ekonomi hijau juga menghasilkan tambahan 1,8 juta tenaga kerja di sektor green jobs pada 2030 yang tersebar di sektor energi, kendaraan elektronik, restorasi lahan, dan sektor limbah. Di sektor lingkungan, 40.000 jiwa terselamatkan dari pengurangan polusi udara di 2045, restorasi jasa ekosistem bernilai USD 4,75 triliun per tahun pada 2060, 3,2 juta hektar hutan primer terlindungi pada 2060, penambahan tutupan hutan 4,1 juta hektar pada 2060, peningkatan luas hutan mangrove menjadi 3,6 juta hektar pada 2060, dan peningkatan ketahanan iklim perekonomian.

Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. “Indeks Ekonomi Hijau adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Untuk itu, peningkatan indeks secara berkesinambungan tentu akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini. Ke depannya, pemerintah akan menjadikan Indeks Ekonomi Hijau sebagai salah satu sasaran makro pembangunan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang berikutnya.

Peluncuran Indeks Ekonomi Hijau menjadi bukti posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai focal point dari G20 Development Working Group, Indonesia menerapkan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon ke dalam pemulihan ekonomi hijau sejalan dengan tema Kepresidenan G20 2022, Recover Together, Recover Stronger.

Seiring dengan penerapan ekonomi Hijau, Implementasi terhadap Indeks Ekonomi Biru (IEB) yang merupakan sebuah alat ukur komprehensif yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi biru di Indonesia. Hal ini diidentikan dengan rapor kesehatan laut dan pemanfaatannya. Dengan adanya indeks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tidak lagi hanya mengandalkan perkiraan, melainkan data konkret untuk membuat keputusan.

Kerja sama dengan Uni Eropa dalam penyusunan indeks ini sangat strategis. UE memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan, termasuk European Green Deal, dan membawa keahlian teknis serta standar internasional dalam perumusan indikator.

Indeks ini dibangun di atas beberapa pilar utama yang saling terkait, yang mencakup :

Pilar Ekonomi dan Investasi: Mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor produk laut, serta jumlah investasi yang masuk ke sektor-sektor ekonomi biru. **Pilar Sosial dan Kesejahteraan:** Menilai tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor maritim, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesetaraan gender.

Pilar Lingkungan dan Ekologi: Memantau kesehatan ekosistem laut, seperti luas tutupan terumbu karang yang sehat, populasi ikan, tingkat polusi plastik, dan efektivitas kawasan konservasi perairan. **Pilar Tata Kelola dan Kebijakan:** Mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, penegakan hukum terhadap praktik ilegal (seperti illegal fishing), serta tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Dengan mengukur keempat pilar ini secara berkala, Indonesia dapat melihat area mana yang sudah berjalan baik dan area mana yang memerlukan perhatian lebih.

Tabel 3.50. Capaian Sasaran Kinerja “Antara”

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,1	6,8	6,89	98,69	3,65-4,63	8,47
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Rasio Gini	0,321	0,337-0,341	0,291	86,35	0,311-0,315	0,363
Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Distribusi Sektor Perikanan dalam PDRB (%)	2,16	2,16	2,23	103,24	2,2	2,56
	Rata Rata Konsumsi ikan per kapita (puluh kkal) per hari	55,63	56,0	58,09	103,73	64,25	62,78
	Persentase Penduduk Miskin Ekstrim Di Wilayah Pesisir	4,19	4,05	6,19	65,43	2,46	Na

Rasio Gini

Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Jambi yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,291. Angka ini menurun 0,010 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,301 dan menurun 0,024 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,315. Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,320, turun dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,328 dan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,353.

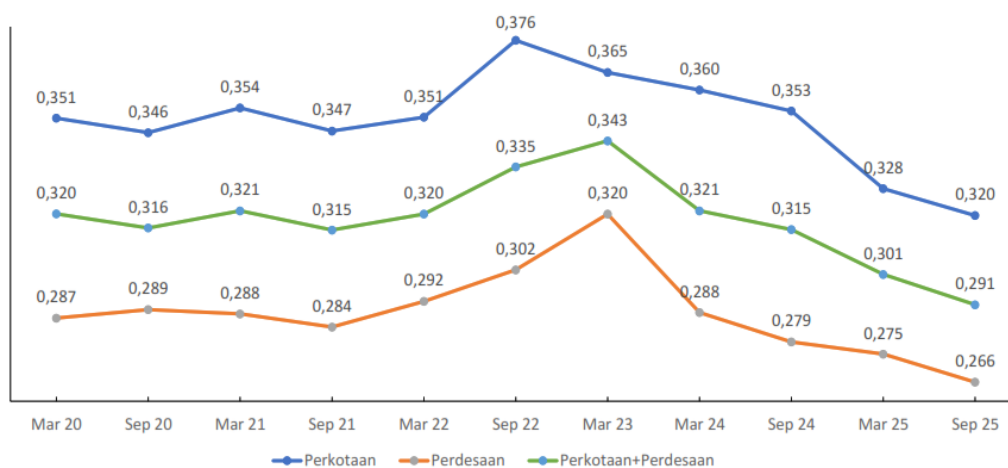
Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,266, turun dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,275 dan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,279. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40

persen terbawah adalah sebesar 23,11 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,34 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 24,36 persen.

Angka gini ratio Provinsi Jambi sejak Maret 2020 cenderung fluktuatif. Setelah mengalami penurunan pada September 2020, nilai gini ratio kembali meningkat menjadi 0,321 pada Maret 2021, namun pada periode selanjutnya turun menjadi 0,315. Selanjutnya, nilai gini ratio kembali meningkat dengan ketimpangan tertinggi terjadi pada Maret 2023 sebesar 0,343. Namun pada periode selanjutnya, nilai gini ratio terus mengalami penurunan hingga pada September 2025 nilainya sebesar 0,291.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2025 adalah sebesar 0,320. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,008 poin dibanding gini ratio Maret 2025 yang sebesar 0,328 dan penurunan sebesar 0,033 poin dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,353. Sementara itu, gini ratio di daerah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,266, turun sebesar 0,009 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 dan turun sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Grafik 3.21. Perkembangan Gini Ratio, Maret 2020–September 2025



Sumber: BPS Provinsi Jambi, diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

PDRB Perikanan

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2025 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 34,93 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 67,05 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2025 tumbuh sebesar 4,93 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,88 persen. Kemudian diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,77 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 8,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,06 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,49 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,98 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 5,10 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontraksi adalah Konstruksi sebesar 4,14 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Sosial Wajib sebesar 2,62 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,49 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,79 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,57 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,77 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi lebih dari 70 persen.

Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Di Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 8,96% pada tahun 2025 dan Tanjung Jabung Barat sebesar 8,67%, memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi 6,19% pada September 2025. Kemiskinan ekstrem di area ini dipengaruhi oleh keterisolasian geografis, kurangnya infrastruktur, dan kerentanan terhadap perubahan iklim.

Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2024–September 2025

Tabel 3.51. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Sept 2024–Sept 2025

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2024	569.981	184.254	754.235
Maret 2025	572.986	186.813	759.799
September 2025	615.370	196.646	812.016
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	7,96	6,73	7,66
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	7,40	5,26	6,87
Perdesaan			
September 2024	464.125	148.620	612.745
Maret 2025	467.572	150.549	618.121
September 2025	506.394	158.501	664.895
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	9,11	6,65	8,51
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	8,30	5,28	7,57
Total			
September 2024	497.637	160.463	658.100
Maret 2025	501.425	162.702	664.127
Maret 2025	542.466	171.383	713.849
Perubahan Sep'24–Sep'25 (%)	9,01	6,81	8,47
Perubahan Mar'25–Sep'25 (%)	8,18	5,34	7,49

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2024 sampai dengan September 2025.

Garis Kemiskinan pada September 2025 adalah sebesar Rp713.849/kapita/bulan. Dibandingkan Maret 2025, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,49 persen. Sementara jika dibandingkan September 2024, juga terjadi kenaikan sebesar 8,47 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh

lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2025 di perkotaan sebesar 75,78 persen dan di perdesaan sebesar 76,16 persen.

Pada September 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 19,08 persen di perkotaan dan 20,40 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (17,28 persen di perkotaan dan 15,17 persen di perdesaan).

Komoditas lainnya adalah cabe merah (4,78 persen di perkotaan dan 4,31 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,55 persen di perkotaan dan 4,56 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,89 persen di perkotaan dan 3,99 persen di perdesaan), mie instan (2,36 persen di perkotaan dan 2,46 persen di perdesaan), bawang merah (2,28 persen di perkotaan dan 2,43 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (6,86 persen di perkotaan dan 8,39 persen di perdesaan), bensin (3,51 persen di perkotaan dan 3,19 persen di perdesaan), dan listrik (3,50 persen di perkotaan dan 2,51 persen di perdesaan), dan sebagainya.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2025–September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,831, turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,976. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan pada September 2025 sebesar 0,153 turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,199.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perdesaan lebih rendah daripada perkotaan. Pada September 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,189 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,650. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,239 sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,110.

Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan Inklusif Secara Sosial, sebagai berikut :

- a. Program pengembangan permukiman
- b. Program pengembangan perumahan
- c. Program kawasan permukiman
- d. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- e. Program Kesejahteraan Rakyat
- f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- g. Program Rehabilitasi Sosial
- h. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- i. Program rehabilitasi sosial
- j. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- k. Program kualitas hubungan industrial
- l. Program pembangunan kawasan transmigrasi

- m. Program pengembangan kawasan transmigrasi
- n. Program perencanaan kawasan transmigrasi
- o. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- p. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- q. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
- r. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Faktor Penghambat :

Permasalahan utama pencapaian Indeks Ekonomi Hijau dan Biru di Provinsi Jambi berpusat pada tingginya deforestasi, degradasi lahan/ekosistem perairan, serta ketergantungan pada energi fosil (batu bara/minyak).

Permasalahan Ekonomi Hijau (Green Economy) antara lain :

1. Tingkat deforestasi dan degradasi hutan/lahan masih tinggi.
2. Indeks ekonomi hijau di beberapa daerah, seperti Kabupaten Kerinci, masih dalam kategori sedang.
3. Ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif (batu bara).

Permasalahan Ekonomi Biru (Blue Economy) antara lain :

1. Kerusakan ekosistem perairan/sungai (Batanghari) dan pesisir.
2. Pencemaran air akibat aktivitas domestik dan industri.

Solusi dan Strategi Peningkatan :

Solusi dan Strategi Peningkatan Ekonomi Hijau :

1. Optimalisasi 3 (tiga) Pilar Strategi yakni Tata guna lahan berkelanjutan, pemulihan (restorasi) fungsi lahan, dan peningkatan produktivitas yang ramah lingkungan.
2. Penguatan Literasi Keuangan Hijau dengan melakukan Pendampingan petani untuk beralih ke agrowisata dan pertanian berkelanjutan (contoh: Desa Tangkit Baru).
3. Penguatan Kebijakan Lokal: Meningkatkan pengawasan dan insentif untuk investasi hijau

Solusi dan Strategi Peningkatan Ekonomi Hijau :

1. Pengelolaan Perairan Terintegrasi dengan melestarikan habitat perairan sensitif dan mengurangi limbah industri.
2. Menerapkan Perikanan Berkelanjutan dalam praktik penangkapan ikan yang tidak merusak

SASARAN :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

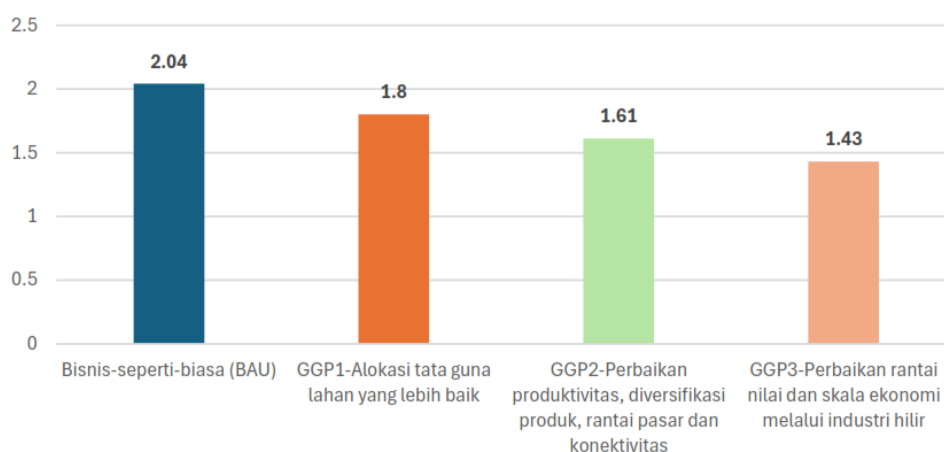
PENURUNAN INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA (%)

Analisis capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan diukur melalui indikator kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah dijelaskan pada analisis pengukuran capaian kinerja pada bagian sebelumnya (3.2).

Indikator Kinerja Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)

Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan bagian integral dari upaya mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk menurunkan laju pemanasan global dan dampaknya terhadap sistem kehidupan. Dalam konteks pembangunan daerah, pengurangan emisi GRK menjadi indikator penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendorong efisiensi energi, transisi menuju energi terbarukan, serta praktik pembangunan ramah lingkungan perlu diperkuat secara konsisten. Pendekatan multisektor dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target penurunan emisi, sejalan dengan komitmen nasional dan global terhadap pengendalian perubahan iklim.

Grafik 3.22. Skenario Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2018-2030



Berdasarkan data skenario intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Jambi tahun 2018–2030, terlihat bahwa skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) mencatatkan nilai intensitas emisi tertinggi sebesar 2,04. Sementara itu, penerapan berbagai skenario intervensi pembangunan hijau (Green Growth Pathway/GGP) menunjukkan potensi signifikan dalam menurunkan intensitas emisi. Pada skenario GGPI, yaitu perbaikan tata guna lahan, intensitas emisi turun menjadi 1,80; sedangkan melalui GGP2, yang mencakup perbaikan produktivitas, diversifikasi produk, peningkatan konektivitas dan pasar, turun menjadi 1,61. Penurunan terbesar diperoleh pada skenario GGP3 yang fokus pada perbaikan rantai nilai dan skala ekonomi melalui pengembangan industri hilir, yaitu sebesar 1,43.

Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi strategis, intensitas emisi Provinsi Jambi akan tetap tinggi dan berpotensi memperburuk kualitas lingkungan serta meningkatkan risiko bencana ekologis dan gangguan kesehatan masyarakat. Dampaknya, peningkatan emisi GRK akan mempercepat perubahan iklim, berdampak pada ketahanan pangan, produktivitas ekonomi, dan ekosistem daerah. Oleh karena itu, Provinsi Jambi perlu melakukan beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan meliputi percepatan perbaikan tata kelola lahan, penguatan produktivitas sektor pertanian dan kehutanan yang ramah lingkungan, peningkatan akses pasar berbasis komoditas berkelanjutan, serta pengembangan industri hilir berbasis rendah karbon. Selain itu, penting pula mendorong kolaborasi multipihak dan kebijakan fiskal hijau untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi secara berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Tabel 3.52. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Tahun capaian kinerja	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	77,27	77,27	78,5	78,5*	100	88,70	Na

SASARAN :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berkesetaraan Gender

Indikator Kinerja :

INDEKS MODAL MANUSIA

Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) adalah pengukuran tahunan yang disusun oleh Bank Dunia . HCI mengukur negara mana yang terbaik dalam memobilisasi modal manusianya, yaitu potensi ekonomi dan profesional warganya. Indeks ini mengukur seberapa investasi kesehatan dan pendidikan dan banyak modal yang hilang di setiap negara karena kurangnya pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.52. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Indeks Modal Manusia Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Tahun capaian kinerja	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional 2025
		2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Indeks Modal Manusia	0,54*	0,54*	0,56	0,54*	96,42	0,6	Na

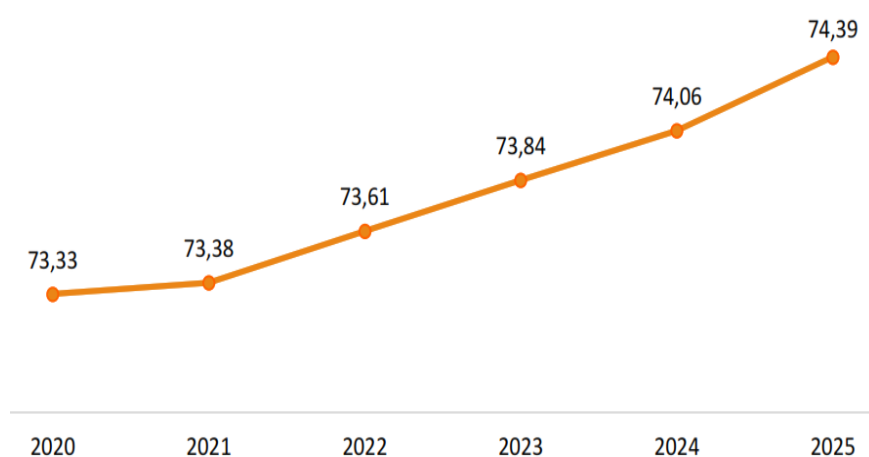
Tabel 3.53. Capaian Indikator Kinerja “Antara”

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Kinerja Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	Capaian Nasional
			Target	Realisasi	% Capaian		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,06	74,14	74,39	100,33	75,45	74,47
	Prevalensi Stunting	13,5	11,9	17,1	69,60	9,1	
Meningkatnya Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat serta Pengarusutamaan Gender	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	8,9	9,38-9,4	8,95	95,41	9,93	9,07
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,92*	60,15-60,23	58,92	97,95	62,7-63,0	57,13
	Indeks Ketimpangan Gender	0,528	0,514	0,528	91,03	0,465	0,421

Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, UHH Provinsi Jambi telah meningkat sebesar 1,06 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada 2020, UHH Provinsi Jambi adalah 73,33 tahun dan pada 2025 mencapai 74,39 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,33 tahun atau 0,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,25 persen per tahun.

Grafik 3.23. Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2025, 2026

Prevalensi Stunting

Prevalensi Balita Stunting adalah ukuran seberapa banyak balita (anak usia di bawah 5 tahun) yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada tinggi badan akibat kekurangan gizi kronis dan faktor terkait, yang diukur sebagai tinggi badan yang jauh lebih rendah daripada standar usia anak berdasarkan standar pertumbuhan WHO (kurang dari -2 z-score height-for-age). Persentase stunting (sangat pendek dan pendek) dan wasting (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita usia 0-59 bulan sejak 2020 – 2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah yang baik dalam upaya mencapai target RPJP (prevalensi stunting 5% di tahun 2045), yang artinya harus mampu mengurangi balita stunting baru sebesar 25% atau 325.000 balita per tahunnya. Tahun 2025 prevalensi stunting naik 3,9% dibandingkan tahun 2024.

Tabel 3.54. Prevalensi Balita Stunting Provinsi Jambi Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

No.	Kabupaten/Kota	2022 (SSGBI)	2023 (SKI)	2024 (SKI 2023)	2025 (SKI 2024)
1.	Kerinci	24,2	8,7	8,7	16,4
2.	Merangin	14,5	14,9	14,9	9,6
3.	Sarolangun	16,8	4,8	4,8	6,6
4.	Batanghari	26,6	10,1	10,1	18,4
5.	Muaro Jambi	18,6	12	12	18,8
6.	Tanjung Jabung Timur	22,5	23,7	23,7	23,9
7.	Tanjung Jabung Barat	9,9	14,1	14,1	7,0
8.	Tebo	25	22,7	22,7	24,2
9.	Bungo	15,4	13,7	13,7	20,4
10.	Kota Jambi	14	13,5	13,5	10,3
11.	Kota Sungai Penuh	26	4,1	4,1	8,0
	PROVINSI	18	13,5	13,5	17,1

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2025, 2026

Berdasarkan hasil pengukuran prevalensi balita stunting Provinsi Jambi Tahun 2022–2025, terjadi penurunan dari 18 persen pada Tahun 2022 menjadi 13,5 persen pada Tahun 2023 dan 2024. Namun demikian, pada Tahun 2025 prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 17,1 persen, sehingga capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan stunting belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara kabupaten/kota, capaian prevalensi stunting Tahun 2025 menunjukkan variasi antar wilayah. Beberapa kabupaten/kota berhasil menurunkan prevalensi stunting, sementara sebagian daerah lainnya masih mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan efektivitas pelaksanaan intervensi stunting, baik intervensi spesifik maupun sensitif, serta belum optimalnya konvergensi program lintas sektor di seluruh wilayah. Peningkatan prevalensi stunting pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidak konsistenan pola intervensi gizi pada sasaran prioritas, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi di wilayah tertentu, kondisi sanitasi dan air bersih yang belum optimal, serta faktor sosial ekonomi keluarga.

Selain itu, perbedaan metode dan waktu pengumpulan data survei juga berpengaruh terhadap fluktuasi angka prevalensi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jambi akan memperkuat pelaksanaan intervensi spesifik, khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peningkatan cakupan pelayanan ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita, serta perbaikan tata laksana gizi di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, akan dilakukan penguatan konvergensi intervensi sensitif lintas sektor, peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk penajaman sasaran program. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan kembali prevalensi stunting secara berkelanjutan pada tahun berikutnya.

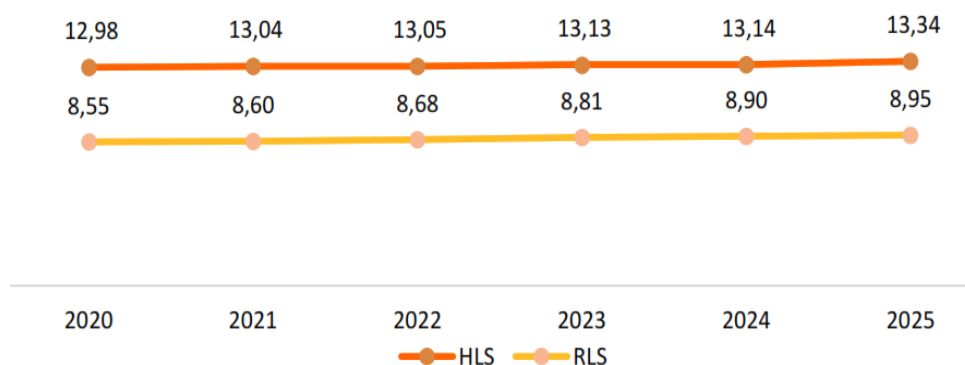
Melalui APBD Provinsi Tahun 2025 telah dilaksanakan intervensi berupa formula Pangan Khusus Makanan Khusus (PKMK) bagi balita stunting dan gizi kurang yang telah didistribusikan ke 11 Kabupaten/Kota. Peningkatan upaya kunjungan posyandu melalui promosi serta peningkatan koordinasi antar lintas sektor dan program terkait melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Pemantauan dan penyampaian hasil evaluasi pencatatan dan pelaporan gizi setiap 2 bulan oleh Provinsi melalui pertemuan via zoom (daring) Penyampaian kekurangan BMHP skrining anemia ke pusat serta mendorong agar dilakukan pengadaan melalui APBD Kabupaten/Kota. Penurunan prevalensi stunting membutuhkan peran masyarakat dan

pemerintah yang terkoordinasi, reintegrasi dan konvergen yang diwujutkan dalam 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Sektor Kesehatan berkontribusi dalam upaya spesifik, yang mana berdasarkan kajiannya hanya bisa mengungkit perubahan sebesar 30%, sisanya harus dilakukan upaya sensitif yaitu di luar sector kesehatan yang berupa perbaikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kejadian stunting.

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2025, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,55 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,92 persen per tahun. HLS pada 2025 meningkat 0,20 tahun atau 1,52 persen dibandingkan tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yaitu 0,31 persen. Sementara itu, RLS pada tahun 2025 meningkat 0,05 tahun atau 0,56 persen dibandingkan tahun 2024, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 (1,01 persen).

Grafik 3.24. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi (tahun), 2020–2025



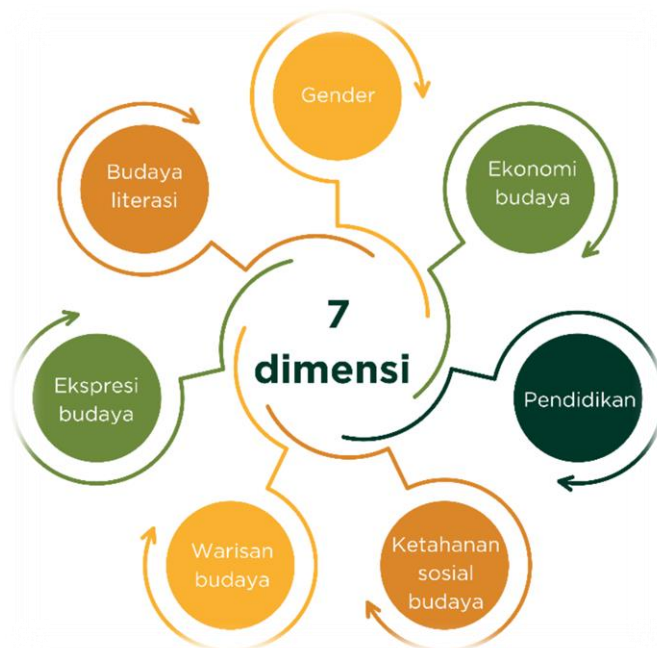
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025, 2026

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen strategis yang dikembangkan untuk mengukur secara kuantitatif capaian pembangunan kebudayaan nasional. IPK disusun dengan mengadopsi kerangka kerja Culture for Development Indicators (CDIs) dari UNESCO, yang menekankan pentingnya budaya sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, IPK berfungsi sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi kebijakan kebudayaan, serta sebagai dasar dalam penyusunan arah pembangunan berbasis data.

IPK terdiri dari tujuh dimensi utama yang saling terkait. Ketujuh dimensi tersebut mencerminkan keterkaitan antara budaya dan sektor-sektor pembangunan lainnya, serta menjadi refleksi atas seberapa besar kontribusi budaya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan nasional.

Gambar 3.11. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan



Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jambi pada tahun 2025 didorong oleh penguatan pelestarian warisan budaya, terbukti dengan ditetapkannya 9 Warisan Budaya Takbenda (WBTB) baru, sehingga total mencapai 86 karya budaya. Berikut beberapa poin terkait pembangunan kebudayaan Jambi 2025 berdasarkan data : Peningkatan Warisan Budaya.

Pada tahun 2025, Provinsi Jambi berhasil meloloskan 9 usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari total 10 yang diusulkan, yang meliputi berbagai kabupaten/kota. Total WBTB hingga tahun 2025, total WBTB Provinsi Jambi mencapai 86 karya budaya, menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian nilai-nilai lokal. Fokus Pembangunan kebudayaan difokuskan pada penguatan partisipasi pada Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), pemanfaatan ruang budaya, serta digitalisasi dan promosi edukatif.

Indeks Ketimpangan Gender

Penjelasan indikator Indeks Ketimpangan Gender sudah dijabarkan pada pembahasan capaian kinerja pada bagian 3.2.

Program utama yang dilaksanakan guna pencapaian kinerja Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berkesetaraan Gender, sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
6. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10. Program Pengelolaan Pendidikan
11. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
12. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
13. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

14. Program Pengembangan Kebudayaan
15. Program Pengembangan Kurikulum
16. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
17. Program Pembinaan Sejarah
18. Program Pengelolaan Permuseuman
19. Program Pembinaan Perpustakaan
20. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
21. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
22. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
23. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
24. Program Perlindungan Khusus Anak
25. Program Perlindungan Perempuan
26. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
27. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Faktor Penghambat :

Permasalahan utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau modal manusia di Provinsi Jambi berpusat pada ketimpangan akses pendidikan, kualitas kesehatan, dan pendapatan per kapita antarwilayah, yang mempengaruhi produktivitas.

Permasalahan Indeks Modal Manusia di Provinsi Jambi :

1. Adanya ketimpangan pendapatan / perbedaan pendapatan per kapita yang signifikan antar kabupaten/kota, memengaruhi standar hidup layak.
2. Masih adanya kesenjangan akses dan kualitas layanan kesehatan (umur panjang/sehat) serta pendidikan (pengetahuan) di daerah terpencil.
3. Masih adanya tantangan dalam mengurangi pengangguran yang memengaruhi IPM secara keseluruhan.
4. Kebutuhan peningkatan produktivitas kerja (produktivitas rendah) yang searah dengan peningkatan IPM.

Solusi dan Strategi Peningkatan :

Solusi yang krusial melibatkan peningkatan belanja modal untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, program pengentasan kemiskinan, serta pelatihan produktivitas.

1. Peningkatan Belanja Modal dengan mengoptimalkan anggaran pemerintah untuk infrastruktur fisik (sekolah/puskesmas) dan non-fisik (pelatihan).
2. Pemerataan Layanan Kesehatan dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar agar angka harapan hidup meningkat.
3. Peningkatan Akses Pendidikan melalui Program wajib belajar dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah.
4. Pemberdayaan Ekonomi melalui Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
5. Pengembangan SDM dengan berfokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025, terdapat rekomendasi penting yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2026 dalam setiap komponen SAKIP, diantaranya :

A. Perencanaan Kinerja :

1. Menyampaikan dokumen Renstra dan IKU yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah terbaru melalui esr.menpan.go.id;
2. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
3. Melakukan revaluasi kembali terhadap penetapan target kinerja sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai oleh pimpinan yang lebih tinggi;
4. Melakukan revaluasi dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
5. Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
6. Merevaluasi kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.

B. Pengukuran Kinerja

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
2. Memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan) dan untuk menyampaikan kinerja PD sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran dan transparansi kepada publik;
3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;

C. Pelaporan Kinerja

1. Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

2. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya

D. Evaluasi Kinerja

1. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
2. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi secara sinergi mengoptimalkan kewenangan pengampu SAKIP pemerintah daerah dalam menyempurnakan implementasi SAKIP dengan menyusun rencana aksi kinerja dan telah berjalan sesuai tahapan proses perbaikan, diantaranya :

Tabel 3.55. Tahapan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026

Rencana Aksi	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
PERENCANAAN KINERJA												
Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) OPD Tahun 2026 (Desk Penyusunan PK)												
Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) OPD Tahun 2026												
Upload PK OPD Tahun 2026												
Pendampingan Peningkatan Kualitas Perencanaan OPD dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan OPD, yakni :												
1. Renstra												
2. IKU												
3. Pohon Kinerja												
4. Cascading Kinerja												
5. Rencana Aksi Kinerja												
PENGUKURAN KINERJA												
Pengukuran Capaian Kinerja OPD												
PELAPORAN KINERJA												
Reviu Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah												
Upload Laporan Kinerja (LKj) OPD Tahun 2025												
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025												
Resume BAB III LKj menjadi bagian dalam LPPD Tahun 2025												
Upload LPPD 2025 & Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025												
Memperkuat koordinasi dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan SAKIP pada seluruh perangkat daerah.												

EVALUASI KINERJA												
Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB RI												
Pra dan Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2025 oleh Inspektorat												
Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi internal dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas internal terhadap dokumen "TAHUN BERJALAN" (2026)												
Meningkatkan pemantauan / monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD, dan melaporkannya kepada Gubernur Jambi												
Mengembangkan kebijakan penghargaan dan sanksi agar semakin mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada PD yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik												

Selain rencana aksi di atas, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat seluruh Pengampu SAKIP dengan menetapkan tanggungjawab tugas dalam membina dan memastikan peningkatan kualitas implementasi SAKIP dengan menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penetapan Penguatan dan Tanggungjawab Tugas dalam Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- I. Para Asisten Sekda Provinsi Jambi, memiliki tanggungjawab tugas dalam :
 - a. memastikan dan mengoordinasikan berjalannya seluruh rangkaian implementasi SAKIP pada perangkat daerah Pengampu SAKIP maupun seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan rencana aksi dan tahapan kerja yang telah disusun guna penyempurnaan SAKIP; dan
 - b. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam pelaksanaan perbaikan-perbaikan SAKIP
- II. Bappeda Provinsi Jambi, bertanggungjawab atas peningkatan kualitas perencanaan kinerja (bobot 30%) dan pengukuran kinerja (bobot 30%), antara lain :

Perencanaan Kinerja

 - a. mengoordinasikan serta melakukan desk/pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja pada seluruh Perangkat Daerah setiap tahunnya secara berjenjang guna menjaga kualitas dan keselarasannya dengan kinerja Kepala Daerah.
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja seluruh Perangkat Daerah secara seremonial bersama Gubernur Jambi setiap tahunnya.
 - c. mengoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dan memastikan perjanjian kinerja yang telah disusun oleh masing-masing individu pada Perangkat Daerah dimanfaatkan dalam aplikasi e-Kinerja agar tercipta keselarasan antara perjanjian kinerja dengan e-Kinerja.
 - d. mengoordinasikan dan melakukan pendampingan dalam penyelarasan dokumen perencanaan kinerja seluruh Perangkat Daerah seperti Rencana Strategis, Indikator Kinerja

Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja berjenjang, Critical Success Factor (CSF), pohon kinerja, cascading kinerja, crosscutting kinerja, dan rencana aksi kinerja.

- e. memastikan “indikator kinerja” yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah diampu dan dijadikan sebagai indikator dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah secara terintegrasi dan crosscutting kinerja.
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
- g. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam perbaikan-perbaikan perencanaan kinerja.

Pengukuran Kinerja

- a. mengoordinasikan dan memastikan seluruh Perangkat Daerah telah melakukan penginputan perencanaan kinerja setiap tahunnya melalui menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi PAKET SAKIP atau nama lainnya dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.
- b. mengoordinasikan serta melakukan monitoring dan pengukuran capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi PAKET SAKIP atau nama lainnya setiap triwulannya.
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
- d. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam pelaksanaan perbaikan-perbaikan pengukuran kinerja.

III. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelaporan kinerja (bobot 15%), antara lain :

- a. melakukan reviu terhadap seluruh Laporan Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun guna memastikan kualitas laporan kinerja memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. mengoordinasikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mengunggah laporan kinerja setiap tahunnya pada aplikasi e-SAKIP Reviu melalui laman esr.menpan.go.id.
- c. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi setiap tahunnya dengan melakukan tahapan persiapan, pengumpulan dan klarifikasi data bersama Perangkat Daerah, penyusunan draft, serta penyusunan rancangan akhir.
- d. pengintegrasian laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi kedalam LPPD Provinsi Jambi bersama dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi.
- e. mengunggah LPPD Provinsi Jambi kedalam aplikasi e-SAKIP Reviu melalui laman esr.menpan.go.id.
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
- g. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam peningkatan kualitas Laporan Kinerja (LKj).

- IV. Inspektorat Provinsi Jambi, bertanggungjawab atas peningkatan kualitas evaluasi kinerja (bobot 25%), antara lain :
- a. melakukan Pra Evaluasi SAKIP dan Evaluasi SAKIP setiap tahun berjalan pada seluruh perangkat Daerah guna menilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah.
 - b. meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan menyajikan temuan dan rekomendasi hasil evaluasi terhadap dokumen kinerja tahun berjalan.
 - c. meningkatkan pemantauan/monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah benar-benar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
 - d. mengembangkan kebijakan penghargaan dan sanksi agar semakin mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kinerjanya baik, begitupun sebaliknya memberikan peringatan/sanksi bagi perangkat daerah yang capaian kinerjanya tidak baik.
 - e. mempelajari, mengoordinasikan, serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) serta mengintegrasikannya dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
 - f. meningkatkan kapasitas dan penyamaan persepsi Evaluator Daerah dan Evaluator Kementerian PANRB terkait dengan Evaluasi SAKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO).
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
 - h. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam pelaksanaan perbaikan-perbaikan SAKIP.
- V. BKD Provinsi Jambi, bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pengukuran kinerja individu melalui aplikasi e-Kinerja, antara lain :
- a. melakukan pemantauan dan analisis guna memastikan pengisian Rencana Hasil Kerja (RHK) individu dan target kinerja selaras dengan perjanjian kinerja yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah.
 - b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah jika terdapat ketidaksesuaian antara pengisian RHK individu dengan perjanjian kinerja untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; dan
 - d. memberikan surat peringatan atau teguran tertulis dari Gubernur Jambi atau Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Perangkat Daerah yang kurang koordinatif dalam pelaksanaan penyelarasan e-Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- VI. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, bertanggungjawab dalam optimalisasi jaringan internet pada seluruh perangkat daerah, antara lain :
1. memastikan peningkatan kualitas jaringan Internet pada seluruh Perangkat Daerah dalam kondisi optimal guna mendukung proses penginputan data perencanaan kinerja, pengukuran, sampai dengan pelaporan kinerja berkala pada seluruh perangkat daerah yang mengakses aplikasi PAKET SAKIP Provinsi Jambi (Bappeda Provinsi Jambi) maupun e-Kinerja (BKD) Provinsi Jambi; dan
 2. melaporkan progress serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

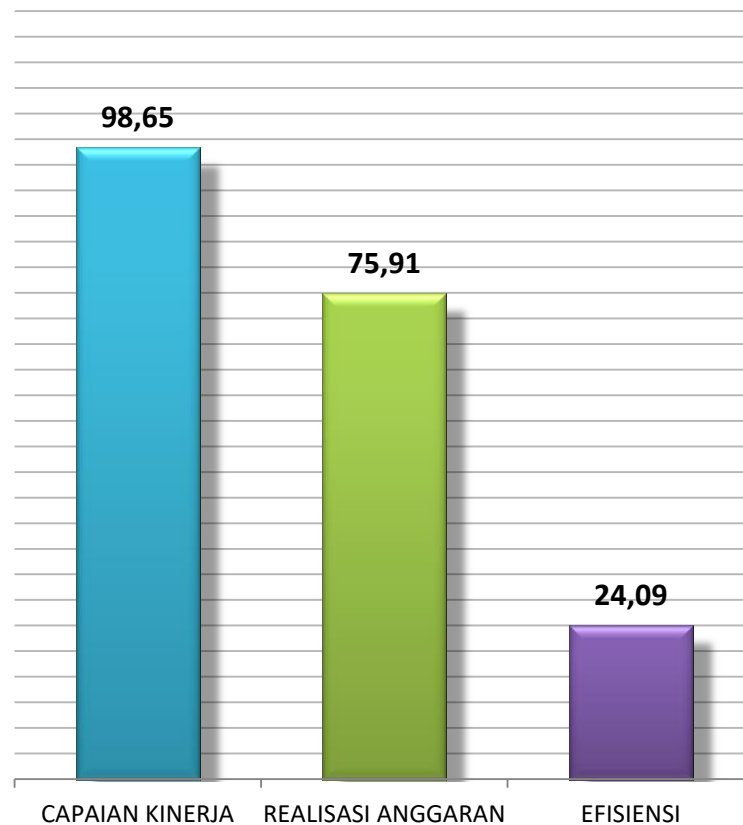
AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.56. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi Anggaran
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Adaptif	Rp. 1.144.097.715.713,80	72,73	100	27,27
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Rp. 74.966.908.700,92	97,50	101,17	2,50
3.	Terwujudnya Transformasi Digital Di Provinsi	Rp. 39.681.338.573,50	96,20	83,27	3,80
4.	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jambi	Rp. 68.214.668.110,42	92,38	104,10	7,62
5.	Terciptanya Ekosistem Inovasi Di Provinsi Jambi	Rp. 10.225.567.551,00	88,81	101,7	11,19
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 14.188.373.656,00	92,44	98,69	7,56
7.	Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan inklusif Secara Sosial	Rp. 149.057.258.504,22	91,27	93,14	8,73
8.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan	Rp. 9.143.326.386,00	85,82	101,30	14,18
9.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Rp. 467.375.709.161,00	70,22	96,43	29,78
		Rp. 1.976.950.866.356,86	75,91	98,65	24,09

REALISASI ANGGARAN

Diagram 3.18. Perbandingan Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi



Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2025 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 1.976.950.866.356,86. Pada akhir Tahun 2025, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.500.686.451.013,93 atau sebesar 75,91%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 2, yaitu Meningkatnya Daya Saing Daerah sebesar 97,50% dengan capaian kinerja memperoleh persentase sebesar 98,83%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 9, yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas sebesar 70,22% dengan capaian kinerja memperoleh sebesar 96,43%.

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang capaian kinerjanya diatas 90% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 9 sasaran, terdapat 8 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi capaian 90%.

Berikut diinformasikan 9 capaian sasaran dan tingkat efisiensi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Adaptif” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan persentase sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 27,27%
2. Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Daerah” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Daya Saing Daerah” mencapai kinerja dengan persentase sebesar 101,17% dan efisiensi anggaran sebesar 2,50%.
3. Sasaran “Terwujudnya Transformasi Digital Di Provinsi” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi” meraih tingkat capaian kinerja sebesar 83,27% dan efisiensi anggaran sebesar 3,80%.
4. Sasaran “Terwujudnya Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jambi” tercapai melalui indikator kinerja “Pertumbuhan Ekonomi”, “Tingkat Pengangguran Terbuka”, dan “Indeks Ketahanan Pangan” dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,10% dan efisiensi anggaran sebesar 7,62%.
5. Sasaran “Terciptanya Ekosistem Inovasi Di Provinsi Jambi” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Inovasi Daerah” dengan tingkat capaian sebesar 101,7% dan efisiensi anggaran sebesar 11,19%.
6. Sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator kinerja “Tingkat Kemiskinan” memperoleh capaian sebesar 98,69% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,56%.
7. Sasaran “Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan inklusif Secara Sosial” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru” dengan tingkat capaian sebesar 93,14% dan memperoleh efisiensi sebesar 8,73%.
8. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca” dengan perolehan capaian sebesar 101,30% dan tingkat efisiensi sebesar 14,18%.
9. Sasaran “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas” tercapai melalui indikator kinerja “Indeks Modal Manusia” dengan perolehan capaian sebesar 96,43% dan tingkat efisiensi sebesar 29,78%.

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Laporan Kinerja ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Gubernur Jambi Tahun 2025 Awal dan Perubahan.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2021-2026 sebesar 103,57%. Dari 12 IKU, sebanyak 8 Indikator berhasil melampaui target kinerja. Selanjutnya, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD 2025-2029 sebesar 98,47% dengan 8 indikator berhasil melampaui capaian $\geq 100\%$. Keberhasilan ini didorong oleh tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi antar instansi.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.976.950.866.356,86,- terealisasi sebesar Rp. 1.500.686.451.013,93 dengan efisiensi sebesar 24,09%.

Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.



LAMPIRAN



PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
(Berdasarkan RPJMD 2021-2026)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100%
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	5,2%	4,94%	95%
		Tingkat Kemiskinan	6,8%	6,89%	98,69%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54,2	63,85	117,8
		Akses terhadap Air Minum Layak	87%	82,46%	94,78
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,15	75,05	102.60
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO2eq)	5,1jt ton CO2eq	5,1 ton CO2eq (2024)	100
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38%	4,08	107,35
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	74,5	76,16	102,23
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	73,56	75,13	102,13
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	0,58	0,528	91,03

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
(Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	79	79	100
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,42	3,46	101,17
3.	Terwujudnya Transformasi Digital Di Provinsi Jambi	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	50,80	42,3	83,27
4.	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jambi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8%	4,93	102,71
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38	4,08	107,35
		Indeks Ketahanan Pangan	74,5	76,16	102,23
5.	Terciptanya Ekosistem Inovasi Di Provinsi Jambi	Indeks Inovasi Daerah	58,75	59,75	101,7
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,8	6,89	98,69
7.	Terwujudnya Sistem Perekonomian Yang Rendah Karbon, Efisien Dalam Penggunaan Sumber Daya, Dan Inklusif Secara Sosial	Indeks Ekonomi Hijau	61,39	57,92*	94,35
		Indeks Ekonomi Biru	15,26	14,03*	91,94
8.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,15	75,05	102,60
		Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	78,5	78,5*	100
9.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Modal Manusia	0,56	0,54*	96,43



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letnan Jenderal M. T. Haryono Nomor 2, Telanaipura, Jambi 36122

Telepon (0741) 61606, Faksimile (0741) 62317

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 30 Maret 2026.

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRM0.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letnan Jenderal M. T. Haryono Nomor 2, Telanaipura, Jambi 36122

Telepon (0741) 61606, Faksimile (0741) 62317

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini .

Jambi, 30 Maret 2026.

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMO.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1
Telanaipura Jambi**